KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2018 - 2033











Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.
Dr. Syamsu Rijal, M.Pd., CHE
Muhammad Arfin M. Salim, Ph.D.
Faisal Akbar Zaenal, S.ST.Par., MM

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018-2033

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE Muhammad Arfin M.Salim, Ph.D. Faisal Akbar Zaenal, S.ST.Par. MM

Penerbit: Politeknik Pariwisata Makassar 2020

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018-2033

Penulis:

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd Dr. Syamsu Rijal, M.Pd. CHE Muhammad Arfin M.Salim, Ph.D. Faisal Akbar Zaenal, S.ST.Par. MM

ISBN: 978-602-51991-9-6

Editor:

Muhammad Zainuddin Badollahi

Tata Letak/Desain Cover:

Ahmad Suthami Putra

Penerbit:

Politeknik Pariwisata Makassar

Redaksi:

JI. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga Kota Mandiri Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 Telp/Fax +62411 838456

Email: email@poltekparmakassar.ac.id

Cetakan Pertama, Juni 2020 Hak Penerbitan © 2020 Politeknik Pariwisata Makassar Dilarang mengutip dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik cetak photoprint, microfilm tanpa ijin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian daerah serta menjadi media pelestarian alam dan budaya sekaligus memperkenalkan potensi keindahan alam, letak strategis, kemudahan akses, keramahan penduduk serta sistem nilai masyarakat yang ramah dan religius

Politeknik Pariwisata Makassar pada tahun 2018 bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang menghasilkan arahan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dengan fokus pada potensi wisata bahari, budaya dan minat khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan survey, diskusi kelompok terfokus dan serangkaian pembahasan bersama *stakeholders* kepariwisataan Kabupaten Jeneponto telah dilakukan untuk menyepakati dan menyempurnakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagai dokumen publik yang dijadikan pedoman dan rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga RIPPARKAB ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menjadikan ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	HALAMA DENCANTAD	N :
DAFTA	PENGANTARR ISI	i ii
DAFTA	R TABEL	٧
DAFTA	R GAMBAR	/ii
BAB -		
PENDA	HULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud, Tujuan dan Sasaran	4
1.3.	Keluaran	6
1.4.	Ruang Lingkup	6
1.5.	Metodologi	10
1.6.	Jangka Waktu Perencanaan	18
BAB -	2	
KEPAR	IWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO	
2.1.	Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional	20
2.2.	Kepariwisataan Kab. Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Prov. Sulsel	24
2.3.	Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto	30
BAB -	3	
KONDI	SI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO	
3.1.	Sejarah Kabupaten Jeneponto	39
3.2.	Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto	42
3.3.	Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto	44
3.4.	Perekonomian Kabupaten Jeneponto	50
	Λ	
BAB -	THE ATEN JENEPONTO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA	
_		F.C
4.1.	Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Jeneponto	56
4.2.	Fasilitas Pariwisata Kabupaten Jeneponto	90
4.3.	Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Jeneponto	94

BAB -	5	
	TRI PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO	
5.1.	Usaha Pariwisata Kab. Jeneponto	98
5.2.	Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata	107
BAB -	6	
PASAR	DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO	
6.1.	Perkembangan Wisatawan Kabupaten Jeneponto	109
6.2.	Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Jeneponto	119
6.3.	Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto	124
BAB -	7	
KELEN	IBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO	
7.1.	Unsur Akademisi (<i>Academician</i>)	129
7.2.	Unsur Birokrasi (<i>Government</i>)	130
7.3.	Unsur Masyarakat (<i>Community</i>)	131
7.4.	Unsur Pengusaha (<i>Business</i>)	132
7.5.	Unsur Media (<i>Media</i>)	133
BAB -	8	
	P DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PATEN JENEPONTO	
8.1	Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan	135
8.2	Prinsip Pembangunan Kepariwisataan	138
8.3	Konsep Pembangunan Kepariwisataan	140
8.4	Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisataan	145
BAB -	9	
KEBIJA	AKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PATEN JENEPONTO	
9.1	Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan	148
9.2	Strategi Pembangunan Kepariwisataan	148
9.3	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto	156

BAB -	. 10	
RENC	ANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA PATEN JENEPONTO	
10.	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	166
10.2	2 Kawasan Pegembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	169
10.3	3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	170
BAB -	. 11	
	RAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO	
11.	l Arahan dan Strategi Dalam Aspek Tata Ruang	195
11.2	2 Arahan dan Strategi Pengembangan Produk Wisata	204
11.3	3 Arahan dan Strategi Pengembangan Industri dan Investasi	210
11.4	4 Arahan dan Strategi Pengembangan Pasar dan Pemasaran	214
11.	5 Arahan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan	219
11.0	6 Arahan dan Strategi Pengelolaan Kelembagaan dan SDM	220
LAMP	IRAN	
D	aftar Pustaka	246
lo	lentitas Penulis	252

DAFTAR TABEL

NO.	TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	1.1	Bagan Kerangka Penyusunan Ripparkab Kabupaten Jeneponto	1 - 14
2.	2.1	Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar Dan Sekitarnya Dalam RPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan	2 - 20
3.	3.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010-2017	3 – 11
4.	3.2	Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	3 – 13
5.	3.3	Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	3 – 15
6.	3.4	Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	3 – 18
7.	3.5	Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2017	3 – 21
8.	3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017	3 – 27
9.	4.1	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	4 – 52
10.	4.2	Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2016	4 – 53
11.	4.3	Produksi dan Daya Terjangkau Menurut Ranting/ Sub Ranting di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 – 2017	4 – 54
12.	4.4	Jumlah Pelanggan dan Air Minum Yang Disalurkan Oleh PAM Kabupaten Jeneponto Menurut Segmentasi Tahun 2017	4 – 55
13.	4.5	Banyaknya Sentral, Kapasitas, Sambungan Induk dan Sambungan Cabang Telepon di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017	4 – 56
14.	4.6	Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018	4 – 58
15.	4.7	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4-6 (Wajib Uji) di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017	4 – 62
16.	4.8	Banyaknya Kunjungan Kapal Dan Jumlah/ Isi Kotor Menurut Bulan di Pelabuhan Jeneponto Tahun 2017	4 – 64

NO.	TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
17.	5.1	Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di 5 – 7 Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	
18.	5.2	Hotel, Jumlah Kamar, Tempat Tidur pada Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 8
19.	5.3	Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 9
20.	5.4	Jumlah Tamu Menginap Pada Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 11
21.	5.5	Jumlah Tenaga Kerja Hotel Menurut Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 13
22.	5.6	Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 17
23	5.7	Usaha Salon dan Spa di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017	5 – 19
24	10.1	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata Bangkala Dan Sekitarnya	10 – 31
25	10.2	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata Tamalatea Dan Sekitarnya	10 – 34
26	10.3	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata Binamu Dan Sekitarnya	10 – 35
27	10.4	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata Tarowang Dan Sekitarnya	10 – 38
28	10.5	Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata Rumbia Dan Sekitarnya	10 – 40

DAFTAR GAMBAR

NO.	NO. JUDUL GAMBAR		
	GAMBAR		HAL
1	1.1	Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan	1 - 21
2	1.2	Pengembangan Berbasis Masyarakat	1 – 24
3	1.3	Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk dan Pasar	1 – 25
4	1.4	Konsep Klaster Destinasi Pariwisata	1 - 28
5	1.5	Jangka Waktu RIPPARKAB Kabupaten Jeneponto	1 - 32
6	2.1	Sistem Kepariwisataan Nasional (Tatanan Makro)	2 – 5
7	2.2	Peta Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taka Bonerate dan Sekitarnya	2 – 9
8	2.3	Peta Kawasan Stategis Pariwisata Daerah Bulukumba dan Sekitarnya	2 – 19
9	3.1	Peta Wilayah Adminsitratif Kabupaten Jeneponto	3 – 10
10	4.1	Bukit Gantarang Buleng	4 – 2
11	4.2	Pantai Ujung Timur	4 – 3
12	4.3	Hutan Bakau Balang Beru Tarowang	4 – 4
13	4.4	Lembah Hijau Rumbia	4 – 5
14	4.5	Air Terjun Tama'lulua Bossolo	4 – 7
15	4.6	Air Terjun Boro	4 – 8
16	4.7	Air Terjun Lembah Impian	4 – 10
17	4.8	Wisata Lembah Bontolojong	4 – 11
18	4.9	Air Terjun Tuang Loe	4 – 12
19	4.10	Air Terjun Kara'ngasa	4 – 12
20	4.11	Pantai Karaeng Sutte (Karsut)	4 – 14
21	4.12	Sungai Ta'lambua	4 – 15
22	4.13	Birta Ria Kassi	4 – 16

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
23	4.14	Bukit Toenga	4 – 17
24	4.15	Pulau Libukang (Pulau Harapan)	4 – 19
25	4.16	Air Terjun Je'ne A'ribaka	4 – 20
26	4.17	Batu Sipinga	4 – 21
27	4.18	Pantai Garassikang	4 – 22
28	4.19	Bukit dan Danau Bulujaya	4 – 23
29	4.20	Rumah Adat Kamabara Tolo'	4 – 27
30	4.21	Masjid Tua Tolo'	4 – 28
31	4.22	Kompleks Makam Tuang Nong (Tung Nung)	4 – 29
32	4.23	Kompleks Makam Raja-Raja Binamu	4 – 32
33	4.24	Pacuan Kuda	4 – 34
34	4.25	Pesta Panen	4 – 35
35	4.26	Maulid Sidenre	4 – 36
36	4.27	Je'ne-Je'ne Sappara	4 – 41
37	4.28	Bungung Salapang	4 – 42
38	4.29	Tambak Garam	4 – 44
39	4.30	Water Park Boyong	4 – 45
40	4.31	Pantai Tamarunang	4 – 47
41	4.32	Coto Kuda/ Gantala Jarang	4 – 48
42	4.33	Tuak Manis/ Ballo' Tanning	4 - 49
43	6.1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran Tahun 2010- 2017	6– 4
44	6.2	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal Tahun 2017	6– 6
45	6.3	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2017	6– 7

NO.	NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HAL
46	6.4	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata Yang Dilakukan Tahun 2017	6– 10
47	6.5	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Akomodasi Yang Digunakan Tahun 2016-2017	6– 11
48	6.6	Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016-2017	6– 13
49	6.7	Rata-Rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2017	6– 14
50	6.8	Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017	6– 17
51	6.9	Matriks Mc. Kinsey	6– 34
52	6.10	Prinsip dan Langkah Strategik Pengembangan Daya Saing Pariwisata	6– 38
53	10.1	Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Jeneponto	10– 7
54	10.2	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1	10– 10
55	10.3	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2	10– 14
56	10.4	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3	10– 17
57	10.5	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4	10– 21
58	10.6	Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5	10– 25
59	10.6	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Jeneponto	10– 29

BAB - 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sinkronisasi sektor-sektor pembangunan merupakan modal dasar bagi tercapainya pembangunan pariwisata yang terpadu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan pariwisata terpadu (integrated tourism development) terkait erat dengan berbagai sektor dan aspek yang tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan tersebut, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan salah satu jawaban yang dapat mengakomodasi konstelasi tersebut, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan perubahan kondisi saat ini.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah diperlukan untuk; menghindari pembangunan yang bersifat sektoral, tumpang tindih atau terbengkalai karena saling mengharap; menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana (bongkar pasang); dan meminimalisasi dampak negatif pariwisata yang mungkin timbul dan memaksimalkan dampak positif pariwisata.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata sekaligus memberikan arah pengembangan yang jelas di dalam memposisikan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto pada tingkat provinsi maupun nasional dan yang tidak kalah pentingnya agar dapat bersinergi secara positif, dan menghindarkan benturan antar daerah.

Selain itu, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto dapat memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait : siapa berbuat apa, baik untuk instansi tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten, dan kaitan antar sektor.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai daerah tujuan wisata yang diunggulkan sebagai destinasi unggulan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kepopuleran alam dan potensi budaya yang cukup dikenal di Indonesia sehingga dalam pengembangannya tentu membutuhkan adanya suatu perhatian khusus dari para *stakeholders* untuk saling berinteraksi dan bersinergi satu sama lainnya.

Dalam Road Map dan Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang memposisikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Destinasi Unggulan di luar Jawa-Bali sekaligus menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Kawasan Selatan dalam pengembangan destinasi unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan parwisata menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi.

Di samping hal hal tersebut di atas, juga dipertimbangkan perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyerasikan dengan sumber daya manusia dalam pembangunan. Dari konsep ini dapat disimpulkan :

Pertama: Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut ditopang

oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan dan manusia

yang berkembang secara berkelanjutan.

Kedua: Sumber daya alam terutama udara, air dan tanah memiliki

ambang batas yang penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitas yang berakibat berkurangnya kemampuan lingkungan menopang pembangunan secara berkelanjutan dan akan menimbulkan gangguan pada

keserasian sumber daya alam dengan sumber daya manusia.

Ketiga: Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas

hidup, semakin baik mutu kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya harapan usia hidup dan turunnya tingkat

kematian.

Keempat: Pola pembangunan sumber daya alam yang baik tidak

menutup kemungkinan untuk mendapatkan pilihan lain di

masa depan dalam penggunaan sumber daya alam.

Kelima: Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang

meningkat kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan

bagi generasi mendatang.

Khusus mengenai pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sekurang kurangnya harus berbasis pada enam hal yaitu :

- 1. Kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam sampai pada batas daya dukung lingkungan;
- 2. Pengambilan keputusan *bottom-up* dengan mengikut sertakan berbagai *stakeholders*;
- 3. Menghapus kemiskinan, isu gender dan tetap menghormati hak asasi manusia;
- 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 5. Pelestarian keanekaragaman hayati dan sistem perlindungan kehidupan; dan
- 6. Pelestarian pengetahuan dan cara hidup kelokalan dengan tetap menghargai perbedaan.

beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan apabila daerah tidak memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata atau memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengembangan kepariwisataan antara lain adalah:

- Pembangunan kepariwisataan tidak memiliki dasar hukum yang 1. tidak kepastian kuat sehinga ada dalam pembangunan kepariwisataan. Kepastian hukum ini sangat penting terutama bagi investor menanamkan modalnya pada yang akan penting kepariwisataan di daerah. Investor sangat pembangunan kepariwisataan mengingat kemampuan pemerintah terutama dalam bidang pembiayaan masih relatif sangat kurang. Investor sangat membutuhkan kepastian hukum karena dengan demikian akan menjamin bahwa investasi yang telah ditanamkan akan kembali dan selanjutnya akan memberi keuntungan.
- Pembangunan kepariwisataan tidak berkelanjutan. Pembangunan 2. kepariwisataan tidaklah mungkin dilakukan sekaligus sebab kepariwisataan merupakan fenomena yang terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, disamping itu pembangunan kepariwisataan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pembangunan kepariwisataan dilakukan secara bertahap. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, dibutuhkan perencanaan yang matang. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan terkesan bongkar pasang atau kemungkinan terjadi bila pemerintahan di daerah itu berganti maka berubah pula kebijakan pembangunan kepariwisataan. Artinya apa yang telah dibangun oleh pemerintahan daerah sebelumnya dapat saja dibongkar oleh pemerintahan daerah berikutnya. Bila suatu daerah telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang baik hal ini dapat dihindari sebab pemerintahannya walaupun berganti namun pembangunan kepariwisataan akan dapat terus berlanjut berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang telah ada.
- 3. Pembangunan kepariwisataan yang tidak terarah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam pembangunan kepariwisataan. RIPPAR tingkat kabupaten/ kota disusun berdasarkan RIPPAR tingkat provinsi dan RIPPAR tingkat provinsi disusun berdasarkan RIPPARNAS dengan demikian pembangunan kepariwisataan secara nasional akan terarah, karena Rencana Induk Pengembangan Pariwisata itu disusun secara hirarki, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pembangunan kepariwisataan yang satu dengan yang lainya.
- Pembangunan kepariwisataan tidak terkoordinir dengan baik. 4. Kepariwisataan merupakan pembangunan multi sektoral dan multi dimensional artinya pembangunan kepariwisataan tidak dapat berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor dan bidang oleh karena kordinasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan pembangunannya. Dengan adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang baik, sehingga ada dua hal yang dapat dihindari berkenaan dengan kordinasi yaitu pertama : terjadi saling mengaharapkan antara sektor atau bidang dapat sehingga

menyebabkan pembangunan kepariwisataan justru terbengkalai (tidak terlaksana) dan yang kedua adalah antara satu sektor atau bidang melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang berbeda (tumpang tindih) sehingga justru menyebabkan pembangunan kepariwisataan yang tidak efisien dan efektif. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang baik, telah terdapat perencanaan yang matang termasuk keterlibatan sektor-sektor dan bidang-bidang yang terkait sehingga tiap sektor atau bidang sudah jelas apa yang harus dilakukan untuk pembangunan kepariwisataan itu.

Secara umum perencanaan pariwisata diperlukan dengan berbagai alasan di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan.
- Pariwisata adalah sangat kompleks, multi-sektor dan melibatkan berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kelautan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
- Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto antara lain adalah sebagai berikut :

- 1.Visi, misi dan kebijakan pemerintah kabupaten Jeneponto merupakan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga agar dapat sejalan dengan visi, misi dan kebijakan daerah, maka perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.
- 2.Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Jeneponto, dibutuhkan penyesuaian dengan Ripparnas dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata provinsi Sulawesi Selatan.
- 3.Perubahan data potensi Kabupaten Jeneponto. Perubahan perubahan tersebut antara lain :
 - Perubahan objek dan daya tarik wisata potensil dan yang telah dikembangkan

- b. Perubahan aksesibilitas dari dan menuju ke Kabupaten Jeneponto dan khususnya dari dan menuju ke objek dan daya tarik wisata yang dimiliki.
- c. Perubahan demografi dan pemerintahan
- d. Perubahan usaha pariwisata yang telah dimiliki baik hotel (penginapan) maupun restoran (rumah makan) serta usaha pariwisata lainnya
- e. Perubahan amenitas atau fasilitas penunjang lainya seperti Pos dan Telekomunikasi, Air bersih, Listrik, Bank, Sarana kesehatan, Pendidikan, Pos keamanan dan lain lain.
- 4.Analisa data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ini yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) teknik analisis yaitu analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, analisa Point Rating System yaitu dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata dan analisis tata ruang yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan kawasan wisata unggulan.
- Penentuan kawasan wisata unggulan yang penting dilakukan untuk menentukan kawasan-kawasan yang menjadi unggulan pariwisata Kabupaten Jeneponto.
- Penentuan sasaran pengembangan yang dilakukan agar pembangunan pariwisata mempunyai tujuan dan sasaran yang ielas.
- 7.Kebijakan, strategi dan indikasi pengembangan dibuat secara lebih mendalam dan terinci sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dapat dikelompokan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan yang memuat tujuan pengembangan pariwisata daerah dikaitkan dengan visi dan misi serta kebijakan pemerintah daerah. Tujuan pengembangan pariwisata daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2033.
- b) Mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah

- Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung utama pembangunan kepariwisataan.
- e) Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
- f) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Sasaran Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Sasaran dari kegiatan pengembangan pariwisata daerah secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Tersusunnya konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto yang dilandasi pendekatan perencanaan pariwisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektorsektor pembangunan lainnya.
- 2. Teridentifikasinya prioritas pengembangan daya tarik wisata yang dapat diunggulkan dan atau diandalkan di Kabupaten Jeneponto.
- 3. Tersusunnya arahan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata, dan indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto.

1.3 Keluaran

Keluaran dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini adalah dokumen acuan dalam pengembangan potensi pariwisata sehingga pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto menjadi lebih terarah dan terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan serta kepariwisataan nasional, serta menjadi acuan dari sektor pendukung lainnya dalam meningkatkan sinergitas pembangunan daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kajian dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini terdiri atas lingkup wilayah studi, lingkup materi, dan lingkup kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah pada seluruh wilayah administratif Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah tercatat 749,79 km2 yang tersebar pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan, dengan jumlah 31 Kelurahan dan 82 desa, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangkala;
- b. Kecamatan Bangkala Barat;
- c. Kecamatan Tamalatea:
- d. Kecamatan Bontoramba;
- e. Kecamatan Binamu;
- f. Kecamatan Turatea;
- g. Kecamatan Batang;
- h. Kecamatan Arungkeke;
- i. Kecamatan Tarowang;
- j. Kecamatan Kelara; dan
- k. Kecamatan Rumbia

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

- Gambaran dan kajian terhadap sumber daya pariwisata dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Jeneponto, yang mencakup aspek;
 - a. Aspek Pemasaran,
 - b. Aspek Pengembangan Produk Wisata,
 - c. Aspek Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Pariwisata,
 - d. Aspek Pengelolaan Lingkungan,
 - e. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia,
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat,
 - g. Aspek Investasi.
- Pengkajian terhadap prospek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk di dalamnya aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.
- 3. Perumusan rencana pengembangan pariwisata bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah.
- 4. Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, strategi pengembangan pariwisata dan indikasi program pengembangan pariwisata.

1.4.3 Lingkup Kegiatan

Agar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, maka lingkup kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1 Bagan Kerangka Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto

NO	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	INDIKATOR
1	Pengumpu- lan data	Mengungkapkan potensi potensi yang dimiliki dan permasalahan umum yang dihadapi oleh kegiatan kepariwisataan sebagai suatu sektor kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian kegiatan pengembangan wilayah	Gambaran potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata	1. Kebijakan Pembangunan Karateristik daerah 2. Ketersediaan produk wisata 3. Aspek Pasar
2	Analisis	1. Menilai keadaan masa kini 2. Menilai kecenderungan perkembangan 3. Menghitung kapasitas pengembangan 4. Memperkirakan kebutuhan masa datang	Teridentifikasi- nya prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi	 Kebijakan pembangunan Sumberdaya wilayah Ketersediaan produk wisata & penunjang Pasar dan proyeksi Wisatawan Pola kunjungan wisatawan makro
3	Perumusan Sasaran Pembangun an Pariwisata	 Menetukan sasaran jangka panjang 10-15 tahun Menentukan sasaran jangka pendek 5 tahun (merupakan bagian integral dari sasaran jangka panjang) 	 Sasaran Jangka Panjang Sasaran jangka pendek 	Jumlah Kunjungan Wisatawan Aspek Ekonomi Aspek Sosial Budaya Aspek fisik/ lingkungan Hidup
4	Perumusan Rencana Pengemba- ngan	Menyusun rencana pengembangan berdasarkan sasaran yg telah ditetapkan	Rencana pengembangan	Intensitas pemda Tingkat/ kecepatan pertumbuhan pariwisata

				3. Jangka waktu penyusun rencana
5	Perumusan Kebijakan Pengemba- ngan	1. Memberikan jawaban atas permasalahan/ isu-isu strategis yang dihadapi 2. Menetapkan arahan, sebagai landasan bagi perumusan langkah- langkah pengembangan operasional	Kebijakan pengembangan yang meliputi kebijakan pemasaran, pengembangan produk, pemanfaatan ruang, pengolaan lingkungan, pengembangan SDM, Pemberdayaan masya- rakat & kebijakan investasi	Program Pemasaran Produk wisata Pengelolaan SDM Masyarakat
6	Perumusan Strategi Pengem- bangan	Menjelaskan langkah-langkah dasar yang akan dilakukan oleh daerah, sebagai penjabaran dari kebijakan dan arahan pengembangan	1. Strategi Pengembang an produk 2. Strategi pemasaran	 Perbedaan karateristik daerah Pendekatan perencanaan yang berbeda Pengembangan ODTW Pengembangan sarana pariwisata Pengembangan aksesbilitasi & infrastruktur Pengembangan Pasar dan Promosi Positioning Masyarakat
7	Indikasi Program Pengemba- ngan	Menjabarkan secara rinci dari setiap strategi kedalam program yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu	1. Program jangka panjang 2. Program jangka pendek	Program utama Program Pendukung

1.5 Metodologi

1.5.1 Kerangka Pendekatan

Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah atau negara. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk wisata, wilayah dan citra atau karakteristik atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding (Comparative Advantages) dan keunggulan saing (Competitive Advantages) dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional.

Pemahaman terhadap Destinasi Pariwisata yang operasional perlu dijabarkan dalam pendekatan perencanaan pariwisata mengingat terdapat banyak rujukan yang dapat digunakan oleh karena itu definisi di bawah ini dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sebagai berikut :

Destinasi pariwisata merupakan gabungan komponen produk wisata (atraksi, amenitas dan akses) yang menawarkan pengelaman utuh/ terpadu bagi konsumen atau wisatawan. Secara Tradisional, destinasi sering dikaitkan dengan suatu area dengan batasan geografis yang jelas, misalnya negara, pulau atau sebuah kota (Hall, 2000, Davidson and Maitland, 1997).

Lebih lanjut, dalam kerangka pengembangnnya, Kelly & Nankervis (2001) menegaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata minimal mencakup lima komponen utama, yaitu ;

- 1. **Atraksi** (attractions) yang mencakup alam, budaya, buatan (artificial), event dan sebagainya.
- 2. **Aksesibilitas** (*accessibility*) yang mencakup dukungan sistem transportasi meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi.
- 3. **Amenitas** (*amenities*) yang mencakup fasilitas pendukung yang meliputi ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, pembuangan limbah, Bank, pemadam kebakaran, kemanan, Rumah sakit dan sebagainya. Dan fasilitas penunjang yang meliputi retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi pariwisata dan sebagainya.
- 4. **Akomodasi** (*accommodation*) yang mencakup ketersediaan sarana penginapan berupa hotel, pondok wisata, wisma dan sebagainya.
- 5. **Aktifitas** (*activities*) yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi yang dapat dilakuti atau dilakukan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke lokasi tersebut.

Destinasi pariwisata dalam hal ini tidak hanya merupakan sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan, namun lebih dari itu adalah keterkaitan objek dengan unsur-unsur pendukung seperti amenitas, aksesi bilitas dan unsur penunjang

lain yang bekerja secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem yang saling menunjang.

Berdasarkan tren, indikator dan motivasi wisatawan, World Tourism Organization (2004) Mengklasifikasikan bahwa destinasi pariwisata terdiri dari 17 jenis, yaitu :

- 1. Kawasan Perairan/Bahari (coastal zone)
- 2. Kawasan Pantai (beach destination and sites)
- 3. Gugusan Kepulauan (small island)
- 4. Kawasan Gurun (destination in desert and a rid areas)
- 5. Kawasan Pegunungan (*mountain destination*)
- 6. Kawasan Taman Nasional (natural and sensitive ecological areas)
- 7. Kawasan Ekowisata (ecotourism destinations)
- 8. Kawasan Cagar Alam (park and protected areas)
- 9. Komunitas disekitar Kawasan Lindung/Konservasi (*communities* within or adjacent to protected area)
- 10. Jalur atau Rute Perjalanan (trail and routes)
- 11. Situs Peninggalan Sejarah (built heritages sites)
- 12. Kawasan Pemukiman Tradisional (*small and traditional communities*)
- 13. Kawasan Wisata Kota (*urban tourism*)
- 14. Pusat Kegiatan MICE dan Konvensi (*MICE and convention centre*)
- 15. Kawasan Taman Bertema (theme park)
- 16. Kawasan Taman Air (water park)
- 17. Kapal Pesiar dan Simpul-simpul perjalanannya (*cruise ship and their destinations*)

Selain itu perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan perencanaan pariwisata yang dilakukan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (suistainable tourism development). Hal ini dilakukan karena di dalamnya terkandung makna pengembangan pariwisata yang tanggap terhadap kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan pada intinya menekankan 4 (empat) prinsip, yaitu:

a. Layak secara ekonomi (economically viable).

Bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan efisien untuk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi

pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Berwawasan lingkungan (enviromental viable).

pembangunan Bahwa proses harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya) dan menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekologi.

c. Diterima secara sosial (socially acceptance).

Bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta tidak merusak tatanan dan nilai-nilai budaya yang mendasar dimasyarakat.

d. Dapat diterapkan secara teknologis (technologically appropriate).

Bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumber dava lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Secara skematis konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 1.1 Pendekatan Pengembangan Berkelanjutan

Sumber: Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pendekatan perencanaan pembangunan berkelanjutan, secara rinci dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Prinsip pembangunan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi jangka panjang.
- 2) Penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal.
- 3) Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang lestari.
- 4) Kesesuaian antara kegiatan pengembangan dengan skala, kondisi dan karakter daerah.
- 5) Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan pengembangan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal.
- 6) Antisipasi yang tepat dan pemantauan terhadap perubahan

2. Pendekatan Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto mengacu pada Konsep Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas Lokal dengan memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan *local genuine*.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata kepada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap besar dalam hal tanaga kerja dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Pendekatan pengembangan berbasis masyarakat bertumpu pada penguatan masyarakat setempat sehingga sejak dalam tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pelestarian sumber daya pariwisata pada setiap destinasi yang dikembangkan akan bersinerji dengan kearifan lokal masyarakat disekitar destinasi tersebut.

Lebih jelasnya mengenai pendekatan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.2
Pengembangan Berbasis Masyarakat
(Community Based Development)



Sumber: Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih jauh dalam pembangunan pariwisata diperlukan upaya memberdayakan atau memperkuat posisi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian pengembangan pariwisata.

3. Pendekatan Kesesuaian Aspek Produk dan Pasar

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang dapat ditampilkan sebagai berikut :

GAMBAR 1.3 Pendekatan Kesesuaian Antara Aspek Produk Dan Pasar



Sumber: Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto pada dasarnya merupakan perpaduan pengembangan 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek produk dan aspek pasar. Aspek produk terkait dengan penyediaan unsur-unsur penawaran (*supply side*) yang di dalamnya tercakup; atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia dan unsur penunjang lainnya. Sedangkan aspek pasar berkaitan dengan unsur-unsur permintaan (*demand side*) yang di dalamnya tercakup demografi dan psikografi pasar (persepsi, motivasi, ekspektasi).

4. Pendekatan Borderless

Konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas (borderless), merupakan salah satu implikasi dari dampak globalisasi. Pendekatan perencanaan Kabupaten Jeneponto didasarkan pada konsep tersebut mengingat kegiatan pariwisata tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenitas, aksesibilitas dan sebagainya.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/kabupaten/ propinsi bahkan negara lain dengan mengaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan tersebut dapat membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

5. Pendekatan Cluster

Pendekatan *cluster* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha di sektor industri. Pendekatan tersebut menggambarkan sekelompok sektor usaha yang memiliki mata rantai atau keterkaitan fungsi yang saling mendukung dan dikembangkan secara terintegrasi pada suatu lokasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya saing usaha yang tinggi.

Pendekatan *cluster* dalam pengembangan destinasi dalam kaitan perencanaan pariwisata berorientasi pada fokus dan penguatan kualitas kinerja hubungan mata rantai usaha yang terkait dan sistem pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan daya saing destinasi. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komponen *cluster* pariwisata dapat mencakup unsur-unsur;

- a. Atraksi/ daya tarik wisata (alam, budaya, buatan/ khusus)
- b. Amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (hotel, fasilitas hiburan, fasilitas perbelanjaan, *tour operator* dan maskapai

- penerbangan, rumah makan dan bar, pemasok produk pariwisata)
- c. Institusi di bidang penyiapan sumber daya manusia, misalnya perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata, sekolah menengah pariwisata, lembaga pelatihan dan sebagainya.
- d. Kelembagaan di sektor publik di tingkat daerah/lokal.

Komponen *cluster* pariwisata tersebut secara skematis dapat digambarkan konfigurasi dan keterkaitannya sebagai berikut :

AKSESIBILITAS, **ATRAKSI AMENITAS INFRASTRUKTUR &** LAYANAN PENDUKUNG Tour Operator Taman Desa / Guida Airport/ Nasiona Budaya Pelahuh Akomodasi Teleko Danau Event/ munika Transpo Restoran Utilitas Peningg Pasar TIC, dsb Keseha alan Tradisio UNSUR KELEMBAGAAN PEMERINTAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) UNSUR MASYARAKAT UNSUR SWASTA/PELAKU INDUSTRI PARIWISATA/INVESTOR

GAMBAR 1.4 Konsep Klaster Destinasi Pariwisata

Sumber: Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

6. Pendekatan Menyeluruh dan Terintegrasi

Seluruh aspek dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto, termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta implikasi-implikasinya terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, ekonomi, dianalisis, direncanakan, dan dikembangkan. Pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam kaitan regional.

Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan pada kerangka perencanaan terpadu antar sektor

yang dalam perwujudannya berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor.

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata juga perlu memperhatikan antara lain :

- a. Kepentingan nasional dan daerah.
- b. Arah dan kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional dan provinsi
- c. Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan provinsi.
- d. Pokok permasalahan daerah dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
- f. Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumber daya.
- g. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- h. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten lain yang berdekatan.

1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini dilakukan sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

- Pembentukan Kelompok Kerja melalui nota kesepahaman antara Direktur Politeknik Pariwisata Makassar dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.
- 2. Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara maupun focus group discussion serta peninjauan lapangan secara langsung untuk mengenali kondisi fisik, sosial dan ekonomi. Data sekunder dilakukan melalui data pustaka terkait karakteristik wilayah dan aspek-aspek dalam pengembangan kepariwisataan.
- 3. Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kabupaten Jeneponto, dilakukan setelah data primer dan sekunder dianalisis dan selanjutnya dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan.
- 4. Uji Publik dilaksanakan untuk meminta tanggapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan pariwisata.
- 5. Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

1.6 Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kabupaten Jeneponto ini disusun berdasarkan amanah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata disusun untuk jangka panjang 15 tahun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto, sebagai landasan perumusan rencana tingkat dibawahnya
- 2. Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun waktu 10 tahun yang dibagi atas strategi pengembangan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua.
- 3. Indikasi program pengembangan disusun untuk jangka waktu tahunan pada peiode 5 tahun pertama.

Kebijakan dan Rencana Jangka Panjang

Jangka Panjang

Jangka Menengah

Jangka Menengah

Jangka Pendak

Aksi Pengembangan

Peninjauan dan Penyesuaian kembali per lima tahun

Tahun

0 5 10 15

GAMBAR 1.5 Jangka Waktu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto

1.7 Sistematika Pelaporan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto disusun dengan seistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup (lingkup wilayah, lingkup materi, dan lingkup kegiatan); metodologi; kerangka pendekatan; tahapan pelaksanaan pekerjaan; jangka waktu perencanaan; dan sistematika pelaporan.

- **Bab II** Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan, meliputi Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional; Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan; dan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto.
- **Bab III** Kondisi Wilayah Kabupaten Jeneponto Dalam Mendukung Pembangunan Kepariwisataan, meliputi Kondisi Fisik; Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata; Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata; Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata; dan Perekonomian Kabupaten Jeneponto.
- **Bab IV** Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata, meliputi Daya Tarik Dan Sumber Daya Wisata Kabupaten Jeneponto; Fasilitas Pariwisata; Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata; Aksesibilitas Pendukung Pariwisata; Prasarana Umum Pendukung Pariwisata; Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
- **Bab V** Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto meliputi Usaha Wisata; dan Usaha Kecil Dan Menengah Pendukung Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
- **Bab VI** Pasar Pariwisata Dan Upaya Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto, meliputi Jumlah Dan Perkembangan Pasar Wisatawan; Karakteristik Pasar Wisatawan; Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- **Bab VII** Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto, meliputi Sumber Daya Manusia Pariwisata; Asosiasi Pariwisata; Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata; dan Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
- **Bab VIII** Prinsip Dan Konsep Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto, meliputi Tantangan Dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan; Prinsip Pembangunan Kepariwisataan; Konsep Pembangunan Kepariwisataan; Visi; Misi; dan Tujuan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
- **Bab IX** Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto, meliputi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan; dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto.
- **Bab X** Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Jeneponto, meliputi Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata; dan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Jeneponto
- **Bab XI** Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto.

вав - 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

2.1. Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Nilai penting dan kontribusi pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan Secara politik. penyerapan tenaga kerja yang tinggi. sosiopengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsa dan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, kepariwisataan juga efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada gilirannya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah.

Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki asset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi sektor kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak dan gas.

Upaya memposisikan peran strategis sektor pariwisata dalam perekonomian nasional telah dirintis sejak 2 dekade yang lalu melalui program Visit Indonesia Year 1991. Dukungan yang konsisten untuk menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi strategis masa depan semakin menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan kekayaan aset sumber daya wisata alam dan

budaya yang dimiliki negara Indonesia, maka kontribusi tersebut masih memiliki peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan seperti penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi pariwisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia. Penataan destinasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan memfasilitasi tata kelola destinasi di 16 KSPN, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pengembangan masyarakat lokal dengan pendekatan Community Based Tourism, Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Sistem Informasi Daya Tarik Wisata Nasional, Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Pengembangan Manajemen Kunjungan Wisata. Upaya pengembangan produk wisata dilakukan melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Tematik (Minat Khusus) Alam dan Buatan, Sejarah Budaya serta Ekowisata, implementasi Kebijakan Nasional Pengembangan Wisata Kapal (Yacht) Asing, Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (Cruise), Pengembangan dan Pemutakhiran Database Situs Selam (Dive Site) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan Geopark Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (Sport Tourism Event), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan Action Plan Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk Special Event Carnival Indonesia.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kapasitas serta antisipasi dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dilakukan melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata, Kampanye Sapta Pesona, Gerakan Nasional Sadar Wisata di Kalangan Pramuka, Polisi Pariwisata, Lanjut Usia dan Remaja, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan serta Pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan Kepariwisataan.

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, dimana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa Lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan

pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Gambar 2.1 Sistem Kepariwisataan Nasional (Tatanan Makro)



Sumber: Blue Print Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2006

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata yang dikenal dengan istilah pentaheliks adalah unsur akademisi, dunia usaha (bisnis), masyarakat (komunitas), media dan pemerintah. Namun demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dari kegiatan pariwisata. Kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

 Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- 2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- 3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- Sosial Budaya 4. Ketahanan adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasilhasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

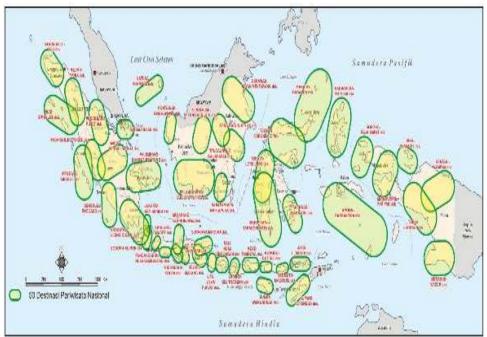
Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui Pariwisata penetapan Destinasi Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi.

Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu Destinasi Pariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah Provinsi Silawesi Selatan, dengan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ke 38 yaitu Makassar-Takabonerate dan Sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang terdiri dari KPPN Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bulukumba

dan sekitarnya, KPPN Bone dan sekitarnya, KPPN Pare-Pare dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya. Sedangkan 3 (tiga) KPPN lainnya yaitu KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya serta KPPN Palopo dan sekitarnya bergabung dengan provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dalam DPN Toraja–Lorelindu dan sekitarnya.

Gambar 2.2 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Takabonerate dan sekitarnya



Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, 2011

Dengan demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto dengan segala keunikan alam dan budaya sebagai potensi dasar pariwisata telah ditetapkan dan menjadi bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional sehingga menjadi prioritas pembangunan dan secara bersama-sama dengan kawasan lain, telah menjadi citra daya tarik kepariwisataan nasional.

2.2. Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto Dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dengan potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik, baik wisata alam, budaya, sejarah, religius, dan wisata tematik. Visi Pembanguan Kepariwisataan Daerah Sulawesi Selatan adalah "Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kepariwisataan provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
- d. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas daerah; dan
- e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat kawasan andalan yang berfungsi sebagai; tempat aglomerasi permukiman perkotaan, pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/pengolahan komoditas wilayahnya dan wilayah sekitarnya, dan kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumber daya alam kawasan. Adapun kawasan andalan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perikanan, industri umum, dan agroindustri serta perdagangan;
- b. Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan;
- c. Bulukumba Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan;
- d. Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan perdagangan;
- e. Kawasan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- f. Kawasan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan;
- g. Kawasan laut Sangkarang–Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Selain itu, terdapat kawasan yang diarahkan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor dan atau sub sektor pembangunan.

Sektor pariwisata, berbagai aspek seperti daya tarik keindahan alam darat maupun laut, budaya, sejarah, olahraga, Konvensi, dan belanja bisa dijadikan tujuan. Secara umum Objek wisata budaya dan alam Tana Toraja merupakan ikon pariwisata Sulawesi Selatan yang sudah dikenal mendunia. Taman laut Takabonerate sangat potensial untuk menjadi ikon wisata bahari dengan mengembangkan faktor aksesibilitas, akomodasi,

dan perlindungan terumbu karang dan anak-anak ikan. Selain itu, banyak ragam obyek wisata dengan daya tarik regional, nasional maupun lokal yang lokasinya tersebar di kabupaten-kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan secara aktif sehingga tumbuh berkembangnya lapangan kerja pemandu wisata, jasa transportasi, perhotelan, restoran, informasi pariwista, komunikasi, cindera mata, kesenian, perdagangan jasa maupun produk lainnya yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapat masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata ini diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Selain itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu faktor urgen yang harus dipertimbangkan, daya dukung fisik, sosial, ekonomoi, dan budaya perlu diperhatikan dengan; dengan menyediakan ruang untuk kehidupan manusia yang sehat dan nyaman beserta segenap kegiatan pembangunannya, menyediakan sumber daya untuk kepentingan manusia baik melalui penggunaan langung maupun melalui proses produksi atau pengolahan, menyerap atau menetralisasi limbah, serta melakukan fungsi-fungsi penunjang termasuk siklus biokimia, siklus hidrologi, dan lainnya. Mengacu pada azas keadilan, maka akses transportasi laut dan terutama akses informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan keseluruh pulau-pulau kecil. Perairan pantai selatan dan timur Sulawesi Selatan yang potensial sebagai budidaya rumput laut dapat dikembangkan dengan agrobisnis maupun agroindustri khusus rumput laut yang mengikut sertakan komunitas petani rumput laut. Untuk peningkatan perekonomian rakyat dan perekonomian wilayah, maka wisata bahari tepat dikembangkan dengan potensi Kawasan Wisata Bahari Kapoposang dan sekitarnya, termasuk pulau-pulau kecil di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kawasan wisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Jeneponto, serta Kawasan Wisata Bahari Takabonerate, Perairan pantai bila diperlukan juga dapat direklamasi untuk penambahan luas daratan untuk pembangunan dan atau perluasan pelabuhan, bandara, kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, industri, pergudangan.

Pengembangan strategi spasial pembangunan pariwisata dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan mampu mengakomodir kegiatan dalam setiap wilayah pengembangan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan arus kunjungan wisata sehingga dapat memberikan pengaruh bagi kegiatan wisata yang ada dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor priwisata.

Tujuan dari analisis penentuan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) adalah untuk memberikan pelayanan dan informasi tentang keberadaan objek dan daya tark wisata dalam suatu DTW, sehingga para wisatawan mendapatkan gambaran tentang bagaimana DTW yang dikunjungi. Dalam penentuan SKPP di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada jenis Daya Tarik Wisata (DTW), ditinjau dari aspek: karakteristik tiap daya tarik wisata dan ragam jenis daya tarik wisata. Adapun SKPP dalam wilayah DTW Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar, yang terdiri wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros,

- Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kabupaten Bulukumba. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Benteng. Pada kawasan ini dikhususkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah karena selain pertimbangan letak geografis juga pertimbangan potensi Sumber Daya Alam yang khas dengn Daya Tarik Wisata Tirta.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Bone. Pada kawasan ini terdiri Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Jenis Daya Tarik Wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan pada koridor tersebut yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata daerah (KSPD) Pare-Pare dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Pare-pare. Pada kawasan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada koridor ini diantaranya adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro dan Wisata Minat Khusus.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Palopo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kota Palopo. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara.
- g. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Toraja dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kabupaten Tana Toraja. Pada kawasan ini terdiri dari Daya Tarik Wisata di Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan internal karakter wilayah provinsi tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Sulawesi Selatan meliputi:

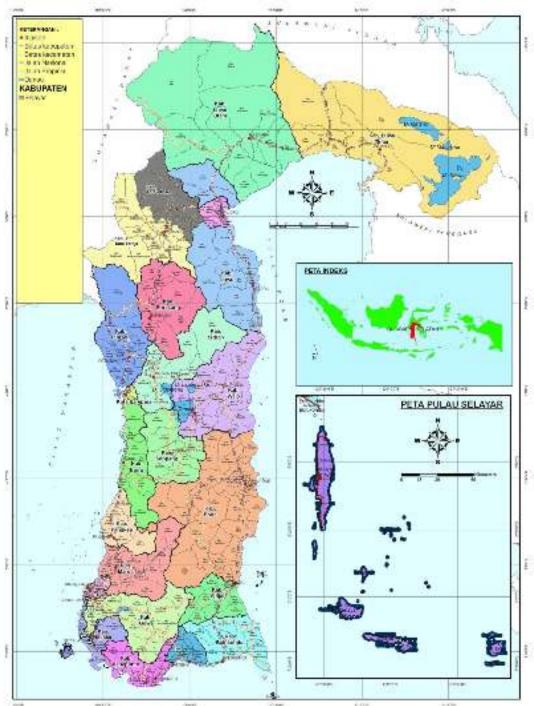
 a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, terdiri dari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

- Jenis daya tarik yang dikembangkan adalah DTW Alam, DTW, Tirta, DTW Sejarah, DTW Budaya, DTW Agro. Pusat pelayanan pada KPP Makassar terletak di Kota Makassar.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Jenis daya tarik yang dikembangkan diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam. Pusat pelayanan pada KPP Bulukumba dan sekitarnya terletak di Kabupaten Bulukumba.
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Takabonerate, dengan mempertimbangkan arahan Destinasi Kepariwisataan Nasional yang menetapkan daya tarik wisata Takabonerate sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan nasional maka penetapan KSPD Jeneponto yang hanya mengkhususkan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu koridor pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mempertimbangkan letak geografis wilayah yang merupakan daerah kepulauan namun dengan potensi daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata tirta yang sangat unik. Pusat Pelayanan KSPD Takabonerate ini ditetapkan di Kota Benteng yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Wajo dan sekitarnya, terdiri dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap. Pusat KSPD Bugis Pantai Timur ini terletak di Kabupaten Bone. Pada KSPD Wajo dan Sekitarnya terdapat beberapa daya tarik wisata yang dapat dikemas dalam satu paket perjalanan wisata yang menjadi unggulan yaitu terdiri dari DTW Alam, DTW Budaya, DTW Sejarah, DTW Tirta, dan DTW Agro, serta pengembangan daya tarik wisata minat khusus atau wisata penelitian yaitu pada kawasan industri Kerajinan dan pengolahan.

Posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dalam kebijakan pembangunan pariwisata provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP), yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Makassar dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan terletak di Kota Makassar. KSPD ini meliputi wilayah Kabupaten Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto. Jenis daya tarik yang dikembangkan pada kawasan ini diantaranya adalah DTW Tirta, DTW Budaya, Alam, DTW, Agro, dan DTW Alam.

Berdasarkan penetapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Jeneponto merupakan salah satu destinasi prioritas provinsi Sulawesi Selatan yang secara bersama-sama dengan kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata dengan daya tarik utama adalah wisata bahari, wisata tirta, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus alam dan agro.

Adapun posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya

Sumber: Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Adapun daya Tarik wisata kabupaten Jeneponto yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Makassar dan Sekitarnya Dalam RIPPARDA Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi Obyek	Keterangan
1	Permandian Birta Ria		Kecamatan	Sudah
	Kassi	Alam	Tamalatea	dikembangkan
2	Pasanggarahan Loka	Alam	Kecamatan Kelara	Sudah
	A: T : D			dikembangkan
3	Air Terjun Boro	Alam	Kecamatan Kelara	Belum
			1,5	dikembangkan
4	Batu Jangang	Alam	Kecamatan	Belum
			Tarowang	dikembangkan
5	Pulau Libukang	Tirta	Kecamatan	Belum
			Bangkala	dikembangkan
6	Pantai Kalumpang	Tirta	Kecamatan	Belum
		Tita	Tamalatea	dikembangkan
7	Garam Nasara	Industri	Kecamatan	Belum
		muusm	Barangkala Barat	dikembangkan
8	Makam Raja-Raja	Coiorah	Kecamatan	Sudah
	Binamo	Sejarah	Bontoramba	dikembangkan
9	Makam I Maddi' Dg.	Coiorah	Kecamatan	Belum
	Rimakka	Sejarah	Tamalatea	dikembangkan
10	Bungung Salapan	Caiarah	Kecamatan Batang	Belum
		Sejarah		dikembangkan
11	Pacuan Kuda	Dudovo	Kecamatan	Sudah
	Pabiang	Budaya	Binamu	dikembangkan
12	Upacara Jene-Je'ne	Dudova	Kecamatan	Belum
	Sappara'	Budaya	Tarowang	dikembangkan
13	Rumah Adat Patealla	Pudovo	Kecamatan Kelara	Belum
		Budaya		dikembangkan
14	Balla Lompoa	Dudova	Kecamatan	Belum
	·	Budaya	Binamu	dikembangkan

Sumber: Ripparda Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

2.3. Kepariwisataan Dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Jeneponto

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas pada visi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026, yaitu "Jeneponto Yang Maju, Tangguh, dan Bermartabat Dengan Bernafaskan Keagamaan". Hal ini dimaksudkan dapat diwujudkan melalui penjabaran visi sebagai berikut :

a. Tangguh; adalah suatu daya atau kemampuan untuk menghadapi tantangan dan persaingan global dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri dalam mewujudkan kehidupan maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain.

- b. **Bermartabat**; adalah suatu nilai yang memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Jeneponto dalam mematuhi norma-norma hukum dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat turatea.
- c. **Bernafaskan Keagamaan**; adalah suatu pegangan pada nilai-nilai yang bersifat religius dalam pencapaian kehidupan masyarakat jeneponto yang maju, tangguh dan bermartabat.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi pemerintah kabupaten Jeneponto, adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kepemerintahan dan Kelembagaan yang Baik; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan tata kepemerintahan dan kelembagaan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung perangkat daerah yang efektif, efesien dan aparatur yang profesional serta akuntabel, dengan infrastruktur yang memadai dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.
- b. Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan; Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah upaya untuk mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur kabupaten agar mampu mendukung dan mewadahi aktifitas pengembangan wilayah secara efektif, efesien dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas; Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto dengan meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas adalah upaya mendorong pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, mahluk pribadi maupun sosial sebagai perwujudan nilai-nilai humanis dan pluralis.
- d. Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto yang bermoral, beretika, dan berbudaya dengan memperkuat jati diri dan karakter daerah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, dan menerapkan nilai-nilai luhur masyarakat Turatea dan budaya bangsa.
- e. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi**; Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan upaya mendorong bidang pertanian melalui implementasi teknologi dan optimaslisasi pemanfaatan lahan dan perdagangan sebagai aktifitas ekonomi utama atau sebagai tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas pelengkap dan pendukung.
- f. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah; Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam secara optimal dan daya saing daerah adalah upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah dengan keunggulan kompetitif dan terpadu.

Sebagai ukuran tercapainya Jeneponto yang Maju, Tangguh dan Bermartabat dengan Bernapaskan Keagamaan Menuju Masyarakat Sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kepemerintahan dan Kelembagaan yang baik, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance);
 - b. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat.
 - c. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan dan kelembagaan yang memadai;
 - d. Terjaminnya ketersediaan produk hukum daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2. Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Infrstruktur yang Berkelanjutan, yang ditandai dengan :
 - a. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata disemua tingkatan pemerintahan.
 - c. Terbangunnya İnfrastruktur lingkungan diseluruh wilayah Perdesaan dan Perkotaan.
- 3. Terwujudnya Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia Sehat 2010
 - Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia serta meraih predikat 4 Besar di Sulawesi Selatan sehingga lebih mampu bersaing,
 - c. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat yang diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan target 5 Besar di Sulawesi Selatan.
 - d. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat.
- 4. Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya yang ditandai dengan:
 - 1. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu dengan nilai moderen yang universal;
 - 2. Meningkatnya aktivitas dan derajat kehidupan keagamaan.
 - 3. Menurunya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tak bertanggung jawab baik pada lingkungan Birokrasi, Politis maupun pada lingkungan masyarakat, sehingga Kabupaten Jeneponto Sebagai daerah bebas KKN di Sulawesi Selatan.
- 5. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi, yang ditandai dengan :

- a. Terciptanya struktur ekonomi yang berbasis sumber daya (resorces based economic) yang maju terutama sektor pertanian, kehutanan, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang didukung dengan industri serta aktifitas ekonomi kerakyatan lainnya;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta melalui pengembangan pola kemitraan usaha dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja
- 6. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya Saing Daerah, yang ditandai dengan :
 - a. Terkelolanya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk andalan dan unggulan nasional dan regional yang berimplikasi pada meningkatnya iklim investasi.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan menguasai IPTEK dalam menghadapi tantangan global.
 - Meningkatnya kualitas produk-produk daerah yang memiliki nilai kompetitif di pasar nasional, regional maupun di pasar global yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah secara makro;

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 tersebut, maka dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013 dan memperhatikan hasil analisis isu strategis serta mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang terpilih masa bakti 2014 – 2018, maka Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2018 adalah : "Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dengan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera".

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
- 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif Transfaran dan Akuntabel;
- 5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan dasar di setiap desa/ Kelurahan;
- 6. Meningkatkan Kwalitas Kehidupan Beragama.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jeneponto yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2018 yang berhubungan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi Kedua.

- 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua dan keempat yakni :
 - a. Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- Tujuan 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni, dan Pengelola Obyek Wisata yang memiliki kompetensi dan lebih kompetitif. dengan sasaran pembinaan SDM Aparatur, Pelaku Usaha Wisata, Kelompok Sanggar Seni dan Pengelola Obyek Wisata yang handal dan kompetitif.
- Tujuan 4 : Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, dengan sasaran pembinaan Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan Kebudayaan

b. Misi Keempat: Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;

Tujuan 5 : Melaksanakan perencanaan yang realistis, terukur, transparan, efektif, efisien dan professional serta melaksanakan pelaporan yang akuntabel, dengan sasaran optimalisasi perencanaan dan sistem pelaporan yang professional

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto mengacu pada pembangunan kepariwisataan nasional yang tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupan. Falsafah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Jeneponto menyangkut hubungan kehidupan yang berkeseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Segala bentuk kegiatan kepariwisataan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto juga tidak mengenal perbedaan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahasa, seperti pengakuan atas prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Pemanfaatan lingkungan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto menerapkan keseimbangan mikro (manusia) dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan, dan pengrusakan terhadap budaya dan alam Kabupaten Jeneponto.

Selain itu, beberapa isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto juga bisa menjadi landasan pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Isu-isu strategis utama pembangunan Kabupaten Jeneponto tersebut adalah:

- a. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan obyek wisata.
- b. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
- c. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien.

- d. Kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan masih rendah.
- e. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.
- f. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona.
- g. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap inidvidu pada semua aspek kehidupan.
- h. Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri asli sebagai bagian dari kebudayaan daerah.
- Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya serta peningkatan kualitas paket/event wisata.

Isu-isu utama ini merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak cukup terjadi di beberapa tempat saja, namun harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Peningkatan kualitas dalam segala aspek secara merata diharapkan akan meningkatkan juga produktivitas dan kualitas masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga diharapkan daya saing Kabupaten Jeneponto pun semakin meningkat hingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata ke tingkat yang paling tinggi. Kesejahteraan yang merata diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan secara disiplin dan dengan penuh kesadaran.

Sebagai salah satu sektor pembangunan daerah, visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu kepada visi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, yaitu "Terwujudnya Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan yang tangguh, berdaya saing dan berkesinambungan sebagai pilar Perekonomian menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera".

Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

- a. Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan bermakna bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto adalah Pusat Penggalian, Pelestarian, Pembangunan dan pengembangan sektor Pariwisata dan kebudayaan;
- b. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*
- c. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.

- d. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
- e. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang sejahtera dengan jalan memberikan konstribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka visi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religious, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam Visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto tahun 2018-2033 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jeneponto tersebut mengandung pengertian bahwa :

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan minat khusus berbasis ekologi unggulan di provinsi Sulawesi Selatan mengandung makna bahwa kabupaten Jeneponto sesuai dengan potensi alam, masyarakat dan budaya harus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang spesifik pada variasi bentang alam pulau, pantai, dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kekayaan flora dan fauna serta sejarah budaya tinggalan masa lampau perlu dikemas secara unik dengan memperhatikan pelestarian alam, lingkungan, dan budaya sehingga tercipta karakter destinasi yang berbeda dan unggul di Sulawesi Selatan;
- b. Religius mengandung makna bahwa masyarakat Jeneponto sangat taat dalam memeluk dan beribadah sesuai ajaran agama serta system nilai yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, sehingga dalam pengembangan pariwisata tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan system nilai masyarakat tersebut;
- c. Tangguh Mengandung makna adanya kondisi dimana budaya masyarakat tidak terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif dan tetap menjaga dan melestarikan norma-norma dan nilai-nilai luhur adat dan budaya daerah ditengah arus globalisasi sebagai ciri khas dan jati diri Masyarakat *Turatea* Kabupaten Jeneponto. dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dengan dasar *Si'ri Na Pacce*.
- d. Berdaya saing mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan komparatif sebagai kekuatan untuk menghadapi persaingan dan tantangan globalisasi dan pasar bebas.
- e. Berkesinambungan berarti bahwa Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan secara terprogram, terarah dan berkelanjutan
- f. Pilar perekonomian berarti mampu menjadi pendukung utama perekonomian di Kabupaten Jeneponto menuju masyarakat yang

sejahtera dengan jalan memberikan konstribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian pada sektor pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto tersebut, maka tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai berikut :

- Mengembangkan destinasi di Kabupaten Jeneponto yang berdaya saing.
- Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Jeneponto sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi.
- c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis ekologi.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata.
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata.
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Jeneponto
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Jeneponto ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah.
- i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto.
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Secara operasional, sasaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jeneponto, dengan sasaran utama tahun 2018-2033 adalah :

- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata,pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
- Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
- 3. Meningkatan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk dan atraksi wisata:
- 4. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi

- budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- 6. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

вав -3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

3.1. Sejarah Kabupaten Jeneponto

Sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama Belanda di Sulawesi Selatan, pemerintahan setiap daerah masih berbentuk kerajaan dan pada kelompok kerajaan yang berlatar etnis Makassar, melalui literatur sejarah, relatif hanya memperkenalkan tentang Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai pioner kerajaan Makassar. Adpun kerajaan-kerajaan lainnya termasuk ketegori kerajaan kecil bahkan pernah menjadi wilayah pemerintahan dari kerajaan besar Gowa-Tallo. Demikian halnya di Jeneponto yang mempunyai banyak kerajaan-kerajaan lokal seperti Garassi, Bangkala, Binamu, Tarowang, Sapanang, Arungkeke dan lain-lain, justru tenggelam di bawah kebesaran nama Kerajaan Gowa-Tallo.

Riwayat beserta catatan sejarah kerajaan-kerajaan (wanua) tersebut pada masa kini praktis hanya di kenal melalui suguhan informasi yang sangat kurang bahkan dapat dikatakan sangat minim. Padahal, pada sisi lain setiap kerajaan dalam skala kekuasaan sekecil apapun pasti memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, demikian halnya dengan daerah Jeneponto yang pada masa lampau merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai keunikan dan eksotisme sejarah dan budaya tersendiri.

Jeneponto atau lazim disebut *Turatea* dahulu adalah sebuah Kerajaan Makassar yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri, yang didalamnya terhimpun enam kerajaan lokal (*Palili*) yaitu Garassi, Bangkala, Binamu, Arungkeke, Tarowang dan Sapanang serta 16 kampung atau domain (Caldwell dan Bouges, 204 dalam Hadrawi 2008:8). Kemudian disisi lain Jeneponto beserta seluruh kerajaan-kerajaan lokalnya memiliki sejarah awal kemunculannya menjadi sebuah kerajaan serta perjalanannya hingga berinteraksi dengan agama Islam.

Sejarah keberadaan Jeneponto dikaji melalui dua pendekatan sejarah. Pertama, pada bulan November 1863, yang merupakan tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Hal ini membuktikan jiwa patriotisme *Turatea* dalam melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu dan pada tahun tersebut mulai diangkat "*Todo*" sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. Pada tanggal 1 Mei 1959, berdasarkan Undang - undang No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah

Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Pendekatan Kedua adalah pada tanggal 1 Mei 1863, merupakan bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu yang diangkat secara demokratis oleh "Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 dan diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling negeri- negeri *Turatea* setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Pada tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Pada abad ke-XVII, selain Arungkeke terdapat pula beberapa kerajaan yang eksis, diantaranya kerajaan Gowa, Balanipa (Mandar), Sanrobone (Takalar), Bulo-bulo (Sinjai), Binamu (Jeneponto), dan Suppa. Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan didaerah *Turatea* yang eksis pada abad ke-XVII, dimana secara geografis, Arungkeke terletak di pesisir pantai selatan Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Arungkeke diapit oleh dua Wanua, yaitu Palajau di sebelah barat dan Togo-Togo di sebelah timur. Dahulu bentuk pemerintahan di Butta Turatea, berbentuk pemerintahan "Kare" (Tompo, 2001:6). Sekarang ini wilayah Arungkeke merupakan sebuah daerah kecamatan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Didaerah ini mempunyai nilainilai historis masa lalu yang sangat tinggi serta nilai budaya siri' na pacce masih dijaga. Didaerah ini juga menjunjung tinggi adat istiadat dari leluhurnya. Salah satu contohnya yakni tradisi addengka ase lolo atau pesta panen yang diadakan di Balla Lompoa atau istana Arungkeke.

Sebagai salah satu kerajaan yang ada didaerah Jeneponto dahulu, Kerajaan Arungkeke mempunyai peranan yang cukup strategis dalam menentukan dan menciftakan suasana kondusif di wilayah kekuasaannya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yang memungkinkan kerajaan ini disegani. Disamping itu dari catatan silsilah raja-raja Arungkeke, kebangsawan serta kekerabatan rajarajanya punya hubungan dengan kerajaan di sekitar wilayah *Turatea* juga punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan diluar. Diantaranya dapat dilihat dari silsilah Arungkeke, dimana terdapat integrasi kebangsawanannya dengan Tarowang dan Boengoeng, Karaeng Tarowang bernama Patta Dulung Aroeng Areojoeng yang menikah dengan Maryam Daeng Rawang Karaeng Rawang dan melahirkan lima orang anak (Hadrawi, 2008:68-69).

Kerajaan Arungkeke merupakan kerajaan yang berdiri sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah-daerah di Nusantara ini khususnya di Sulawesi Selatan

masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika pelopor-pelopor atau tokoh-tokoh yang akan memimpin suatu kerajaan adalah berdasarkan garis keturunan atau ahli waris dari kerajaan itu sendiri. Telah menjadi anggapan umum masyarakat tradisional Sulawesi Selatan dimasa lampau, bahwa raja-raja dan cikal bakal raja yang memerintah adalah titisan darah dari Tumanurung.

Kisah Tumanurung itu merupakan awal terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Tomanurung inilah Sulawesi selatan mengalami perkembangan kemasyarakatan, kenegaraan dan kepemimpinan bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang memulai kecenderungan spesialisasi fungsi-fungsi dan peranan-peranannya.

Seperti halnya di Kerajaan Arungkeke, mitos Tumanurung masih di percaya bahwa sejarah Kerajaan Arungkeke diawali dengan munculnya wanita cantik (uru-urua) yang tidak diketahui asal-usul keberadaannya serta kematiannya tidak diketahui oleh masyarakat, jadi kuburannya pun tidak ada, sehingga masyarakat pada waktu itu menyebutnya *Tumanurung* (Manusia yang turun dari Khayangan). Toalu' Daeng Taba' turun di Kerajaan Arungkeke, tepatnya di bawah pohon Asam, dia ditemani oleh pengawal dan budaknya. Tumanurung ini memakai baju, Mahkota dari emas. Disamping itu ada juga peralatan yang dibawanya, antara lain Lesung, Alu dan beberapa perhiasan. Saat ia muncul ia menggunakan Lesung dan Alu dibawah pohon Asam, maka dari itu pelantikan raja Arungkeke dilakukan dibawah pohon asam sambil di ayun, disaat pelantikan itulah suara gendang dan alat-aalat musik lainnya yang berusia ratusan tahun diperdengarkan. Suara alat musik ini dikenal dengan nama Ganrang Talluna Arungkeke (Al-Maruzy, 2010:2).

Arungkeke juga sebuah kerajaan yang besar sama seperti Binamu, Bangkala dan Tarowang, dengan raja pertamanya yaitu seorang *Tumanurung* yang diberi gelar Ratu atau Karaeng Baine Toalu' Daeng atau Karaeng Taba Karaeng Arungkeke. Kerajaan ini diperhitungkan kebesarannya khususnya di wilayah Turatea dan umumnya di wilayah Sulawesi Selatan sebagai kerajaan lokal dengan daerah kekuasaannya antara lain, meliputi Palajau, Bulobulo, Arungkeke Tamanroya, Arungkeke Pallantikang, Pettang dan satu kerajaan Palili' yaitu kerajaan Bungeng. Dalam konteks kerajaan lokal di Turatea, Arungkeke merupakan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah pemerintahan tersendiri, situasi ini terjadi pada awal abad munculnya Arungkeke sebagai sebuah kerajaan (Hadrawi, 2008:68).

Namun pada perkembangannya, yaitu pada akhir abad ke-XVII, Arungkeke mengalami perubahan status sebagai kerajaan yang bernaung di bawah Binamu, sebagai domain atau daerah istimewa. Walaupun pada saat itu, kerajaan Arungkeke tidak bersedia ikut atau tunduk.

Turatea merupakan sebuah kerajaan beretnis Makassar yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Kerajaan lokal tersebut mempunyai sistem pemerintahan, wilayah, komunitas, beserta

tradisi tersendiri. Adapun kerajaan kuno *Turatea* seperti; Binamu, Bangkala, kalimporo', Garassi, Layu, Sapanang, Tarowang, Sidenre dan Arungkeke. Salah satu keunikan Jeneponto pada beberapa kerajaan lokal ada yang mempunyai mitologi tersendiri perihal munculnya raja pertama atau lazim disebut *tumanurung*. Mitos-mitos *tomanurunga* itu mempunyai formula-formula cerita yang unik yang menjadi karakter penceritaan setiap daerah.

Dalam sejarahnya, Jeneponto berada dalam lintas politik tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, kemudian Gowa dan yang terakhir Bone. Pengaruh tiga kerajaan tersebut semakin memberi warna Jeneponto dalam perjalanan sejarah dan budayanya disamping tetap memperlihatkan identitas lokalnya yang khas. Kata Jeneponto adalah sebuah nama yang baru muncul pada abad XIX dan munculnya nama tersebut sangat terkait dengan kepentingan administratif pemerintahan kolonial di wilayah Selatan Sulawesi Selatan.

Situasi di wilayah Jeneponto dalam peta saat ini dengan gambaran yang ada pada beberapa abad silam terutama abad XVI-XVII sangatlah berbeda. Wilayah-wilayah yang ada sekarang sudah administrasi dalam model pemerintahan modern dengan menempatkan nama Jeneponto sebagai sebagai nama kabupaten provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto membawahi 11 kecamatan. dimana tiap-tiap kecamatan membawahi desa atau kelurahan. Pada umumnya kerajaankerajaan lokal atau wabuwa sekarang ini ada yang menjadi desa atau kelurahan dan ada pula yang menjadi kecamatan.

3.2. Kondisi Fisik Kabupaten Jeneponto

3.2.1. Aspek Fisik Dasar

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu dari 24 Kabupaten/ Kota dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 90 km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan).

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5⁰ 16'13" sampai 5⁰ 39'35" Lintang Selatan dan antara 12 ⁰ 14' 19" sampai 12⁰ 7'31" Bujur Timur. Topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan laut, bagian tengah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, dan pada bagian Selatan meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Jeneponto yang memiliki luas 749,79 km² terdiri dari 11 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 82 dan 31 kelurahan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

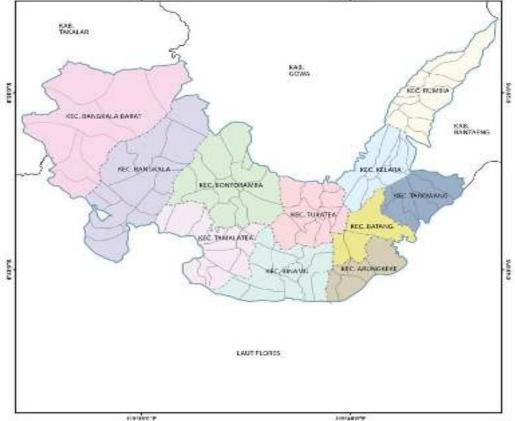
- Sebelah Utara: Kabupaten Gowa dan Takalar a.
- Sebelah Selatan: Laut Flores. b.
- Sebelah Timur: Kabupaten Bantaeng. c.
- Sebelah Barat : Kabupaten Takalar. d.

Secara ekonomi, kabupaten Jeneponto memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada jalur perhubungan darat yang menghubungkan kota-kota kabupaten kearah kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai, serta jarak yang cukup dekat dengan kota Makassar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai wilayah administratif Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jeneponto KAE. TAKALAR





Sumber: Hasil Penelitian, 2018

3.2.2. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten Jeneponto tahun 2017 sebesar 359.787 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk berjumlah 95,42%, terdiri dari 173.771 jiwa penduduk laki-laki dan 186.016 jiwa penduduk perempuan dengan penyebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkala yaitu sebanyak 53.887 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan jumlah penduduk hanya sebesar 18.517 jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2017

No	Kecamatan	2010	2017	Laju Pertumbuhan
1.	Bangkala	49.924	53 887	1 ,10
2.	Bangkala Barat	26.374	28 469	1 ,10
3.	Tamalatea	40.384	41 810	0 ,50
4.	Bontoramba	35.003	36 242	0 ,50
5.	Binamu	52.483	56 068	0 ,95
6.	Turatea	29.954	32 002	0 ,95
7.	Batang	19.203	19 494	0 ,22
8.	Arungkeke	18.244	18 517	0 ,21
9.	Tarowang	22.350	22 682	0 ,21
10	Kelara	26.877	27 269	0 ,21
11	Rumbia	23.012	23 347	0 ,21
Jum	lah	343.808	359.787	0,65

Sumber: Kantor BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Selama periode 2010-2017 laju pertumbuhan penduduk mengalami percepatan sebesar 0,65%. Sedangkan kepadatan penduduk setiap km² dihuni sebanyak 247 jiwa. Wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan Tamalatea yang mencapai 372 jiwa per km², dan kepadatan penduduk terendah terletak di wilayah kecamatan Bangkala Barat yang hanya mencapai 93 jiwa per km².

3.3. Potensi Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto terdiri dari daya tarik wisata pantai, gua, laut, pulau, panorama, agro, sejarah, budaya masyarakat tradisional, maupun *events* (peristiwa pariwisata). Adapun potensi daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto dilihat dari aspek sejarah, aspek sosial budaya masyarakat,dan sektor-sektor lain yang terkait lainnya

3.3.1. Potensi Wisata Alam

Daya Tarik wisata alam sebagai salah satu daya Tarik wisata Kabupaten Jeneponto menjadi daya tarik utama bagi

wisatawan untuk berkunjung. Data dan sebaran potensi wisata alam pantai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Potensi Wisata Alam Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Coo Contorona	1 Coo	Doga Contarana Kas
	Goa Gantarang Buleng	Goa Panorama Alam	Desa Gantarang Kec. Kelara
2	Pantai Ujung Timur	1. Panorama Alam	Desa Bonto Ujung
		2. Rekreasi dan	Kec. Tarowang
		olahraga pantai	
3	Wisata Hutan	1. Panorama alam	Desa Balang Beru
	Mangrove	2. Flora dan fauna	Kec. Tarowang
4	Lambah Hijau Dumbia	3. Wisata Edukasi	Doga Dantanamaa
4	Lembah Hijau Rumbia	1. Panorama Alam	Desa Bontonompo Kec. Rumbia
		2. Kolam Renang3. Out-bound	Nec. Rumbia
		4. Wisata Agro	
5	Air Terjun Tama'lulua	Panorama Alam	Desa Rumbia Kec.
	Bossolo	2. Air Terjun	Rumbia
		3. Goa	
6	Air terjun Boro	1. Panorama Alam	Desa Bontonompo
	-	2. Air Terjun	Kec. Rumbia
7	Pasanggarahan Loka	1. Panorama Alam	Desa Loka Kec.
			Rumbia
8	Salu Lompoa	Panorama Alam	Desa Lebang Manai
			Kec. Rumbia
9	Air terjun Lembah	1. Panorama Alam	Desa Bontomanai
	Impian	2. Air terjun	Kec. Rumbia
10	Wisata Lembah	3. Goa dan Sumur 1. Panorama Alam	Dogo Hiung Bulu
10	Bontolojong	1. Panorama Alam	Desa Ujung Bulu Kec. Rumbia
11	Air terjun Tuang Loe	1. Panorama Alam	Desa Datara Kec.
' '	7 th terjair rading Loc	2. Air Terjun	Bontoramba
12	Air terjun Kara'ngasa	Panorama Alam	Desa Lebang Manai
]	2. Air Terjun	Kec. Rumbia
13	Pantai Karaeng Sutte	1. Panorama Alam	Desa Kampala Kec.
	(Karsut)	2. Rekreasi dan	Arungkeke
		Olahraga	
14	Pantai Kampung	1. Panorama Alam	Desa Sicini Kec.
	Sicini	2. Rekreasi dan	Arung Keke
4.5		Olahraga	D D "
15	Sungai Ta'lambua	Panorama Alam Parrandian Alam	Desa Paitana Kec.
		2. Permandian Alam	Turatea
16	Birtaria Kassi	Panorama Alam	Tonro Kassi Kec.
		2. Rekreasi dan	Tamalatea
		Olahraga	

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
17	Bukit Toenga	Panorama Alam	Kel. Pallengu Kec. Bangkala
18	Pulau Libukang (Pulau Harapan)	 Panorama Alam Rekreasi dan Olahraga 	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
19	Je'ne A'ribaka	 Panorama Alam Air Terjun 	Desa Kapita Kec. Bangkala
20	Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya)	 Panorama Alam Air Terjun 	Desa Marayoka Kec. Bangkala
21	Pantai Katubiri	Panorama Alam Rekreasi dan Olahraga	Desa Bisoli Kec. Bangkala Barat
22	Batu Sipinga	Panorama Alam	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
23	Pantai Garassikang	 Panorama Alam Rekreasi dan Olahraga 	Kec. Bangkala
24	Bukit dan Danau Bulu Jaya	 Panorama Alam Danau 	Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

3.3.2. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Selain potensi keindahan alam, tinggalan benda sejarah masa lampau yang dimiliki oleh kabupaten Jeneponto memiliki keunikan tersendiri serta memiliki keterkaitan sejarah dengan berbagai masyarakat di berbagai wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Nusantara di masa lampau. Hal ini menunjukkan posisi dan peran strategis kabupaten Jeneponto dalam kehidupan dan peradaban masa lalu termasuk lintas sejarah yang menempatkan kabupaten Jeneponto menjadi salah satu bagian dari sejarah tersebut.

Kabupaten Jeneponto juga memiliki berbagai jenis atraksi budaya sebagai tinggalan kebudayaan berbagai masyarakat yang mendiami dan bermukim serta melakukan hubungan sosial ekonomi di masa lalu. Adapun jenis daya tarik wisata sejarah budaya kabupaten Jeneponto terdiri dari benda tinggalan sejarah, tarian, ritual, permainan rakyat, benda pusaka, dan benda cagar budaya lainnya. Jenis daya tarik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Potensi Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

		Tahun 2018				
No	Nama Destinasi		Daya Tarik	Lokasi		
1	Rumah adat Kambara' Tolo'	1. 2.	Rumah Adat Benda Sejarah	Tolo' Kec. Kelara		
No	Nama Destinasi		Daya Tarik	Lokasi		
2	Mesjid Tua Tolo'		Rumah Ibadah Benda Sejarah	Mataere Tolo' Kec. Kelara		
3	Makam Tuang Nong (Tung Nung)		Makam Tinggalan Arkeologi	Mataere Tolo' Kec. Kelara		
4	Rumah Adat Kampala		Rumah Adat Benda Sejarah	Desa Kampala Kec. Arungkeke		
5	Rumah Adat Bulo – Bulo		Rumah Adat Benda Sejarah	Desa Bulo- Bulo Kec. Arungkeke		
6	Rumah Adat Arungkeke		Rumah Adat Benda Sejarah	Desa Arungkeke Kec. Arungkeke		
7	Rumah Adat Bonto Tangnga	1. 2.	Rumah Adat Benda Sejarah	Tamalatea Kec. Tamalatea		
8	Makam Joko	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba		
9	Makam Raja-Raja Binamu	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Joko Kec. Bonto Ramba		
10	Rumah Adat Kerajaan Binamu		Rumah Adat Benda Sejarah	Kel. Pabiringa Kec. Binamu		
11	Rumah Adat Kerajaan Binamu Raja Patappoi Kr Loloa	1. 2.	Rumah Adat Benda Sejarah	Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu		
12	Rumah adat Sapanang	1. 2.	Rumah Adat Benda Sejarah	Kel. Sapanang Kec. Binamu		
13	Makam Kr. Balang dan Gallarang Tannginunga Je'ne		Makam Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu		
14	Makam Kr. Karampang Butung	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Balang Toa Kec. Binamu		
15	Makam Kr. Bebang	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Sapanang Kec. Binamu		
16	Makam Patima Dg Ti'no	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Pabiringa Kec. Binamu		
17	Makam Kr. Toayya (Kr. Ngilanga)	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Kel. Benteng Kec. Bangkala		
18	Makam Kr. Lompo Bongga	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala		
19	Makam Kr. Lompo Lappe	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala		
20	Makam Kr. Tanatoa	1. 2.	Makam Tinggalan Arkeologi	Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec.		

			Bangkala
21	Makam Parang Loe	1. Makam	Desa Kalimporo
		2. Tinggalan Arkeologi	(Borong Camba) Kec.
		33	Bangkala
22	Makam Manukulang	1. Makam	Desa Pallantikan
	Dg. Pasore'	2. Tinggalan Arkeologi	Kec. Bangkala
No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
23	Rumah Adat Alm.	1. Rumah Adat	Kel. Pantai Bahari
	Pabisei Kr. Tunru	2. Benda Sejarah	Kec. Bangkala
24	Rumah Adat Kr.	1. Rumah Adat	Desa Tanatoa Kec.
0.5	Tanatoa	2. Benda Sejarah	Bangkala
25	Makam Kr. Banri	1. Makam	Desa Banrimanurung
26	Manurung Makam Pabisei Kr.	Z. Tinggalan Arkeologi Nakam	Kec. Bangkala Barat
20	Tunru	2. Tinggalan Arkeologi	Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat
27	Kawasan Pacuan	Pacuan Kuda	Desa Kalimporo Kec.
21	Kuda	2. Atraksi Budaya	Bangkala
28	Accera Gaukang	Pesta Rakyat	Desa Bisoli Kec.
20	Bangkala	2. Tinggalan Sejarah	Bangkala Barat
29	Pesta Panen	Pesta Panen	Desa Beroanging
		2. Atraksi Budaya	Kec. Bangkala Barat
30	Maulid Sidenre	Ritual Budaya	Sidenre' Kec. Binamu
	Khusus Kelompok	,	
	Sayye		
31	Je'ne-je'ne Sappara	Pesta Rakyat	Desa Tarowang Kec.
		2. Ritual Budaya	Tarowang
32	Je'ne-je'ne sappara	1. Pesta Rakyat	Karampang Pa'ja
	Karampang Pa'ja	2. Ritual Budaya	Kec. Tamalatea
33	Je'ne-je'ne sappara	Pesta Rakyat	Karampang Pa'ja
	Borong Tala	2. Ritual Budaya	Kec. Tamalatea
34	Lapangan Pacuan	1. Pacuan Kuda	Kel. Empoang
	Kuda Andi Lomba	2. Atraksi Budaya	Selatan Kec. Binamu
25	Lamae Kr. Lomba	1 Common Domeson dion	Daga Dantaranna
35	Permandian Bungung	1. Sumur Permandian	Desa Bontorappo
36	Salapang Rumah Adat	2. Ritual Budaya 1. Rumah Adat	Kec. Tarowang Desa Kalimporo
30	Kuman Adat Kalimporo	2. Benda Sejarah	Kecamatan Bangkala
37	Artefak Serpih Bilah	Tinggalan Sejarah	Kelurahan Palengu,
"	/ atolak ocipili bilali		Kecamatan Bangkala
38	Situs Serpih Bilah	1. Tinggalan Sejarah	Desa
	Karama		Banrimanurung, Kec.
			Bangkala Barat
39	Kompleks Makam	1. Makam Sejarah	Desa Kalimporo,
	Kalimporo		Kecamatan Bangkala
40	Makam Pasiri Dg	1. Makam Sejarah	Desa Tuju
	Mangasa Karaeng		Kecamatan Bangkala
	Labbua Talibannanna		Barat

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

3.3.3. Potensi Wisata Buatan Manusia (*Manmade*) dan Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya, kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi daya tarik wisata buatan manusia yang cukup menarik minat wisatawan pada saat melakukan kunjungan di kabupaten Jeneponto. Potensi wisata buatan merupakan segala bentuk daya tarik yang dibuat atau dibangun oleh manusia secara terencana sebagai sarana bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata.

Selain potensi wisata buatan manusia (*man-made*), potensi wisata minat khusus juga merupakan sarana atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada saat melaksanakan kunjungan ke kabupaten Jeneponto. Potensi wisata minat khusus yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktivitas wisata selain aktivitas wisata yang secara operasional melekat dalam aktivitas wisata alam. Potensi daya tarik wisata wisata tersebut berupa taman, rekreasi keluarga, dan kuliner. Adapun Daya Tarik wisata buatan manusia dan minat khusus kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Potensi Wisata Buatan Manusia dan Minat Khusus
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
1	Dermaga pantai Garassikang	 Rekreasi Keluarga Panorama Pantai 	Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat
2	Tambak Garam (Paccelanga)	 Kreativitas Masyarakat Industri Garam Rakyat 	Kel. Bontorannu Kec. Bangkala
3	Tambak Garam	 Kreativitas Masyarakat Industri Garam Rakyat 	Pallantikang Kec. Arungkeke
4	Water Park Boyong	Rekreasi Keluarga Kolam Renang	Tonro Kassi Timur (Boyong) Kec. Tamalatea
5	Taman Turatea	Rekreasi Keluarga	Kel. Empoang Kec. Binamu
6	Taman Siswa	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
7	Taman PKK	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
8	Taman Dharma Wanita Persatuan	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
9	Taman Lalu Lintas	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu

10	Taman Pacuan Kuda	Rekreasi Keluarga	Kec. Binamu
11	Pantai Tamarunang	Rekreasi Keluarga Panorama Pantai	Kec. Binamu
12	Hutan Kota	Rekreasi Keluarga	Kel. Balang Kec. Binamu
No	Nama Destinasi	Daya Tarik	Lokasi
13	Coto/ Konro Kuda	Kuliner Tradisional	
14	Ballo' Tanning/ Tuak Manis	Minuman Tradisional	Kec. Tamalatea
15	Lammang	Kuliner Tradisional	Ruku-Ruku Kel. Palangu' Kec.

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto, 2018

3.4. Perekonomian Kabupaten Jeneponto

3.4.1. Struktur Ekonomi

Berdasarkan penghitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Jeneponto tahun 2017 adalah sebesar 8,26 persen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 5.967.176,40 juta rupiah. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB kabupaten Jeneponto. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Struktur Perekonomian Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan konstributor terbesar masih diberikan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,42 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah ini masih bertumpu pada sektor agraris.

Pada Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya yang mencapai 51,69%. Sementara untuk sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum hanya mampu menyumbang dan memberikan kontribusi sebesar 0,29% walapun menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,01% per tahun. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata agar dapat berkontribusi lebih besar dalam struktur perekonomian kabupaten Jeneponto.

Adapun gambaran mengenai struktur ekonomi Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5Struktur Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2017
(dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	52,40	51,80	51,69	41,42
2.	Pertambangan Dan Penggalian	2,34	2,60	2,64	2,72
3.	Industri Pengolahan	3,38	3,41	3,34	3,42
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,15	0,11	0,11	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07
6.	Konstruksi	8,99	9,18	9,18	10,75
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	11,08	11,38	11,67	12,30
8.	Transportasi Dan Pergudangan	1,02	1,08	1,01	1,01
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,26	0,27	0,28	0,29
10.	Informasi Dan Komunikasi	3,87	3,59	3,61	3,69
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,34	2,27	2,33	2,22
12.	Real Estate	2,35	2,44	2,40	2,35
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	6,90	6,90	6,83	6,73
15.	Jasa Pendidikan	2,14	2,10	2,04	2,06
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	2,17	2,25	2,24	2,27
17.	Jasa Lainnya	0,52	0,52	0,53	0,54

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

Bila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2017 kabupaten Jeneponto mengalami pertumbuhan berada di posisi ke tiga setelah kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,26% dari 24 buah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator perekonomian utama yang digunakan dalam analisis stuktur dan pertumbuhan perekonomian wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau disingkat PDRB. PDRB merupakan suatu ukuran kuantitatif dari hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pada suatu saat tertentu untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian pada masa-masa lalu dan masa sekarang serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian. Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Jasa Perusahaan; Asuransi; Real Estat; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehinga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciriciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/ Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin- mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Berdasarkan PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha mencapai 8.645.022,9 milyar rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang tertinggi dengan sumbangan sebesar 49,42%. Data mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jeneponto menurut lapangan usaha pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2014-2017 (Dalam Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	9,28	4,43	7,85	5,20
2.	Pertambangan Dan Penggalian	14,08	15,98	12,84	12,08
3.	Industri Pengolahan	9,68	6,67	7,05	8,70
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	17,31	-0,37	5,03	5,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	4,55	0,56	4,77	5,47
6.	Konstruksi	5,31	8,79	7,08	23,26
7.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	8.90	10.09	11,17	11,09
8.	Transportasi Dan Pergudangan	10,41	8,16	5,67	9,12
9.	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	10,39	13,74	13,69	12,47
10.	Informasi Dan Komunikasi	4,01	10,68	10,16	9,30
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	10,06	4,83	12,06	0,85
12.	Real Estate	3,60	7,39	6,26	3,28
13.	Jasa Perusahaan	0,07	5,87	5,71	8,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	4,59	7,85	5,07
15.	Jasa Pendidikan	2,91	7,25	6,40	7,80
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	8,98	9,31	7,21	8,18
17.	Jasa Lainnya	6,54	8,99	9,16	9,27

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto, Tahun 2018

BAB - **4**

KABUPATEN JENEPONTO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata Kab. Jeneponto

Kabupaten Jeneponto memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, khususnya dari sisi produk wisata. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Kabupaten Jeneponto menawarkan berbagai daya tarik wisata. Produk wisata Kabupaten Jeneponto memiliki keragaman, baik alam yang terdiri pantai, laut, hutan bakau serta biota lautnya, dataran rendah dengan pola kehidupan masyarakat pesisirnya, dataran tinggi dengan pemandangan alam dan kehidupan masyarakatnya serta berbagai spesies flora dan fauna pada pegunungan. Adapun jenis potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

4.1.1. Daya Tarik Wisata Alam

1) Goa Gantarang Buleng

Salah satu potensi wisata yang mulai dikenal belakangan ini di kabupaten Jeneponto adalah potensi Wisata Bukit Gantarang Buleng. Lokasi wisata ini merupakan wisata alam yang menarik karena didalamnya menyimpan potensi alam antara lain adanya bentukan batu alam sarang lebah, gua jodoh dan pohon unik tapak kaki turunan raja Binamu, mitos, serta air terjun alami.

Bukit Gantarang Buleng dapat diakses dengan menggunakan mobil dan motor dengan jarak sekitar 12 km dari kota kecamatan Kelara, namun terdapat akses yang lebih dekat dan aman dari kecamatan Tarowang hanya menempuh jalan sekitar 3 km.

Selain potensi wisata alam, juga kemungkinan besar lokasi wisata alam ini dapat menjadi obyek penelitian sejarah dan arkeologi karena di lokasi ini, banyak ditemukan, fosil dan peninggalan masa lalu misalnya tapak kaki dihamparan batu endapan. Menurut sejarahnya, tapak itu merupakan bekas tapak kaki Karaeng Gantarang Buleng, yang merupakan garis keturunan Raja Binamu

Gambar 4-1 Bukit Gantarang Buleng



Sumber: http://jenepontowisata.blogspot.com/2015/09/, 2018

2) Pantai Ujung Timur.

Pantai Ujung Timur kabupaten Jeneponto merupakan kawasan pantai yang terletak di desa Bonto Ujung kecamatan Tarowang, sekitar 5 km dari batas kabupaten Jeneponto dan Bantaeng memiliki panorama alam yang sangat menarik dengan rimbunan pohon kelapa.

Aktivitas yang banyak dilakukan di pantai ini adalah beristirahat sejenak melepas penat dalam perjalanan bagian selatan jazirah Sulawesi yang melewati kabupaten Jeneponto.

Gambar 4-2 Pantai Ujung Timur



Sumber: http://hariyantowijoyo.blogspot.com/2012/03/pantai-ujung-timur-kabupaten-jeneponto.html#axzz5aCmQgV8M, 2018

3) Hutan Bakau Balangbaru

Potensi hutan bakau yang indah menjadi salah satu daya tarik wisata di Desa Balangbaru, Kecamatan Tarowang. Destinasi Hutan Mangrove atau lebih dikenal sebagai Hutan Bakau ini memiliki beragama potensi alam untuk dijadikan sebagai tempat wisata liburan dengan keluarga dan sambil berfoto-foto.

Hutan Mangrove di kecamatan Tarowang menyajikan pemandangan yang sangat sejuk untuk dinikmati bagi para pengunjung. Selain pepohonan yang indah dipandang hamparan ombak laut pun dapat dirasakan ketika berada di objek wisata tersebut.

Jarak ke lokasi daya tarik wisata Hutan Mangrove Tarowang hanya berkisar 50 meter dari jalan poros Jeneponto-Bantaeng, dan jika diakses dari kota Bontosunggu, ibu Kota Kabupaten Jeneponto, dapat menempuh perjalanan darat sejauh 25 kilometer dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat.

Gambar 4-3 Hutan Bakau Balang Beru Tarowang



Sumber: http://rakyatsulsel.com/referensi-wisata-hutan-mangruf-dijeneponto-sajikan-beragam-destinasi.html

4) Lembah Hijau Rumbia

Lembah Hijau Rumbia terletak di Dusun Boro, sekitar 27 kilometer dari Bontosunggu, ibukota Jeneponto. Kawasan ini memiliki nuansa sejuk karena lokasinya berada di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Namanya makin populer setelah pada tahun 2016 lalu, Satu Indonesia Award memberikan penghargaan sebagai pemenang kategori wisata berbasis lingkungan.

Keunikan dari objek wisata ini adalah bangunannya yang menggunakan bambu sebagai bahan utama. Itulah mengapa Lembah Hijau Rumbia juga dikenal sebagai Kampung Bamboo oleh warga sekitar. Pohon yang menjulang tinggi serta tumbuhannya membuat pemandangannya terlihat lebih asri dan hijau. Eksotisme alamnya membuat wisatawan betah untuk tinggal lebih lama.

Hal yang menyenangkan dari Lembah Hijau Rumbia tak hanya pemandangannya. Pengelola juga sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas agar pengunjung semakin betah. Tersedia aneka permainan seperti kolam renang, *flying fox*, dan *outbound* bagi orang dewasa maupun anak-anak. Selain itu juga terdapat fasilitas vila, kafe, kios *souvenir*, dan kebun *strawberry*.

Gambar 4-4 Lembah Hijau Rumbia



Sumber: https://travelingyuk.com/lembah-hijau-rumbia/71066/, 2018

Air Terjun Tama'lulua Bossolo

5)

Aktivitas seru dalam melakukan kunjungan di kabupaten Jeneponto akan semakin lengkap dengan mengunjungi Air Terjun Tama'lulua. Pihak pengelola menyediakan paket *tracking* Air Terjun Tama'lulua Bossolo dan Lembah Hijau Rumbia, karena jarak kedua destinasi wisata ini tak berjauhan sehingga wisatawan akan disuguhkan eksotisme air terjun dan kawasan sejuk pegunungan.

Air terjun Bossolo' Kabupaten Jeneponto, dikatakan air terjun surga tersembunyi karena Jeneponto dikenal dengan daerah yang kering dan tandus sehingga sangat jarang ditemukan tempat asri, sejuk dan indah. Namun, anggapan tersebut patah setelah melihat air terjun Bossolo'. tempat itu terletak di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Air terjun ini mulai terkenal dan digemari kalangan muda yang hobi travelling atau berfoto dengan alam.

Perjalanan untuk sampai ke desa Rumbia memakan waktu sekitar 3,5 jam dari kota Makassar. Akses dari Makassar menuju Jeneponto dapat dilakukan dan pada saat tiba di kota Jeneponto, terdapat patung kuda besar lalu belok kiri masuk ke jalan Kelara, dari jalan Kelara memerlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai ke desa Rumbia. Dari jalan poros desa Rumbia hanya memerlukan waktu 5 menit menuju tempat parkir kendaraan.

Terdapat baliho yang cukup besar menampilkan gambar air terjun tertuliskan "Air Terjun Tama'lulua", dengan nama lain dari air terjun Bossolo'. Untuk menemukan air terjun ini juga tidaklah mudah karena letaknya cukup jauh, dimana pengunjung harus mendaki, melalui jalan yang cukup terjal dan berbatu.

Perjalanan yang jauh melewati bukit Bossolo akan terbayarkan dengan suguhan pemandangan indah air terjun Tama'lulua yang masih indah dan mempesona. Tidak jauh

dari air terjun terdapat gua Bossolo yang juga rekomendasi sebagai tempat wisata dan di sana terdapat banyak satwa unik salah satunya monyet jika musim panen jagung, mereka akan bermunculan menuruni bukit.

Bukit Bossolo merupakan kawasan perbukitan yang mengelilingi Air Terjun Tama'lulua. Tempat ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang kerap dikunjungi oleh masyarakat Jeneponto karena selain dapat memandangi cantiknya air terjun dari kejauhan, setiap pengunjung dapat juga menyaksikan eksotisnya pesona *sunset* di Bukit Bossolo ini.

Gambar 4-5 Air Terjun Tama'lulua Bossolo

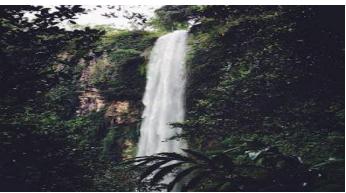


Sumber: https://travelingyuk.com/lembah-hijau-rumbia/71066/, 2018

6) Air Terjun Boro

Air terjun Boro terletak di Kecamatan Kelara sebelah utara Jeneponto sekitar 20 km dari Kota Bontosunggu dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari kota Jeneponto dengan menggunakan kendaraan bermotor. Air terjun Boro memiliki daya tarik tersendiri yaitu ketinggiannya yang hanya 30 meter yang membuat aliran airnya sangat deras sehingga banyak pengunjung maupun masyarakat sekitar yang mandi langsung di bawah air terjun tersebut yang rasanya seperti dipijat serta banyak pohon rindang mengeliling air terjun tersebut. Sehingga pengunjung akan berpikir bahwa, Jeneponto tidak gersang tetapi Jeneponto adalah daerah Hijau, dan Jeneponto memiliki pepohonan yang rimbun dan sejuk.

Gambar 4-6 Air Terjun Boro



Sumber: kabarwisataturatea.blogspot.com/2017/07/begini-keindahan-air-terjun-boro-di.html, 2018

7) Pesanggarahan Loka

Pesanggrahan Loka berada disektar 5 km dari Lokasi air terjun Boro, suatu lokasi yang memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah membuatnya menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dijadikan tempat rekreasi bersama keluarga di akhir pekan ataupun di hari libur lainnya. Pesanggarahan ini merupakan bangunan tinggalan sejarah masa pendudukan Belanda di Kecamatan Rumbia dan mempunyai lokasi yang sangat strategis dan dapat diakses dengan baik dari berbagai arah dari kota Makassar. Kecamatan ini dapat ditempuh melalui jalur darat dari Kota Makassar sekitar 3 jam dengan jarak tempuh 114 km. Untuk mengunjungi kecamatan ini, pengunjung dapat mengaksesnya dari Makassar baik dari arah Kabupaten Jeneponto sendiri melalui Kecamatan Kelara, Kabupaten Gowa melalui Kecamatan Tompobulu (Malakaji), maupun dari Kabupaten Bantaeng melalui Kecamatan Uluere (Loka'). Oleh karena itu, kecamatan rumbia ini dapat diberi julukan sebagai kecamatan segitiga emas, yang dikarenakan lokasinya yang sangat strategis.

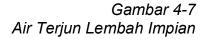
Aktivitas wisata yang dapat dilakukan dan dinikmati di daya tarik ini adalah panorama alam serta tinggalan sejarah bangunan Belanda. Selain itu di sekitar Pasanggrahan Loka' juga terintegrasi dengan beberapa daya tarik wisata lainnya di kecamatan Rumbia.

8) Air Terjun Lembah Impian

Air terjun lembah impian, sesuai dengan namanya tempat ini berada pada sebuh lembah di dusun Kampung Beru Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia. Berjarak 10 kilometer dari utara pusat Kabupaten Jeneponto atau sekitar 200 meter dari jalan poros Kelara-Rumbia.

Setelah sampai di gerbang menuju Air Terjun Lembah Impian pengunjung harus berjalan kaki yang ditempuh sekitar 20-30 menit dengan medan yang harus dilalui yang terjal dan licin. Sebuah air terjun dengan ketinggian sekitar 100 meter memberikan sensasi tersendiri dengan pepohonan yang rimbun nan sejuk menambah keindahan air terjun Lembah Impian.

Keunikan lain dari air terjun Lembah Impian adalah adanya batu bergambar serta monyet putih yang berada di pohon. Di sekitar air terjun Lembah Impian juga terdapat goa bersejarah yang terdapat sumur didalamnya.





Sumber: https://www.liputanutama.com/kreen-bingits/2018/01/25/11-destinasi-tersohor-jeneponto-sudah-pernah-ke-sini-belum/, 2018

9) Wisata Lembah Bontolojong

Wisata Lembah Bontolojong terletak di desa Ujung Bulu kecamatan Rumbia. Lokasi daya tarik wisata ini sangat eksotis dengan panorama alam pegunungan karena tepat berada di lereng Gunung Lompobattan dang berdekatan dengan wilayah kabupaten Bantaeng.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di tempat ini adalah wisata petualangan pegunungan serta wisata edukasi alam dengan kekayaan flora dan fauna di sekitar Gunung Lompobattang. Selain itu, Desa Ujung Bulu juga dikenal sebagai penghasil kopi madu khas Bontolojong sehingga pengunjung juga dapat menikmati aktivitas wisata agro di perkebunan kopi masyarakat.

Gambar 4-8 Wisata Lembah Bontolojong



Sumber: https://fhadilftg.blogspot.com/2015/06/break-and-go-29-mei-2015-akhir-bulan-12.html, 2018

10) Air terjun Tung Loe

Air terjun Tuang Loe terletak di di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba dengan jarak sekitar 20 km dari pusat kota kabupaten Jeneponto. Akses jalan menuju lokasi dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Daya tarik pada air terjun Tuang Loe adalah panorama alam dengan air terjun yang jernih membuat pengunjung dapat menikmati suasana alam dengan air yang sejuk dan bebatuan serta pepohonan yang cukup rindang di sekitarnya.

Posisi air terjun yang tidak terlalu tinggi membuat pengunjung merasa lebih aman dari derasnya air yang mengalir serta luas genangan air serta struktur bebatuan yang eksotik dan memungkinkan pengunjung beserta keluarga dapat menikmati potensi keindahan alam dengan aman dan nyaman.

Gambar 4-9 Air Terjun Tuang Loe



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/, 2018

Air Terjun Kara'ngasa

11)

12)

Air Terjun Kara'ngasa terletak di Jl. Kara'ngasa Desa Lebang Manai kecamatan Rumbia (perbatasan kabupaten Jeneponto dan kabupaten Bantaeng). akses menuju lokasi air terjun ini dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan medan jalan yang kurang mulus. Untuk menuju air terjun ini dapat ditempuh sekitar 10 menit dengan berjalan kaki dan melewati medan yang cukup terjal dan licin, dilokasi ini terdapat 2 air terjun yang sangat indah dengan panorama air terjun yang berbeda. Air terjun menyajikan panorama alam pegunungan dengan eksotisme suasana sekitar data tarik wisata dengan aneka flora dan fauna serta kehidupan masyarakat.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di tempat ini adalah wisata petualangan dan edukasi berbasis ekologi dengan mengintegrasikan dengan berbagai potensi daya tarik lainnya yang secara geografis berada di wilayah adminitratif kecamatan Rumbia.

Gambar 4-10 Air Terjun Kara'ngasa



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/, 2018

Pantai Karaeng Sutte (Karsut)

Pantai Karaeng Sutte (Karsut) merupakan daya tarik wisata pantai yang hanya berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota Jeneponto. Pantai ini terletak di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke.

Daya tarik berupa hamparan pasir putih dengan deretan pepohonan kelapa yang teduh dan ombak yang tenang merupakan hal yang dapat dinikmati pengunjung.

Beragam fasilitas olah raga dan rekreasi pantai dibangun di Pantai Karsut seperti lapangan futsal, voli pantai dan lapangan tennis pantai. Selain itu tak jauh dari lokasi ini terdapat berbagai penginapan dan restoran.

Gambar 4-11 Pantai Karaeng Sutte (Karsut)



Sumber: http://pkstallo.blogspot.com/2011/07/keindahan-pantai-karsut-di-jeneponto.html, 2018

13) Sungai Ta'lambua

Sungai Ta'lambua merupakan salah satu daya tarik wisata sungai yang terletak di dusun Bontolebang, desa Paitana, Kecamatan Turatea yang memiliki nilai eksotis tersendiri.

Aliran sungai yang deras dengan bentang alam yang yang berlekuk diantara beberapa bebatuan karst yang berukuran besar akan menguji adrenalin pengunjung khususnya wisatawan minat khusus petualangan sungai.

Suara aliran sungai juga memberikan sensasi ketenangan yang akan membuat pengalaman wisata berkwalitas. Selain itu, suasana alam di desa Paitana yang sangat sarat dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan akan menambah pengalaman perjalanan wisata pengunjung.

Gambar 4-12 Sungai Ta'lambua



Sumber: https://www.liputanutama.com/kreen-bingits/2018/ 01/25/11-destinasi-tersohor-jeneponto-sudahpernah-ke-sini-belum/, 2018

14) Birta Ria Kassi

Birta Ria merupakan salah satu daya tarik wisata yang dikenal dengan sebutan kassi merupakan salah ikon kabupaten Jeneponto di masa lalu dan merupakan magnet kabupaten Jeneponto untuk menyedot minat kunjungan wisawatan. Pesona alam dan pantai yang sangat eksotis, sejuk, serta akses jalan yang sangat dekat dari jalan poros utama kabupaten Jeneponto yaitu hanya 200 meter dari jalan provinsi.

Kawasan Birta Ria Kassi terletak di desa Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, dengan luas kawasan mencapai empat hektar. Jarak dari kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan menuju Birta Ria Kassi kurang lebih 60 kilometer.

Kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang ini, nampaknya dirancang untuk dinikmati oleh semua kalangan. Kawasan Birtaria Kassi dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti kolam renang untuk orang dewasa, kolam ukuran kecil untuk anak-anak, disamping itu terdapat pula arena permainan bagi keluarga, villa sebagai tempat istirahat, masjid, sanggar seni budaya, wartel, perahu bebek-bebek, kios souvenir dan sarana olahraga seperti jogging track dan lapangan tenis.

Gambar 4-13 Birta Ria Kassi



Sumber: https://archive.kaskus.co.id/thread/14984528/1, 2018

15) Bukit Toenga

Bukit Toenga merupakan wisata alam puncak dengan tema wisata kekinian berbasis panorama alam pertama di kabupaten Jeneponto. Bagi pengunjung yang ingin menaikmati keindahan kota Jeneponto, cukup datang saja ke tempat ini.

Terdapat tiga buah *view* yang ditawarkan dan dapat dinikmati di Bukit Toenga, yaitu kombinasi panorama pegunungan, laut dan lembah.

Bukit Toenga terletak di kampung Tanetea Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala. Bukit Toenga berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kota Jeneponto atau 90 kilometer dari kota Makassar dan terletak di ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut.

Akses menuju puncak dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua melalui akses jalan yang penuh dengan tanjakan dan jurang yang terjal. Namun, keteduhan dan keindahan pemandangan alamnya sudah mulai terlihat disepanjang perjalanan menuju puncak. Disekitar bukit puncak ditumbuhi pohon-pohon lontar. Dipuncak bukit juga terdapat taman yang banyak ditumbuhi oleh bunga-bunga yang indah, serta bongkahan batu besar setinggi rumah.

Gambar 4-14 Bukit Toenga



Sumber: jenepontowisata.blogspot.com/2015/09/, 2018

Untuk menikmati hamparan perbukitan, tersedia tempat khusus yang nyaman bagi pengunjung. Pengunjung juga dapat menyaksikan keindahan gunung Bawakaraeng dan gunung lainnya dari puncak bukit Toenga, Ditambah angin yang bertiup sepoi-sepoi, saat pengunjung menantikan suguhan *sunset* atau pada malam hari jika ingin menikmati pesona kerlap-kerlip kota Jeneponto.

Pulau Libukang (Pulau Harapan)

Pantai Libukang merupakan kawasan pantai pada Pulau Libukang yang juga dikenal dengan nama Pulau Harapan. Pulau berpenghuni ini memiliki hamparan pasir putih dan pepohonan rindang. Penduduk Pulau Libukang dengan karakter masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut sehingga bermata pencaharian sebagai nelayan dan budidaya rumput laut.

16)

Pulau Libukang berada dalam Teluk Mallasoro, yang terletak di Dusun Palameang, Kelurahan Bontorannu, kecamatan Bangkala, dengan koordinat 2° 57'51"S, 120°12'2"E. Luas wilayah Pulau Libukang kurang lebih 5 km² dengan keliling sekitar 1,8 kilometer yang dapat ditempuh berjalan kaki mengelilingi pulau selama satu jam.

Akses ke Pulau Libukang dari kota Makassar ke kabupaten Jeneponto sekitar dua jam perjalanan dengan kendaraan roda empat kemudian dilanjutkan dengan menyeberang ke Pulau Libukang menggunakan perahu yang berjarak sekitar 500 meter dalam waktu tempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu rakyat.

Gambar 4-15 Pulau Libukang (Pulau Harapan)



Sumber: https://www.idntimes.com/travel/destination/rosmastifani/6-wisata-alami-di-jeneponto-ini-akanmembuatmu-terkagum-kagum-c1c2/full, 2018

Air Terjun Je'ne A'ribaka

17)

Air terjuang Je'ne A'ribaka terletak di desa Kapita kecamatan Bangkala dengan jarak tempuh sekitar 25 km dari kota Jeneponto.

Air terjung ini Je'ne A'ribaka memiliki keunikan tersendiri karena saat memasuki kawasan, pengunjung akan dijamu dengan keindahan pegunungan yang cukup memukau dan mempesona. Perjalanan menuju air terjun dengan menelusuri perkebunan jagung, jambu mente dan tambak ikan menjadi keasyikan dan tantangan tersendiri bagi pengunjung yang senang berpetualang ke alam bebas.

Daya tarik utama air terjun Je'ne A'ribaka adalah menikmati suasana alam pegunungan dengan kesejukan air telaga yang sangat bening dan segar, panorama alam dengan flora dan fauna serta aktivitas masyarakat pada pasar tradisional desa Kapita di hari pasar.

Gambar 4-16 Air Terjun Je'ne A'ribaka



Sumber: https://wisatasulawesi.wordpress.com/wisatasulawesi-selatan/wisata-di-bumi-turateajeneponto/, 2018

18) Batu Sipinga

Batu Sipinga merupakan salah satu daya tarik wisata kekinian berbasis alam pantai yang sedang hits dan banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya wisatawan minat khusus fotografi. Lokasi Batu Sipinga terletak di Karampuang, Desa Garassikang, Kecamatan Bangkala Barat.

Lokasi daya tarik wisata Batu Siping yang berdekatan dengan laut dan empang sehingga untuk mengakses lokasi tersebut, harus malewati lorong dan jalan setapak perkampungan warga, sejauh kurang lebih 2 kilometer.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Batu Siping adalah menikmati panorama alam, sebagai lokasi pemotretan prawedding maupun koleksi pribadi dengan latar bentuk bebatuan yang mirip dengan karang laut, serta menikmati keindahan *sunset*.

Gambar 4-17 Batu Sipinga



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/, 2018

Pantai Garassikang

19)

Pantai Garassikang merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang menarik dan potensil dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto. Pantai Garassikang terletak di kecamatan Bangkala.

Daya tarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Pantai Garassinkang adalah panorama pantai sebagaimana halnya karakter umum wisata pantai dengan tambahan pesona batu kapur berwarna putih (seperti *karst*), air laut dengan debor ombak yang relatif tenang.

Aktivitas wisata yang sangat menarik dilakukan dan menjadi daya tarik utama potensi wisata pantai adalah menikmati matahari terbit (*sunrise*), matahari terbenam (*sunset*), berenang di tepian pantai ataupun melakukan aktivitas olah raga dan rekreasi pantai lainnya.

Gambar 4-18 Pantai Garassikang



Sumber: https://www.idntimes.com/travel/destination/rosmastifani/6-wisata-alami-di-jeneponto-ini-akanmembuatmu-terkagum-kagum-c1c2/full, 2018

20) Bukit dan Danau Bulu Jaya

Bulu Jaya merupakan salah satu daya tarik wisata di kabupaten Jeneponto yang merupakan perpaduan antara panorama alam ketinggian pada daerah perbukitan dengan sensasi wisata danau.

Kombinasi bukit yang indah dan danau yang menawan menjadi daya Tarik tersendiri dari bukit yang dikenal juga dengan nama Bukit *Teletubies*. Bukit dan Danau Bulu Jaya ini terletak di jalan poros Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangakala Barat.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Bukit dan Danau Bulu jaya adalah sebagai salah satu lokasi swa-foto (*selfie*) favorit, menimati keindahan panorama alam, menikmati keindahan

danau, serta melihat panorama alam Jeneponto dari ketinggian.

Gambar 4-19 Bukit dan Danau Bulu Jaya



Sumber: http://bangmamadi.blogspot.com/2017/10/5-tempat-wisata-di-jeneponto-sulawesi.html, 2018

4.1.2. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya

Potensi wisata sejarah tidak hanya mencakup proses perkembangan peradaban suatu masyarakat, tetapi juga termasuk sejarah pembentukan alam. Sejarah budaya Kabupaten Jeneponto sebagai wilayah tempat bermukim dan berinteraksi berbagai masyarakat masa lampau hingga saat ini dengan latar belakang budaya berbeda merupakan potensi tidak kalah menariknya dengan sejarah alam, walaupun pembabakan sejarah budaya Jeneponto yang masih harus diteliti lebih jauh.

Kekayaan sejarah dan budaya masyarakat kabupaten Jeneponto beserta peninggalannya yang begitu beragam dan khas merupakan potensi yang besar bagi pariwisata Kabupaten Jeneponto. Pengemasan cerita sejarah melalui interpretasi yang baik dan menarik dapat meningkatkan nilai tambah daya tarik wisata sejarah Kabupaten Jeneponto dan tentu saja merupakan potensi untuk menjaring wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Masyarakat Kabupaten Jeneponto yang religius dan memiliki aturan serta berbagai ciri warisan budaya khas dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap dipertahankan merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Kampung-kampung tradisional, tempat hidup, tinggal dan berinteraksi masyarakat kabupaten Jeneponto, juga merupakan daya tarik wisata yang tidak kalah menariknya.

Kebudayaan kabupaten Jeneponto lainnya yang muncul di masyarakat adalah alat musik tradisional, pertunjukan kesenian khas seperti berbagai jenis tarian tradisional, upacara keagamaan serta prosesi adat, merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi bagi kepariwisataan Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto juga kaya akan event-event pariwisata yang diselenggarakan di beberapa kecamatan setiap tahun, baik yang termasuk dalam core event, major event maupun supporting event. Hari jadi kabupaten Jeneponto pada umumnya diselenggarakan setiap tahun yang dimeriahkan oleh pawai. Event-event lainnya yang juga dilaksanakan secara besar-besaran adalah peristiwa peringatan hari-hari besar keagamaan maupun upacara-upacara adat yang terkait dengan mata pencaharian penduduk, seperti pesta syukuran, pesta panen, dan sebagainya. Adapun potensi daya tarik wisata sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1) Prosesi Perkawinan

Prosesi perkawinan bagi masyarakat Jeneponto yang mayoritas merupakan suku Makassar, merupakan hal yang sakral dan penuh dengan atraksi budaya termasuk penggunakan pakaian adat/ tradisional. Upacara ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu prosesi lamaran, prosesi malam pacar, prosesi akad nikah, dan prosesi lainnya yang sangat menarik.

2) Tari tradisional

Tari tradisional merupakan kekayaan budaya Makassar yang sangat berakar di tengah masyarakat Jeneponto. Berbagai jenis tari tradisional hanya dilakukan pada upacara ritual atau prosesi tertentu namun ada pula yang dipertunjukkan pada suasana yang tidak terikat dengan prosesi adat.

3) Musik dan Lagu Tradisional

Sebagaimana halnya dengan tari tradisional maka musik tradisional yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat Jeneponto juga sangat beragam seperti alat musik tiup, gesek dan pukul pada kebudayaan masyarakat Makassar pada umumnya.

4) Permainan Rakyat

Sebagaimana halnya dengan kehidupan masyarakat tradisional Selawesi Selatan pada khususnya, permainan rakyat yang menghiasi berbagai kehidupan masyarakat Jeneponto sejak kecil masih tetap dipertahankan khususnya dari gerusan kehidupan modern yang banyak berpengaruh pada kehidupan masyarakat kekinian.

Permainan rakyat yang pernah ada dan masih tetap dimainkan oleh anak-anak hingga remaja oleh masyarakat Jeneponto juga sangat beragam walaupun saat ini hanya banyak ditampilkan pada saat event tertentu.

5) Rumah Adat Kambara Tolo'

Rumah Adat Kambara Tolo' terletak di dalam ibukota Kelurahan Tolo', secara administratif berada di jalan poros Malakaji – Bontosunggu kampung Mataere kelurahan Tolo' kecamatan Kelara.

Rumah Adat Tolo' menunjukkan bahwa wilayah ini sejak dahulu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Rumah adat dibangun pada masa pemerintahan *Raja Tolo' I Patiara Karaeng Manynyamu* pada tahun 1914. Setelah kepindahan pusat Kerajaan Tolo' yang awalnya berada di Bonto Lebang.

Bangunan ini menempati areal seluas 49 X 30 meter. Tiangtiang pendukung rumah adat bentuknya tidak beraturan didirikan di atas tanah dengan umpak batu kali. Jarak tiang juga bervariasi yaitu jarak tiang arah vertikal (utara – selatan) antara 1,62 m – 2,67 m dan jarak tiang arah horisontal (timur-barat) antara 2,82 m- 3,39 m. Dengan demikian ukuran bangunan pada bagian dasar adalah (18,80 X 31,0) m dan tinggi dari permukaan tanah sampai ke bubungan rumah adalah 9,54 meter.

Bangunannya terdiri dari kaki rumah (*siring*), badan rumah (*kale balla*) dan kepala rumah (*pattongko*). Atap bangunan berbentuk pelana dan bersusun dua (memakai tumpang) dengan bahan atap dari seng. *Timpa laja* bersusun tiga yang merupakan simbol rumah bangsawan tinggi dengan orientasi rumah menghadap ke timur. Seluruh komponen bangunan termasuk tiang, lantai, dinding dan rangka atap dibuat dari kayu nangka, kayu bitti, kayu ipi, kayu cenrana, kayu amar, batang lontar, batang kelapa dan bambu.

Bahan baku dari rumah adat sebahagian besar didatangkan dari pelosok-pelosok desa disekitar rumah adat serta dari kawasan hutan kerajaan yang letaknya kurang lebih 500 meter kearah timur dari rumah adat Tolo'.

Gambar 4-20 Rumah Adat Kambara Toloʻ



Sumber: https://situsbudaya.id/rumah-adat-tolo-sulawesi selatan/. 2018

6) Masjid Tua Tolo'

Masjid Tua Tolo' berada di kawasan Tolo' kecamatan Kelara, berjarak 50 meter dari lokasi Rumah Adat Tolo', mesjid ini berdenah dasar persegi empat dengan ukuran denah dasar 9,27 X 9,27 meter dengan ukuran denah mihrab 2,10 X 2,10 meter. Bentuk atapnya tumpang bersusun dua dan tiga. Pintu untuk masuk kedalam mesjid hanya satu yaitu terletak dibagian selatan.

Menurut informasi masyarakat setempat bahwa dahulu mesjid tersebut dibuat dari kayu beratap alang-alang dan nipah dan mempunyai pintu masuk dua buah yaitu pada bagian selatan dan bagian timur. Pada pintu bagian timur terdapat selasar yang menghubungkan masjid dan kolam air tempat berwudhu. Kondisi mesjid telah mengalami prubahan terutama penambahan dinding batu bata diplester yang dipasang 12 cm dari tiang kayu, atap bangunannya sudah diganti menjadi atap seng, namun demikian keaslian bentuk dan bahan dari mesjid masih ada yaitu bentuk atap pada bagian ujungnya terdapat mustaka kayu yang menyerupai buah nenas dan tiang-tiang penyangga atap

Gambar 4-21 Masjid Tua Tolo'



Sumber

: https://situsbudaya.id/rumah-adat-tolo-sulawesi selatan/, 2018

7) Kompleks Makam Tuang Nong (Tung Nung)

Kompleks makam Tung Nung berjarak sekitar 1 km kearah timur dari rumah adat didalam kompleks makam terdapat sekitar 300 bangunan makam. Bentuk makam bervariasi namun yang paling dominan adalah makam bentuk papan batu bersusun dua atau tiga dan bagian atasnya diberi satu atau dua buah nisan.

Bentuk makam lainnya berupa makam *monolit* (antero) bersusun dua atau tiga dan bagian atasnya dilubangi untuk menancapkan nisan satu atau dua buah. Ragam hias yang

terdapat pada Kompleks makam berupa ragam hias geometris dan floraistis.

Menurut informasi msyarakat setempat bahwa kompleks makam tersebut merupakan lokasi pemakaman raja-raja Tolo' dan keluarganya namun identitas makam tidak ada yang diketahui.

Gambar 4-22 Kompleks Makam Tuang Nong (Tung Nung)



Sumber : https://situsbudaya.id/kompleks-makam-tung-nungsulawesi-selatan/, 2018

8) Kompleks Makam Raja-Raja Binamu

Kompleks makam raja-raja Binamu merupakan suatu komples pemakaman Bangsawan kerajaan Binamu di Kabupaten Jeneponto. Kompleks ini terletak di desa Bontoramba sekitar 3 km dari jalan poros provinsi Sulawesi Selatan di kecamatan Tamalatea.

Kompleks ini mulai dikelola dan mengalami perbaikan mulai tahun 1981 dan pada 11 agustus 1984 diresmikan dan dijadikan situs budaya yang dilindungi.

Di dalam kompleks ini terdapat 639 buah makam yang bervariasi bentuk dan besarnya. Makam-makam yang terdapat di dalm kompleks ini terbagi menjadi 3 jenis ukuran yaitu:

- a. Ukuran besar 336 x 180 x 285 cm sampai dengan 235 x 160 x115 cm
- b. Ukuran sedang 230 x 150 x 100 cm sampai dengan 150 x 90 x 50 cm
- c. Ukuran kecil 157 x 80 x 45 cm sampai dengan yang terkecil

Sebagian Besar makam dibentuk dari papan batu disusun dua sampai empat Undakan, Dua hal yang sangat Menonjol pada kompleks makam ini, yaitu hiasan, pada jirat dan Nisan. Seni arsitektur bangunan makam di kompleks makam raja-raja Binamu mempunyai ciri tersendiri. Ciri tersebut

dapat dilihat pada bentuk nisan bangunan makam dan pola ragam hiasnya, Antara lain sebagai berikut:

- a. Nisan Arca, nisan arca ini berbentuk patung batu manusia yang duduk di atas kursi. Ada tiga patung arca sebenarnya di kompleks makam ini tapi dua patung arca dicuri pada tahun 2002 sehingga tinggal satu patung arca yang masih tersisa.
- b. Nisan bentuk Sarkopallus, nisan bentuk ini ditemukan pada makam yang berbentuk segi empat. Badan nisan berbentuk bulat dan bagian atas menyerupai topi bajah. Nisan ini melambangkan kekuatan atau kesuburan.
- c. Nisan bentuk gadah (Lingga), nisan bentuk ini nisan yang paling banyak ditemukan di dalam kompleks makam rajaraja binamu. Bentuk gadah ini melambangkan kelakilakian. Bentuknya berupa segi empat pada bagian kaki, badan nisan berbentuk bulat dan bagian atas menyerupai kuncup bunga teratai
- d. Nisan bentuk pipih (Yoni), bentuk nisan pipih menurut genetiknya adalah makam wanita. Nisan ini berbentuk papan pada bagian kaki dan makin ke atas makin melebar dan bagian pangkalnya berupa kuncup bunga.

Seni bangunan makam yang ada di dalam kompleks ini diklasifikasikan dalam beberapa bentuk :

- a. Makam yang dibuat dengan cara memasang empat buah papan batu yang kemudian dibentuk empat persegi panjang sehingga terbentuk kotak batu. Pada dinding sebelah utara dan selatan bagian atasnya dibentuk menyerupai gunungan.
- b. Makam yang terbuat dari tiga buah batu utuh yang dilubangi. Ketiga batu tersebut disusun, batu yang besar diletakkan pada bagian kaki makam. Batu yang kedua bentuknya lebih kecil dari yang pertama dan batu yang ketiga juga lebih kecil dari batu yang kedua. Sisi utara dan selatan dibentuk menyerupai gunungan.

Bentuk makam yang sederhana adalah batu utuh yang dilubangi lalu diberi nisan sesuai dengan jenis kelaminnya. Bentuk makam semacam ini merupakan makam anak-anak yang ukurannya kecil.

Gambar 4-23 Kompleks Makam Raja-Raja Binamu



Sumber

https://youchenkymayeli.blogspot.com/2013/11/foto-kompleks-makam-raja-raja-binamu.html, 2018

9) Pacuan Kuda

Seperti halnya di kabupaten-kabupaten lain yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto sangat dikenal dengan keunikan yang di milikinya. Kabupaten jeneponto yang terkenal dengan julukan *Butta Turatea* jika di termahkan kedalam bahasa Indonesia yang artinya orang yang berasal dari wilayah bagian atas.

Jeneponto sejak dulu kala sudah dikenal dengan jumlah hewannya dominan Kuda. Dikabupaten Jeneponto, hampir setiap rumah penduduk terdapat kuda yang ditambatkan didalam kandangnya. Berlatar belakang dari itu sehingga pemerintah kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatanyang sering digelar diwilayah ini yakni pacuan kuda guna melestarikan simbol budaya yang sudah turun temurun.

Harga kuda di jenepoto tergolong mahal yakni berkisar hingga 9 jt/ ekor khusus Untuk kuda pacuan sedangkan harga kuda biasa harganya berkisar 3 jt/ekor. Dengan adanya Pacuan Kuda di Jeneponto, harga kuda menjadi melonjak karena kurangnya minat masyarakat dalam memelihara kuda pacuan.

Tapi dengan adanya arena pacuan kuda di Kabupaten Jeneponto yang letaknya di desa Kalimporo, Kec. Bangkala sehingga mampu menyemangati para peternak kuda di Jeneponto. Hal demikian tentunya dapat meningkatkan ekonomi para pedagang yang berjualan kuda di Jeneponto.

Gambar 4-24 Pacuan Kuda



Sumber: https://toturatea.blogspot.com/2014/07/pacuan-kuda-di-binamu-jeneponto.html, 2018

Kegiatan pacuan kuda di laksanakan 2 kali seminggu dengan hari yang telah di tetapkan, yakni pada hari Minggu dan hari Rabu, adapun jenis kuda yang diperlombakan yaitu jenis kuda lokal. Budaya Pacuan Kuda perlu di kembangkan dan dilestarikan, karena dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam beternak kuda, apalagi kabupaten Jeneponto sangat dikenal sebagai penghasil kuda terbesar di Sulawesi Selatan.

Terdapat dua lokasi pacuan kuda tradisional yang dikenal di kabupaten Jeneponto yaitu di desa Kalimporo kecamatan Bangkala dan di Lapangan Pacuan Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba kelurahan Empoang Selatan kecamatan Binamu

10) Pesta Panen

Pesta panen merupakan salah satu tradisi masyarakat yang telah ada dan secara turun-temurun dalam kehidupan kabupaten Jeneponto. Penyelenggaraan masvarakat kegiatan ritual sakral yang setiap tahunnya di gelar oleh Masyarakat Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat yang dilaksanakan di Saukang rumah Adat Beroanging menjadi awal lahirnya perkampungan (tanah vang beroanging dan kini telah menjadi sebuah desa) dan tetap eksis.

Pesta panen ini telah ada sejak dulu dan terus di lestarikan oleh generasi penerus Desa Beroanging hingga saat ini. Rangkaian acara sakral yang di lestarikan dan menjadi ikon di desa tersebut ini di mulai dari penyambutan Pimpinan Daerah (Bupati Jeneponto) dengan *Aru Tu Barania* (Sumpah Setia).

Rangkaian pesta panen berikutnya dilanjutkan dengan berbagai tarian, permainan rakyat dan budaya masyarakat seperti tari *Pa'duppa*, tari *Pakarena*, tari Panen, *Padekko*,

Pasalonreng, Pakacaping, Pagambusu', Paganrang, pencak silat, lompat lingkar api, Palanja, Pa'batte Jangang, dan di tutup dengan Pa'lumba jarang (pacuan kuda).

Gambar 4-25 Pesta Panen



Sumber: https://makassar.terkini.id/masyarakat-jenepontorayakan-pesta-panen-dengan-tradisi-budaya/, 2018

11) Maulid Sidenre

Tradisi memperingati Maulid hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW merupakan salah satu atraksi budaya yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk kabupaten Jeneponto dengan keragaman dan keunikan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan perayaan maulid setiap tahunnya oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto, khususnya warga Sidenre yang kental dengan ciri khas maulid ornamen perahu atau julung-julung.

Tradisi ini sudah melekat dan turun temurun diperingati oleh warga Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu. Terdapat tiga kategori maulid perahu ini seperti maulid pengantin baru, maulid orang meninggal, dan maulid biasa. Maulid pengantin baru dirayakan satu kali saja, sedangkan maulid orang meninggal dilaksanakan 3 tahun berturut-turut, dan maulid biasa dirayakan seterusnya tiap tahun.

Gambar 4-26 Maulid Sidenre



Sumber: https://inikata.com/2017/12/01/cara-unik-wargajeneponto-rayakan-maulid-nabi-muhammad-saw/, 2018

12) Je'ne-Je'ne Sappara

Je'ne-Je'ne Sappara merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat kecamatan Tarowang yang berlangsung secara turun temurun, yang berawal dari kisah Tabib Balangloe dari Sumbawa dan kemenangan prajurit Kerajaan Tarowang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu.

Sebagai sebuah kegiatan ritual budaya, pesta Je'ne-Je'ne Sappara memiliki aturan tersendiri, antara lain waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan prosesi kegiatan. Pesta Je'ne-Je'ne Sappara biasanya dilakukan pada pertengahan Bulan Safar (Malam purnama) setiap tahunnya di Pantai Balangloe Tarowang Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang, serta di wilayah Karampang Pa'ja dan Borong Tala kecamatan Tamalatea.

Waktu pelaksanaan setiap pertengahan Bulan Safar atau malam purnama itu adalah suatu keharusan, dan bila tidak dilaksanakan pada waktu tersebut maka masyarakat mempercayainya akan memperoleh keburukan. Kepercayaan tersebut diperkuat lagi oleh adanya warga yang kesurupan dan mengaku sebagai roh tabib yang berkuasa di pantai Balangloe tersebut, yang memerintahkan untuk melaksanakan puncak pesta Je'ne-Je'ne Sappara pada bulan purnama di Bulan Safar,dan yang mengaku tabib tersebut memberi ancaman akan mendatangkan keburukan bila perintahnya tidak dilaksanakan.

Begitupun tata cara pelaksanaan pesta Je'ne-Je'ne Sappara, selain merujuk kepada kebiasaan juga tunduk patuh pada perintah orang yang kesurupan yang mengaku sebagai roh tabib dari Sumbawa tersebut yang sangat dihormati dan dianggap sebagai dewa penolong masyarakat. Walau roh tersebut mengaku berwujud buaya namun masyarakat tidak mempersoalkan wujudnya, yang mereka

tahu bahwa yang mengisi tubuh orang yang kesurupan adalah sang penolongnya.

Adapun rangkaian ritual dari pesta adat ini yakni appasempa, a'lili', a'rurung kalompoang, dengka pada, pakarena, parabbana, pagambusu, pa pui'-pui'. Serta digelar Paolle, pa'batte jangang, akraga, a' je'ne'-je'ne, dan ammanyukang kanrangang.

Puncak pesta Je'ne-Je'ne Sappara dimulai dengan menjemput benda pusaka Kerajaan Tarowang yang tersimpan di rumah adat Tarowang oleh prajurit berkuda yang memakai pakaian prajurit Kerajaan Tarowang berwarna merah. Benda pusaka yang telah dibungkus kain merah tersebut dibawa ke lokasi Je'ne-Je'ne Sappara, dijemput dan diantar oleh beberapa orang yang berpakaian adat dan diringi musik tradisional "*Tunrung tallu*".

Pasukan berkuda tersebut lalu berjalan mengelilingi pagar benang di pantai Balangloe Tarowang. Di dalam pagar benar tersebut, telah berkumpul ibu-ibu berserta sesajennya berupa ketupat *tedong-tedong* (ketupat yang bentuknya menyerupai kerbau) telur atau ayam. Menurut kepercayaan warga, bahwa ibu-ibu yang menyiapkan sesajen tersebut adalah anak cucu dari tabib yang pernah tinggal di Balangloe Tarowang.

Pada saat benda pusaka kerajaan diarak oleh pasukan berkuda mengelilingi pagar benar dan diiringi bunyi tunrung tallu, maka pada saat itulah ibu-ibu menyerahkan makanan sesajennya kepada seorang pengumpul sesajen, lalu pengumpul tersebut memotong leher tedong-tedong, untuk dikumpulkan disebuah balai-balai kecil kemudian dipersembahkan kepada roh tabib yang diyakini oleh sebagian sedang hadir di lokasi Je'ne-Je'ne Sappara tersebut.

Setelah dilakukan acara persembahan sesajen, maka selanjutnya warga yang fanatik pada adat tersebut berebutan benang dan kayu yang telah dipakai sebagai pagar. Sebagian diantaranya mengambil berkah pada seorang tokoh adat yang duduk di atas balai-balai kecil, berupa bedak racikan, dan beras. Dan sebagian di antaranya turun ke laut untuk cuci kaki, yang mereka percayai untuk membuang kesialan atau keburukan.

Umumnya para pencinta pesta Je'ne-Je'ne Sappara mempercayai bahwa benang dan kayu yang diambil dari pesta Je'ne-Je'ne Sappara dapat membuat kita cepat kawin dan cepat kaya.

Selain kegiatan tradisi, dalam pesta Je'ne-Je'ne Sappara ditampilkan pula berbagai kegiatan budaya yang telah dilakukan secara turun temurun,antara lain:

a. Tradisi Assempa', Assempak adalah permainan adu kekuatan kaki yang dilakukan oleh pemuda dengan bertarung satu lawan satu sampai salah satu lawan jatuh. Menurut sejarah, permainan tradisional assempa' ini telah ada seiring dengan keberadaan Kerajaan Tarowang, bahkan telah telah tercatat oeh waktu bahwa assempa' ini telah menyelamatkan Kerajaan Tarowang dari rebutan kerajaan lain.

Karena permainan ini sangat bersejarah sehingga masyarakat tetap melestarikannya dan terasa pesta Je'ne-Je'ne Sappara tidak lengkap tanpa ada permainan assempa' pada malam hari. Dulu, assempa' berlangsung dengan aman, karena para pemain bermain secara sehat/ sportif, tetapi kini permainan ini kadang menimbulkan masalah, karena pemain tidak mau menerima kekalahan dan dianggap sebagai sesuatu yang mempermalukan diri atau kampungnya, sehingga kadang kekalahan ditebus di luar arena dengan pertikaian atau tawuran.

- b. Tradisi Sabung Ayam, Tradisi ini juga adalah tradisi lama, yaitu adu ayam jantan yang kadang dimafaatkan oleh penyabung atau menonton untuk bertaruh uang. Tradisi ini biasanya dilakukan pada puncak acara Je'ne-Je'ne Sappara.
- c. Tradisi Appaenteng Panngadakkan, tradisi ini biasanya dilakukan pada puncak acara Je'ne-Je'ne Sappara, yang menghadirkan benda pusaka Kerajaan Tarowang ke Sappara. Je'ne-Je'ne Appaenteng pesta Panngadakkan berarti penghormatan kepada bendabenda pusaka (menegakkan adat). Benda-benda pusaka tersebut diarak di pantai Balangloe Tarowang mengelilingi pagar benang, tempat berkumpulnya ibu-ibu akan mempersembahkan sesajen. Kegiatan mempersembahkan sesajen tidak dianggap sah atau penguasa pantai Balangloe Tarowang tidak akan menerima persembahan sesajen bilamana dikelilingi lebih dahulu oleh arakan benda pusaka Kerajaan Tarowang yang dibawa oleh pasukan berkuda sebanyak 7 kali dan diiringi oleh orang-orang yang berpakaian adat.
- d. Pertandingan Takraw, pertandingan takraw telah lama dilakukan dalam pesta Je'ne-Je'ne Sappara dan merupakan budaya baru. Dahulu kala, permainan tradisional yang dikenal masyarakat adalah "akraga", yaitu keakhlian memainkan takraw. Pada acara resmi kerajaan, seperti pelantikan raja, permainan akraga selalu ditampilkan dan biasanya dimainkan oleh lima orang yang berusaha memainkan takraw dengan penuh kerja sama agar takraw yang dimainkannya tidak jatuh ke tanah dalam waktu yang lama dan permainan yang sangat menghibur penonton.

Gambar 4-27 Je'ne-Jene Sappara



Sumber: https://suaracelebes.com/2018/10/45167/gubernur-na-hadiri-pesta-adat-jene-jene-sappara/, 2018

13) Permandian Bungung Salapang

Bungung Salapang atau sembilan Sumur merupakan salah satu daya tarik wisata budaya di kabupaten Jeneponto yang terletak di Desa Bontorappo Kec. Tarowang.

Air yang ada di dalam *Bungung Salapang* ini tidak pernah habis meskipun banyak orang yang memakainya, dan hal itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. *Bungung Salapang* oleh sebagian masyarakat Jeneponto juga dipercayai selain dapat menghilangkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh, bisa awet mudah juga bisa ketemu jodoh dengan cara orang tersebut harus datang dengan niat baik dan tulus, untuk memohon (nasar), sambil mengikat tali yang menyerupai akar-akaran di seputaran pohon atau area *Bungung Salapang*, sambil berucap dalam hati ' Aku akan kembali melepas tali ini setelah jodohku aku temukan ' lalu membasuh air ke muka.

Daya tarik wisata ini banyak dikunjungi masyarakat dari dalam dan luar Jeneponto. Dan saat ini kawasan *Bungung Salapang* menjadi potensi khasanah yang unik karena keragaman budaya yang ada di Masyarakatnya selalu berpulang pada kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Sebagian masyarakat mengkultuskan dan menjadikan tempat tersebut sakral.

Gambar 4-28 Bungung Salapang



Sumber: https://archive.kaskus.co.id/thread/14984528/1,2018

4.1.3. Daya Tarik Wisata Buatan (*man-made*) dan Wisata Minat Khusus

Selain potensi wisata alam, sejarah dan budaya yang dimiliki kabupaten Jeneponto, seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan peradaban yang mempengaruhi pertumbuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta wisatawan maka pemerintah dan masyarakat kabupaten Jeneponto juga membangun dan memiliki beberapa daya tarik tarik buatan dan wisata minat khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat. Adapun potensi daya tarik wisata buatan manusia (man-made) dan wisata minat khusus yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1) Tambak Garam (Paccelanga)

Kualitas garam yang dikelola secara tradisional dapat di temukan di Jeneponto. Pengolahan yang tradisional menjadikan garam di Jeneponto cukup diperhitungkan oleh pelaku bisnis dari luar provinsi Sulawesi Selatan.

Pada umumnya garam di Jeneponto diolah kembali untuk dijadikan garam konsumsi maupun untuk garam industri, namun bahan penggunaannya tidak mengandung unsur kimia yang merusak.

Lahan pembuatan garam di sini dibuat berpetak-petak secara bertingkat. Lokasi pembuatan garam di kabupaten Jeneponto kawasan kecamatan Bangkala dan kecamatan Arungkeke. Selain sebagai potensi ekonomi, tambak garam rakyat ini juga merupakan lokasi yang ideal untuk dinikmati oleh wisatawan minat khusus yang bukan hanya melihat dan belajar tentang proses pembuatan garam, tetapi juga menikmati panorama alam Jeneponto khususnya di senja hari menjelang *sunset*.

Gambar 4-29 Tambak Garam



Sumber: https://archive.kaskus.co.id/thread/14984528/1,2018

2) Water Park Boyong

Daya tarik wisata Water Park Boyong yang berlokasi di Kampung Boyong, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto sebagai salah satu wahana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat kota.

Untuk mengakses lokasi wahana *water park* Boyong, yang terletak tidak jauh dari jalan poros Jeneponto dengan jarak sekitar 75 Km dari kota Makassar atau 10 Km dari kota Jeneponto.

Suasana di dalam Water Park Boyong, pengunjung akan menikmati keindahan alam serta sejumlah fasilitas wahana yang sudah disiapkan termasuk kolam renang dan lapangan Futsal.

Gambar 4-30 Water Park Boyong



Sumber: http://kabarwisataturatea.blogspot.com/2017/03/nikmati-akhir-pekan-di-wahana-wisata.html,2018

3) Taman Kota

Sebagai bagian dari perkembangan pembangunan kota, pemerintah daerah kabupaten Jeneponto secara terencana dan berkelanjutan membangun infrastruktur dan fasilitas kota sehingga dapat memberikan layanan kenyamanan bagi masyarakat.

Salah satu program pengembangan yang dilakukan pemerintah kabupaten Jeneponto adalah pembangunan dan penyediaan taman kota yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk rekreasi keluarga serta kebutuhan fasilitas kota dalam pemenuhan pelayanan tertentu seperti kota ramah anak, ramah lingkungan, dan sebagainya.

Tman kota yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Jeneponto diarahkan pada taman tematik, antara lain :

- a. Taman Turatea
- b. Taman Siswa
- c. Taman PKK
- d. Taman Dharma Wanita Persatuan
- e. Taman Lalu Lintas
- f. Taman Pacuan Kuda

4) Pantai Tamarunang

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi laut dan pantai di provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Jeneponto juga berbenah mengembangkan potensi pantai tersebut sebagai salah satu pesona yang dapat menarik minat kunjungan berwisata. Salah satu pantai yang saat ini dikembangkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Jeneponto adalah Pantai Tamarunang.

Pantai Tamarunang terlaetak di Tamarunang - Pabiringa Kecamatan Binamu. Lokasi Pantai Tamarunang berjarak sekitar 8km dari kota Bontosunggu sebagai pusat kota kabupaten Jeneponto atau kurang lebih sekitar 130 km dari kota Makassar.

Daya tarik wisata yang ada di Pantai Tamarunang adalah panorama alam pantai dengan hamparan pasir di sepanjang bibir pantai dan debur ombak serta semilir angin yang sejuk memanjakan pengunjung. Fasilitas yang telah dimiliki dan terus dikembangkan pada Pantai Tamarunang adalah hotel dan restoran, gazebo, panggung terbuka, dermaga, dan sarana olah raga.

Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Pantai Tamarunang adalah kegiatan olah raga dan rekreasi pantai dan alam terbuka bagi keluarga seperti berenang, berjemur, volley pantai dan olah raga lainnya yang dilakukan dengan gembira sambil menikmati kelapa muda.

Gambar 4-31 Pantai Tamarunang



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/,2018

5) Coto Kuda/ Gantala Jarang

Coto merupakan salah satu kuliner yang sangat ikonik dan melekat dengan orang Makassar. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Makassar, maka coto juga banyak disajikan di warung-warung yang tersebar di kabupaten Jeneponto, yang juga disebut *gantala jarang*.

Hal yang berbeda dengan coto di daerah lainnya adalah umumnya coto yang dipasarkan di Jeneponto menggunakan daging kuda. Kuliner coto kuda ini sekaligus menggambarkan kabupaten Jeneponto identik dengan kuda. Bagian yang sering diolah untuk coto kuda adalah usus, daging dan jeroan. Bumbu dan rempahnya yang sangat kental membedakan kuah masakan sejenis soto di tempat lain.

Di kalangan masyarakat Jeneponto, Gantala Jarang merupakan salah satu makanan yang harus ada dalam berbagai hajatan. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan makanan ini pasti tidak akan berselera untuk mencicipinya, tapi masyarakat Jeneponto tidak demikian, dalam pesta-pesta pernikahan tidak akan sah atau ada sesuatu yang kurang jika tamu tidak disuguhi dengan hidangan *Gantala Jarang*.

Generasi tua di Jeneponto yang justru suka dan selalu mencari *gantala* ini disetiap hajatan, sebab kuahnya yang tidak terlalu kental dan daging yang direbus dengan matang membuat mudah dinikmati.

Rasa coto kuda dan *gantala jarang*, tidaklah begitu berbeda jauh dengan daging sapi akan tetapi sedikit lebih kenyal. Tapi bagi masyarakat Jeneponto terdapat mitos bahwa dengan makan daging "kuda/ *jarang*" akan memiliki stamina kuat dan pada dagingnya terdapat banyak zat-zat anti tetanus walaupun belum dibuktikan secara medis.

Gambar 4-32 Coto Kuda/ Gantala Jarang



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/,2018

6) Ballo' Tanning/ Tuak Manis

Bagi masyarakat Jeneponto minuman *Ballo Tenne/ Ballo Tanning* merupakan salah satu minuman khas yang rasanya manis tanpa kandungan alkohol yang disadap dari pokok *tala'/* pohon lontar.

Pohon lontar tumbuh subur di daerah Jeneponto utamanya di kawasan yang kondisi tanahnya tandus. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari pohon-pohon lontar ini, selain ballo tanning juga dibuat jadi panganan lain seperti gula merah, tenteng, daun lontar di gunakan dalam pembuatan tikar

Sepanjang jalan poros daerah Tamalatea Jeneponto, kita dapat melihat jejeran penjual ballo tanning/ ballo manis ini dikemas sederhana dalam botol air mineral, atau langsung dari bambu tempat ballo di simpan, Ballo tanning paling nikmat di santap bersama lammang/ beras ketan yang dimasak di dalam bambu.

Ballo atau Tuak, dapat di buat melalui beberapa tahap, yaitu mengiris buah Lontar hingga airnya keluar; kemudian bagian atas di ikat dengan keras agar airnya mudah dan mengalirnya lancar; gunakan Bambu/ jerigen untuk menampung air dari buah Lontar tersebut; selanjutnya tinggal menunggu beberapa hari, maka air dari *tala'* itu sudah mulai banyak.

Gambar 4-33 Tuak Manis/ Ballo Tanning



Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/,2018

7) Lammang

Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, memiliki makanan khas yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, yaitu *lammang bambu*. Makanan yang satu ini merupakan satu dari sekian banyak penganan tradisional yang mewarnai keaneka ragaman penganan khas di Indonesia. Tak heran, bila wisatawan yang berkunjung ke daerah yang berjarak kurang lebih 90 kilometer dari Kota Makassar ini, tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencicipi lammang bambu.

Kampung Ruku-ruku kelurahan Palengu kecamatan Bangkala merupakan pusat pembuatan *lammang bambu*. Di sepanjang jalan kampung ini, terlihat jejeran warung-warung kecil yang menjajakan *lammang bambu*.

Rasanya yang khas membuat *lammang bambu* menjadi incaran penikmat makanan tradisional, sehingga warungwarung yang menjajakan lammang bambu terus ramai disinggahi warga.

Bahan untuk membuat lammang bambu sebenarnya mudah didapatkan. Alat pembuatannya juga terbilang sangat sederhana. Namun karena proses pembuatannya yang tergolong unik, menjadikan makanan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmat makanan khas.

Bahan dan alat pembuatan lammang bambu adalah beras ketan, santan kelapa, garam, daun pisang, sabuk kelapa, bambu, dan kayu bakar.



Gambar 4-34 Pembuatan Lammang

Sumber: https://nyero.id/tempat-wisata-di-jeneponto/,2018

4.2. Fasilitas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Selain keberadaan keanekaragaman potensi daya tarik wisata sebagai komponen utama yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Jeneponto, maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata memegang peran penting dalam memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama kunjungannya di kabupaten Jeneponto. Adapun jenis dan kondisi sarana prasarana pariwisata yang ada di kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

4.2.1. Fasilitas Jalan

Jalan merupakan salah satu fasilitas transportasi darat yang memegang peran penting dalam menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Jeneponto serta antara kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Jeneponto di sampai dengan tahun 2017 adalah 1.175,00 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 60,80 km, jalan provinsi sepanjang 40,90 km, jalan strategis kabupaten sepanjang389,28 km, jalan kabupaten sepanjang 374,13 km, jalan desa sepanjang 91,74 km, jalan nonstatus sepanjang 91,15 km, dan jalan yang tidak dirinci sepanjang 126,91 km. Data mengenai panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di kabupaten Jeneponto tahun 2017 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No	Jenis Permukaan Jalan	2016	2017
1	Diaspal/ Asphalted	826,75	839,80
2	Beton/ Rigid Pavement	26,85	-
3	Penetrasi/ Macadam	8,37	-
4	Kerikil/ <i>Gravel</i>	88,10	128,97
5	Tanah/ Soil	125,37	165,82
6	Tidak Diperinci/ No Description	-	39,41
	Total	1.075,45	1.175,00

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akses jalan dalam menunjang kegiatan pariwisata di kabupaten Jeneponto secara umum cukup memadai, walaupun belum mampu menjangkau seluruh potensi daya tarik wisata yang ada.

Selain ketersediaan panjang jalan, faktor kondisi jalan juga memegang peranan penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat termasuk wisatawan pada saat melakukan perjalanan di kabupaten Jeneponto. Data mengenai panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Jalan Menurut kondisi Jalan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No	Kondisi Jalan	2016	2017
1	Baik/ Good	443,00	545,59
2	Sedang/ Not Too Bad	206,83	105,06
3	Rusak/ Damage	200,12	125,01
4	Rusak Berat/ Heavy Damage	225,50	399,34
	Total	1.075,45	1.175,00

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

4.2.2. Prasarana Listrik

Pelayanan kelistrikan di Kabupaten Jeneponto dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 yang terdaftar adalah sebanyak 70.773 pelanggan yang tersebar pada 8 buah ranting dan sub ranting dengan jumlah daya tersambung sebesar 75.620.349 VA. Data mengenai kelistrikan kabupaten Jeneponto tahun 2014 sampai dengan 2017 di PLN Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Produksi dan Daya Terjangkau Menurut Ranting/ Sub Ranting di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2017

Ranting/ Sub Ranting	2015	2016	2017
Pelanggan	59.149	65.813	70.773
Daya Tersambung (VA)	61.250.750	67.604.649	75.620.349
Terjual	86.972.800	95.940.118	12.499.875
Nilai	67.798.128.263	72.044.575.102	119.525.920.737

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

4.2.3. Fasilitas Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Jeneponto dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan yang dilayani sampai dengan tahun 2017 sebanyak 9.182 pelanggan, terdiri dari delapan kelompok segmentasi pelanggan dengan jumlah air yang terdistribusikan sebanyak 1.120.233 m³ dengan total nilai sebesar Rp.5.589.962.075,-

Data mengenai jumlah pelanggan dan air minum yang disalurkan oleh PAM Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Pelanggan dan Air Minum Disalurkan Oleh PAM Kabupaten Jeneponto Menurut Segmentasi Tahun 2017

No	Kategori Pelanggan	Air Minum Disalurkan	Nilai
1.	Rumah Tempat Tinggal	1.048.494	5.001.967.000
2.	Hotel, Obyek Wisata,	-	-
3.	Rumah Sakit, Badan- Badan Sosial,Tempat Ibadah	13.072	54.853.125
4.	Sarana Umum	20.567	56.539.200
5.	Perusahaan	-	-
6	Instansi Pemerintah	36.173	451.824.6.25
7	Lainnya	1.927	24.778.125
	Jumlah	1.120.233	5.589.962.075

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari jumlah sebanyak 9.182 pelanggan PDAM kabupaten Jeneponto, segmentasi terbesar adalah rumah tempat tinggal sebanyak 8.849 pelanggan disusul oleh Tempat Ibadah/Badan Sosial dan Instansi pemerintah masing-masing sebanyak 96, dan kelompok pelanggan terkecil adalah Sarana Umum, sebanyak 89 pelanggan.

4.2.4. Fasilitas Telekomunikasi

Fasilitas telekomunikasi yang telah dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto adalah fasilitas sambungan telepon PT. Telkom dan jaringan telepon seluler yang saat ini disediakan oleh operator jaringan seluler sudah dapat diakses sampai ke seluruh wilayah kecamatan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2017, kapasitas sentral di kabupaten Jeneponto sebanyak 4.864 dan terisisi sebanyak 4.688. Sedangkan untuk jaringan telepon tersedia kapasitas 3.866 dan teris sebanyak 922.

Dalam hal penggunaan saluran telekomunikasi berbasis kabel, seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka terjadi pula perubahan struktur pengguna jaringan komunikasi dari konvensional menjadi nirkabel. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pelanggan telekomunikasi telepon konvensional. Adapun data mengenai jumlah sambungan telepon di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Banyaknya Sentral, Kapasitas, Sambungan Induk dan Sambungan Cabang Telepon di Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

No	Tahun	Sentral	Kapasitas	Sambungan Induk	Sambungan Cabang
1.	2013	1	4.864	2.300	2.950
2.	2014	1	4.864	2.300	2.950
3.	2015	1	4.864	2.300	2.950
4.	2016	1	4.864	2.300	2.950
5	2017	1	4.864	922	-

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

4.2.5. Fasilitas Perbankan dan Lembaga Keuangan

Salah satu prasarana pariwisata yang sangat berpengaruh dalam memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan di kabupaten Jeneponto adalah ketersediaan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain non bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat memberikan kemudahan dan memanjakan wisatawan melalui penyediaan dan layanan keuangan seperti penyediaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM), kantor kas keliling, penukaran mata uang asing, serta layanan perbankan dan keuangan lainnya. Disisi lain, keberadaan dan ketersediaan bank dan lembaga keuangan non bank akan sangat mempengaruhi pertumbuhan investasi pariwisata di kabupaten Jeneponto.

Sampai saat ini terdapat 7 (enam) buah bank yang beroperasi di kabupaten Jeneponto yang dilengkapi dengan 3 buah Kantor Cabang, 8 buah Kantor Unit, 14 buah Kantor Cabang Pembantu, 5 buah Kantor Kas, dan 1 buah Kas Keliling, serta 18 buah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Jeneponto.

Selain lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non-bank yang ada di kabupaten Jeneponto adalah Pegadaian sebanyak 13 buah dan Koperasi KUD dan Non KUD sebanyak 246 buah

Adapun jenis dan jumlah bank, koperasi serta lembaga keuangan lainnya yang ada di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

No.	Jenis Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	33	1 Kanca 8 Unit 6 KCP 4 Kantor Kas 1 Kas Keliling 13 ATM
2.	Bank Negara Indonesia (BNI)		
3.	Bank Danamon	2	1 KCP 1 KCP Syariah
4.	Bank Sulselbar	4	1 Kanca 1 OC Syariah 2 ATM
5.	Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN)	1	1 KCP
6.	Bank Tabungan Nasional (BTN)	1	1 Kantor Kas
7.	Bank Mandiri	1	1 Kanca
8.	Koperasi	399	17 KUD 229 Non-KUD
9.	Pegadaian	13	2 CP 11 UPC

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah bank yang beroperasi di kabupaten Jeneponto sebanyak 7 buah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sulselbar, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Bank Mandiri, Bank Sulselbar, Bank Danamon dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara lembaga ekonomi yang terbesar adalah koperasi yaitu sebanyak 246 buah yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan koperasi lainnya, sedangkan lembaga keuangan lainnya adalah Pegadaian sebanyak 13 buah yaitu PT. Pegadaian Persero.

4.3. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata Kab. Jeneponto

Untuk menjaring dan meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan ke kabupaten Jeneponto sebagai destinasi berkualitas, dibutuhkan konektivitas yang terpadu. dan memadai. Konektivitas transportasi sangat memegang peranan penting bagi perkembangan dari suatu destinasi yang selanjutnya akan memberikan dampak pertumbuhan bagi angka kunjungan

wisatawan sehingga dapat menciptakan sejumlah tantangan yang berhubungan dengan infrastuktur dan kapasitas transportasi. Pada sisi lain, jika suatu destinasi memiliki konektivitas yang tidak memadai maka destinasi tersebut tentunya akan sulit untuk dijangkau sehingga akan kurang wisatawan yang datang untuk berkunjung.

Sebagai salah satu strategi untuk menjaring wisatawan, maka konektivitas yang ada harus dapat menjangkau seluruh daya tarik yang ada di kabupaten Jeneponto dengan aman, nyaman dan mudah. Ketersediaan moda transportasi darat dan laut dapat menjadi fokus dalam pengembangan aksesibilitas sehingga secara menyeluruh konektvitas dirancang untuk peningkatan kualitas perjalanan wisata.

Kemudahan aksesibilitas ini juga dapat memperpanjang lama tinggal dari wisatawan karena mereka dapat memiliki ketertarikan yang kuat untuk melakukan eksplorasi destinasi melalui perjalanan yang mereka dapat rancang lebih matang. Oleh karena itu konektivitas harus dapat mendukung pola perjalanan di kabupaten Jeneponto sehingga perlu pengembangan yang tepat.

4.3.1. Transportasi Darat

Selain ketersediaan jalan darat yang memadai, maka untuk kemudahan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana transportasi darat berupa bus angkutan dan jenis kendaraan lainnya yang dapat dipersewakan dan digunakan untuk kemudahan mobilitas oleh wisatawan menuju daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

Mengingat jarak yang cukup dekat dengan kota Makassar sebagai akses utama kabupaten Jeneponto, maka sarana transportasi melalui jalur darat lebih banyak dilakukan dengan menggunakan kendaraan mini bus, baik kendaraan umum, milik pribadi maupun yang dipersewakan (*rent car*).

Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi umum jalur darat dari Makassar ke kabupaten Jeneponto bagi adalah dengan menggunakan mini bus dari terminal Mallengkeri Makassar, dan sebahagian lainnya menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan ke kabupaten Jeneponto atau ke kabupaten lainnya dan singgah beristirahat di Jeneponto.

Umumnya masyarakat yang menggunakan bus besar sebagai alat transportasi adalah orang-orang yang tujuan perjalanannya ke kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar yang hanya singgah beristirahat di kabupaten jeneponto. Kondisi geografis tersebut berpengaruh dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto mengingat bahwa tipologi pengunjung terdiri atas dua kelompok utama, yaitu pengunjung dengan tujuan utama ke Jeneponto (membutuhkan akomodasi untuk menginap) dan pengunjung

dengan tujuan beristirahat atau transit (hanya membutuhkan *rest area*).

Adapun data mengenai jumlah kendaraan roda 4-6 di kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 4-6 (Wajib Uji) di Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2017

No.	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017
1.	Bus Besar	14	10	10	10
2.	Mini Bus	265	255	255	256
3.	Truck	433	445	466	484
4.	Micro Mini	753	761	761	761
5.	Pick-Up	377	400	529	623
6.	Tangki	8	7	7	7
	Jumlah	1.850	1.878	2.028	2.141

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

4.3.2. Transportasi Laut

Selain sarana transportasi darat, akses dari dan ke kabupaten Jeneponto juga dapat dilakukan melalui jalur transportasi laut, termasuk konektivitas ke pulau Harapan sebagai wilayah pulau yang ada di kabupaten Jeneponto. Peran transportasi laut menjadi sangat dominan, khususnya dalam konektivitas pelayaran rakyat dalam perdagangan hasil bumi dan laut antar kabupaten dengan wilayah pulau-pulau seperti jalur Makassar - Jeneponto - Bantaeng - Bulukumba - Kepulauan Selayar.

Selain itu, peran pelabuhan Jeneponto juga sangat strategis dalam konektivitas perdagangan khususnya perdagangan hasil bumi kabupaten Jeneponto yang berupa rumput laut dan komoditas pertanian serta hewan ternak berupa kerbau, kuda dan kambing dengan provinsi lain di luar Sulawesi Selatan seperti provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara barat, dan Maluku.

Pelabuhan laut yang ada dan beroperasi di kabupaten Jeneponto adalah Pelabuhan merupakan Pelabuhan Kelas III yang dikelolah oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang terletak di desa Bungeng kecamatan Batang.

Pada tahun 2017, data mengenai jumlah kapal yang keluar

masuk di pelabuhan laut untuk sarana jasa perdagangan, angkutan penumpang dan angkutan barang baik lokal maupun antar daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Banyaknya Kunjungan Kapal dan Jumlah/ Isi Kotor Menurut Bulan Pelabuhan Jeneponto Tahun 2017

No	Bulan	Kapal/ Kapal Motor		
No		Unit (Buah)	GRT (m3)	
1.	Januari	102	39.889	
2.	Februari	47	42.926	
3.	Maret	72	42.782	
4.	April	71	37.894	
5.	Mei	72	25.024	
6.	Juni	74	30.688	
7.	Juli	99	55.598	
8.	Agustus	81	34.734	
9.	September	74	52.589	
10.	Oktober	76	18.905	
11.	Novemper	69	42.821	
12	Desember	73	61.409	
	Jumlah	910	485.259	

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2018

Keberadaan pelabuhan tersebut masih didomonasi oleh aktivitas perdagangan dalam belum banyak berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan pergerakan wisatawan melalui jalur laut. Mengingat letak geografis kabupaten Jeneponto dalam aksesibilitas laut pada destinasi utama wisata bahari di Sulawesi Selatan yaitu Makassar (gugusan kepulauan Spearmonde) – Bulukumba (Bira) Kepulauan Selayar (Taka Bonerate dan Benteng) serta kabupaten Sinjai (Larea-rea dan Pulau Sembilan), maka diperlukan perencanaan untuk mengembangkan pelabuhan/ dermaga yang memungkinkan wisatawan minat khusus bahari untuk dapat berkunjung ke Jeneponto.

BAB -**5**

INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

5.1. Usaha Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Dalam pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur, ketersediaan dan konektivitas infrastruktur, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Untuk itu, destinasi dan industri pariwisata harus dikembangkan menjadi berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan citra dan terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata.

Meningkatnya citra pariwisata dapat dikenali antara lain melalui jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif *stakeholders*, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata sehingga akan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik.

Dalam penciptaan diversifikasi destinasi pariwisata maka jumlah lokasi daya tarik yang dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebagai penerapan prinsip *community based tourism* untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat.

Semakin banyak desa yang difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan serta pola perjalanan yang dikembangkan. Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi

pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri pariwisata yaitu Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; Pemasaran pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisataan.

konteks arah kebijakan Dalam dan strategi untuk pariwisata, pengembangan destinasi industri maka dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi perwilayahan pembangunan destinasi; pembangunan daya tarik wisata; pembangunan aksesibilitas pariwisata; pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui penguatan struktur industri pariwisata; peningkatan daya saing produk pariwisata; pengembangan kemitraan usaha pariwisata; penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan industri pariwisata dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019, yaitu pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis tahun 2015 - 2019 untuk pengembangan industri pariwisata adalah pengembangan industri pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem antara lain meliputi kepariwisataan perancangan destinasi atraksi, amenitas, dan pariwisata, peningkatan aksesibilitas, ekosistem pariwisata; pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata pedesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus,

internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.

Pengembangan industri pariwisata yang diharapkan adalah yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya yang diwujudkan melalui pengembangan 5 (lima) pilar industri pariwisata yaitu penguatan struktur industri pariwisata; daya saing produk wisata; kemitraan usaha pariwisata melalui skema kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; Kredibilitas bisnis melalui standardisasi dan sertifikasi usaha, regulasi dan fasilitasi jaminan usaha; swerta tanggungjawab terhadap lingkungan yang berfokus pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu : daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan penyelenggaraan pertemuan, perialanan konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. Adapun potensi dan kondisi industri pariwisata yang dimiliki oleh kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

5.1.1. Usaha Akomodasi

Usaha akomodasi merupakan salah satu jenis usaha yang memegang peran penting dalam mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto karena salah satu pertimbangan wisatawan dalam memutuskan untuk berkunjung ke sebuah destinasi adalah ketersediaan akomodasi yang bersih, aman dan nyaman melalui ketersediaan fasilitas, kualitas produk dan pelayanan yang baik.

Ketersediaan akomodasi di kabupaten Jeneponto sampai saat ini masih sangat terbatas dari sisi kuantitas dan kualitas. Sebahagian besar hotel yang ada masih dikelola secara tradisional dan peruntukan bangunan hotel tersebut belum direncanakan untuk dijadikan usaha komersil sehingga berpengaruh terhadap konstruksi dan penataan bangunan sebagai hotel yang layak.

Hal lain yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan kabupaten Jeneponto sebagai destinasi yang menarik adalah ketersediaan fasilitas pendukung lain selain fasilitas kamar, seperti fasilitas makan minum, ruang rapat dan pertemuan, hiburan, akses internet, dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Jeneponto tahun 2017, menunjukkan bahwa ketersediaan kamar dari 9 buah hotel yang beroperasi adalah sebanyak 141 buah kamar dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia pada hotel di kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 198 buah tempat tidur.

Data mengenai jumlah hotel, kamar dan tempat tidur pada usaha akomodasi yang ada di kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

		Jumlah			
No	Tahun	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1.	2014	10	129	180	
2.	2015	11	119	198	
3.	2016	12	131	211	
4.	2017	9	141	198	

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2017

Untuk lebih jelasnya mengenai data masing-masing hotel berikut jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Hotel, Jumlah Kamar, Tempat Tidur pada Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Nama Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Hotel Bintang Karaeng	15	19
2	Hotel Farhan	21	42
3	Hotel Sari	22	35
4	Penginapan Putri Solo	15	27
5	Wisma & Cost Tief Nabacu	5	5
6	Wisma Jaya	22	30
7	Hotel Valentine	15	18
8	Wisma Cendana	10	10
9	Penginapan Boyong	13	13
	Jumlah	141	198

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2017

Salah satu indikator keberhasilan operasional dan penyediaan usaha akomodasi adalah tingkat hunian kamar (*room occupancy*). Analisis terhadap data tingkat hunian kamar akan menjadi acuan dalam memahami karakteristik kebutuhan pasar wisatawan (*room seeker*) terhadap ketersediaan jenis kamar pada hotel berbintang atau non-bintang serta dari sisi sediaan terhadap jumlah dan tipe kamar beserta tempat tidur yang tersedia.

Adapun data mengenai tingkat hunian kamar hotel di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Bulan	Kamar Tersedia	Kamar Terjual	Tingkat Penghunian Kamar
1.	Januari	4.371	861	19.70%
2.	Februari	3.948	983	24.89%
3.	Maret	4.371	1.015	23.22%
4.	April	4.230	943	22.29%
5.	Mei	4.371	866	19.82%
6.	Juni	4.230	624	14.75%
7.	Juli	4.371	637	14.57%
8.	Agustus	4.371	1.262	28.87%
9.	September	4.230	1.259	29.76%
10.	Oktober	4.371	1.383	31.64%
11.	November	4.230	1.096	25.92%
12.	Desember	4.371	1.187	27.15%
	Jumlah	51.465	12.116	23,55%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah kamar yang tersedia pada tahun 2017 adalah sebanyak 51.465 kamar dan jumlah kamar terjual hanya sebanyak 12.116 kamar sehingga rata-rata tingkat penghunian kamar pada hotel di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebesar 23,55 %.

Tingkat hunian kamar tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 31,64%, sedangkan tingkat hunian terendah terjadi pada bulan Juli yang hanya mencapai 14,57%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 merupakan high season dan terdapat berbagai aktivitas dan atraksi yang menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto khususnya, sedangkan pada bulan Juli tahun 2017 merupakan bulan low season dimana aktivitas peringatan hari kemerdekaan dan bulan ramadhan ikut berpengaruh terhadap rendahnya minat wisatawan berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

Selain data tentang tingkat penghunian kamar (room occupancy), juga dilakukan analisis terhadap data jumlah tamu menginap, tingkat pemakaian tempat tidur dan lama tinggal wisatawan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto sehingga dapat diketahui bagaimana struktur pemakaian kamar oleh wisatawan pada pemakaian kamar dengan hunian tunggal (single occupancy) dan penggunaan kamar dobel (double occupancy). Data tentang komponen tersebut akan berasosiasi dengan pengeluaran rata-rata tamu terhadap pembelian produk pada hotel.

Adapun data mengenai jumlah wisatawan yang menginap pada hotel di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Jumlah Tamu Menginap Pada Hotel di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Bulan	Wisman	Wisnus	Total Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan
1.	Januari	0	677	677	1.272
2.	Februari	0	765	765	1.285
3.	Maret	4	783	787	1.290
4.	April	8	721	729	1.293
5.	Mei	1	668	669	1.295
6.	Juni	1	451	452	1.380
7.	Juli	0	465	465	1.370
8.	Agustus	2	818	820	1.539
9.	September	0	945	945	1.332
10.	Oktober	0	900	900	1.537
11.	November	0	869	869	1.262
12.	Desember	0	865	865	1.372
	Jumlah	16	8.927	8.943	1.352

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pemakaian jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 sebanyak 8.943 orang wisatawan terdiri dari 16 orang wisatawan manca Negara dan 8.927 orang wisatawan nusantara. Dengan demikian maka pemakaian tempat tidur pada hotel tahun 2017 di kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 72.270 tempat tidur tersedia dan jumlah tempat tidur terjual hanya sebanyak 12.116 tempat tidur, sehingga tingkat pemakaian tempat tidur pada hotel adalah sebesar 16,76 %.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tipologi wisatawan sebagai pasar utama wisatawan kabupaten Jeneponto adalah didominasi oleh wisatawan nusatantara dengan rata-rata lama tinggal wisatawan hanya sebesar 1,352 hari Hal ini mengindikasikasikan bahwa tipologi pasar wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto adalah wisatawan dengan tujuan utama bisnis, urusan dinas atau perusahaan lainnya serta tujuan kunjungan keluarga/ kerabatan ataupun penelitian yang dilakukan dalam waktu singkat (semalam).

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan kamar (*room supply*), jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel di kabupaten Jeneponto sampai saat ini masih terjadi kelebihan (*over supply*). Untuk itu dari sisi daya Tarik (*pull factor*) diperlukan upaya strategis dalam memperbanyak aktivitas dan aktraksi yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

Klasifikasi perbintangan hotel di kabupaten Jeneponto masih mengikuti sistem lama, dimana penggolongan kelas hotel hanya dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sehingga belum ada satu hotel pun di kabupatenj Jeneponto yang telah memperoleh sertifikat usaha hotel dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Selain hal tersebut, ketersediaan tenaga kerja yang professional dan kompeten juga menjadi salah satu prioritas yang perlu diperhatikan karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kebersihan, pemeliharaan fasilitas, keramahan, pelayanan dan hal lain yang dipengaruhi langsung oleh kualitas sumber daya manusia.

Adapun data mengenai jumlah tenaga kerja pada hotel di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Hotel Menurut Pendidikan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Klasifikasi Hotel	< SMP	SMU	Diploma	Total Tenaga Kerja
1.	Berbintang	0	0	0	0
2.	Non-Bintang	12	24	9	45
	Jumlah	12	24	9	45

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto, 2017

Data pada table tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja perhotelan di kabupaten Jeneponto masih sangat rendah. Rasio tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah kamar tersedia di kabupaten Jeneponto adalah sebesar 1 : 03. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hotel, fasilitas yang tersedia serta system manajemen yang diterapkan pada usaha hotel di kabupaten jeneponto masih sangat konvensional.

Guna memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada (*existing market*) maka jenis wisata MICE merupakan alternatif kegiatan wisata yang perlu dikembangkan melalui penyediaan sarana ruang pertemuan, ruang rapat, serta kegiatan wisata minat khusus kuliner dan outbound lainnya yang memungkinkan sehingga lama tinggal wisatawan dapat diperpanjang.

5.1.2. Restoran dan Cafe

Selain ketersediaan kamar yang bersih, aman dan nyaman bagi wisatawan, keberadaan usaha restoran, rumah makan dan café juga menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

Keberadaan restoran, rumah makan dan café di kabupaten Jeneponto belum tertata dengan baik. Untuk restoran yang memenuhi standar kebutuhan wisatawan masih belum dijumpai,

sebahagian besar hotel menyiapkan fasilitas restoran dan café dengan pilihan menu yang sangat terbatas. Rumah makan yang tersedia di kabupaten Jeneponto sebahagian besar menawarkan sajian hidangan coto kuda, konro kuda, dan makanan tradisional gantala jarang. Beberapa usaha restoran dan rumah makan berbasis hasil lain seperti ikan dan kepiting sudah tidak beroperasi atau beroperasi secara terbatas.

Sebahagian lainnya di daerah yang sering menjadi tempat singgah dan istirahat favorit bagi masyarakat yang berkunjung atau yang sekedar melintasi kabupaten Jeneponto hanya menyediakan tempat terbatas berupa warung sederhana yang menjual makanan tradisional seperti *Lammang*, Mie instan beserta gogos, buras dan telur rebus, serta minuman tradisional tuak manis, kopi, teh dan minuman ringan lainnya (soft drink).

Dukungan potensi sumberdaya alam yang melimpah akan hasil laut, pertanian dan perkebunan sebagai kontributor utama dalam perekonomian kabupaten Jeneponto, sejatinya mampu membuat dan menumbuhkan minat investasi dalam penyediaan fasilitas restoran, rumah makan dan cafe.

Hal tersebut akan sangat berperan dalam mendorong kepuasan wisatawan serta memacu minat wisatawan berkunjung ke kabupaten jeneponto mengingat ketersediaan restoran di kabupaten Jeneponto masih sangat terbatas. Keterbatas tersebut bukan hanya dari segi kuantitas, namun dalam hal variasi produk kuliner yang dipasarkan, kebersihan, kenyamanan dan suasana restoran yang ada saat ini juga masih sangat terbatas. Selain itu, dari sisi distribusi lokasi restoran hanya berada pada kecamatan ibukota kabupaten. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mengangkat dan memperkenalkan kuliner tradisional melalui penyediaan fasilitas restoran yang baik, pelatihan tenaga kerja serta penyusunan ikon kuliner tradisional kabupaten Jeneponto.

5.1.3. Biro Perjalanan Wisata

Usaha Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang memegang peran penting dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto melalui pengemasan berbagai jenis paket wisata serta promosi dan pemasaran potensi daya tarik wisata kabupaten Jeneponto yang terarah, terencana dan berkelanjutan sehingga kabupaten Jeneponto akan lebih dikenal oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

Saat ini, sejumlah Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang ada di kabupaten Jeneponto masih sangat terbatas dan berfokus dalam penjualan tiket penerbangan dan paket wisata religi Umrah dan Haji. Data mengenai jumlah usaha Biro Perjalanan Wisata yang ada di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha
1.	Selvi All Stars Elektone	Biro Perjalanan Wisata
2.	Jaya Tour & Travel	Biro Perjalanan Wisata
3.	Lintang Travel	Biro Perjalanan Wisata
4.	Webeka Tour & Travel	Biro Perjalanan Wisata
5.	Aqso Tour & Travel	Biro Perjalanan Wisata
6.	ESQ Tours	Agen Perjalanan Wisata

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2018

5.1.4. Usaha Jasa MICE

Usaha Jasa MICE merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan minat khusus MICE ke kabupaten Jeneponto. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan MICE terhadap pelayanan *Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition* menunjukkan prospek yang cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dan industri kabupaten Jeneponto seperti beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta posisi dan peran kabupaten Jeneponto sangat memungkinkan dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan formal tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seperti event olah raga, musyawarah nasional, festival budaya dan pameran lainnya.

Untuk dapat menangkap potensi pasar pada segmentasi MICE tersebut, dibutuhklan upaya terstruktur dalam bekerjasama dengan perusahaan event organizer (EO dan PCO) yang sudah ada, ataupun dengan mendorong masyarakat dalam membuka dan mengusahakan terbentuknya event organizer di kabupaten Jeneponto.

5.1.5. Usaha Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata

Usaha kawasan pariwisata dan daya Tarik wisata merupakan jenis usaha pariwisata yang sangat strategis dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto melalui penyediaan kawasan pariwisata yang menarik sehingga dapat menjadi atraksi dan aktivitas pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dibandingkan dengan daya tarik pada destinasi lainnya.

Saat ini, terdapat beberapa buah kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang sudah dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, Dinas Pariwisata kabupaten Jeneponto bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat. Kawasan pariwisata yang dibangun dan dikembangkan berbasis potensi daya tarik wilayah seperti kawasan ekowisata Tarowang, kawasan

wisata Pantai Tamarunang, temana tematik, *rest area*, dan *Water Park* Boyong.

5.1.6. Usaha Salon dan Spa

Usaha Salon dan Spa merupakan jenis usaha pariwisata yang mendukung aktivitas pariwisata dalam menarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto. Saat ini pertumbuhan kebutuhan wisatawan terhadap pelayanan kecantikan dan kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Saat ini, sejumlah salon kecantikan yang ada di kabupaten Jeneponto masih berfokus dalam pelayanan penataan rambut dan perawatan kulit, kuku dan wajah. Data mengenai jumlah usaha Salon dan Spa yang ada di kabupaten Jeneponto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Usaha Salon dan Spa di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017

No.	Nama Usaha	Alamat
1.	Salon Lala BST	Ruko dan Perumahan Bukit
		Sehati, Balang kec. Binamu
2.	Ushel <i>Barbershop</i>	Bontotangnga Kecamatan
		Tamalatea
3.	Salon Ifank	Empoang kecamatan Binamu
4.	Pangkas Rambut Brother	Kayuloe Turatea
5.	Pangkas Rambut	Jl. M. Ali Gassing No.203, Kel,
	Dg.Lewa	Pabiringa kecamatan Binamu
6.	Hair Cut Erwin Nyampa	Pabiringa kecamatan Binamu
7.	Salon Ivan & Bridal	Empoang kecamatan Binamu

Sumber: Data Olahan Peneletian, 2018

5.1.7. Usaha Pariwisata Lainnya

Untuk usaha pariwisata lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, seperti usaha daya tarik wisata; jasa transportasi wisata; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; dan jasa pramuwisata; dan wisata tirta; belum terdapat di kabupaten Jeneponto.

5.2. Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

Keberadaan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata selain usaha penyediaan akomodasi dan usaha makan minum adalah usaha yang berbasis kreativitas yang dapat mendorong perkembangan pariwisata kabupaten Jeneponto, seperti usaha cinderamata (termasuk kuliner dan kerajinan), usaha

pengolahan bahan lokal serta percetakan dan usaha kreatif berbasis digital.

Keberadaan usaha kecil dan menengah dalam mendukung pariwisata memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperkenalkan bahan dan produk lokal dengan penanganan tradisional sehingga menarik untuk melibatkan wisatawan dalam pembuatan produknya serta memacu penjualan produk melalui pembelajaan wisatawan sebagai cinderamata, sekaligus sebagai bahan promosi yang menarik bagi kepariwisataan kabupaten Jeneponto.

вав -6

PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

6.1. Perkembangan Wisatawan Kabupaten Jeneponto

Pemasaran pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting dalam perencanaan kepariwisataan (tourism planning and development) karena merupakan ujung tombak dalam menentukan arus kunjungan wisatawan. Pemasaran pariwisata terdiri dari dua aspek pokok yaitu aspek produk sebagai supply side dan pasar sebagai demand side. Hal tersebut sangat penting dalam menjalankan pemasaran pariwisata karena fungsi akan memberikan kontribusi yang besar dalam perancangan kebijaksanaan pemasaran kabupaten Jeneponto.

Pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan melalui penetapan pasar sasaran dan strategi pengembangan pasar melalui penciptaan, pendistribusian, dan komunikasi pemasaran yang terencana, terstruktur dan terintegrasi. Orientasi pasar diterapkan secara konsisten dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap keselarasan antara sumber daya dengan preferensi dan *trend* pasar pariwisata kabupaten Jeneponto.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar maka pariwisata kabupaten Jeneponto harus mampu disesuaikan dengan tipologi dan perilaku wisatawan secara menyeluruh agar dapat disesuaikan dengan sediaan produk yang ditawarkan. Melalui strategi pemasaran yang baik, maka angka kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Angka kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pembangunan kepariwisataan suatu daerah. Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penyiapan komponen kepariwisataan lainnya seperti aksesibilitas, akomodasi, atraksi dan aktivitas wisata, serta amenitas kepariwisataan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang baik agar kepuasan wisatawan dapat terpenuhi dan menjadikan daya saing kepariwisataan daerah semakin meningkat.

6.1.1. Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara merupakan potensi pasar yang terus disasar dan didorong oleh pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan nasional dengan target sebanyak 275 juta Wisatawan Nusantara pada tahun 2019. Pergerakan wisatawan nususantara telah berkontribusi dalam menempatkan Indonesia ke dalam posisi 20 besar negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat dalam kurun waktu tiga tahun dengan pertumbuhan per Januari-Oktober 2017 mencapai 24%.

Wisatawan Nusantara (wisnus)/ domestic tourists adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai sebanyak 270,82 juta perjalanan yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,45 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 264,34 juta perjalanan. Sedangkan pertumbuhan jumlah perjalanan setiap tahun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai sekitar 2.61 Peningkatan ini diduga sebagai akibat kondisi perekonomian yang semakin membaik, keamanan yang cukup kondusif serta mudahnya aksesibilitas ke daerah-daerah wisata. Disamping itu, adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat juga ikut berperan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata. Maraknya penggunaan media sosial sangat membantu dalam rangka menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata tertentu.

Gambar 6.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Total Pengeluaran, Tahun 2010-2017



Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa total pengeluaran selama tahun 2017 mencapai sebesar 253,45 triliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4,87 persen dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar 241,67 triliun rupiah. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan jumlah pengeluaran tiap tahun cukup tinggi hingga mencapai sekitar 10,24 persen.

Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan secara garis besar dapat dibedakan menurut daerah asal dan daerah tujuan. Daerah asal adalah daerah tempat tinggal dari orang yang melakukan perjalanan, sedangkan yang dimaksud daerah tujuan adalah daerah-daerah yang dikunjungi selama melakukan perjalanan. Karakteristik penduduk yang melakukan perjalanan menurut daerah asal maupun daerah tujuan yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, status perkawinan, jenis kegiatan utama, pekerjaan utama, maksud kunjungan, akomodasi yang digunakan, moda angkutan, aktivitas wisata yang dilakukan, rata-rata lama bepergian dan rata-rata pengeluaran per kunjungan.

6.1.1.1. Daerah Asal Wisatawan Nusantara

Daerah asal wisatawan nusantara merupakan tempat domisili dari wisnus tersebut. Sebagian besar perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2017 dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Pulau Jawa, yaitu mencapai 62,71 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Perjalanan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu sekitar 16,17 persen, 16,13 persen serta 15,32 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Sementara itu, penduduk yang berdomisili di luar Pulau Jawa yang paling banyak melakukan perjalanan adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang dilakukan oleh penduduk Sumatera Utara selama tahun 2017 hingga mencapai sekitar 3,46 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Selanjutnya adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, dan Lampung yang masing-masing mencapai sekitar 3,25 persen; 3,01 persen; dan 2,22 persen

Lampung
Di Yogyakarta
Bali
3,01
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Banten
DKI Jakarta
Jawa Tengah

15,32

Gambar 6.2 Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal, Tahun 2017 (Persen)

16,13

16,17

Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

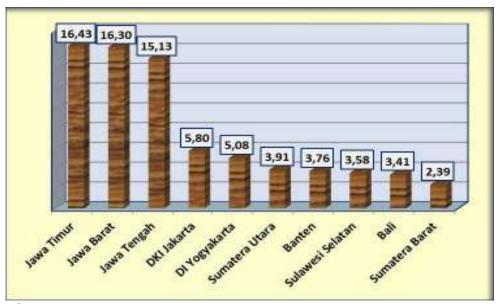
Jawa Timur

Jawa Barat

6.1.1.2. Daerah Tujuan Wisatawan Nusantara

Daerah tujuan wisatawan nusantara merupakan tempat tujuan dari perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara tersebut atau sering disebut dengan destinasi wisata. Pilihan daerah tujuan wisata ini akan sangat menentukan kecenderungan kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi untuk mendapatkan kunjungan wisatawan nusantara.

Gambar 6.3 Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2017 (Persen)



Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi hingga mencapai sekitar 10,37 persen dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia. Kemudian diikuti oleh wisatawan nusantara yang bertujuan mengunjungi wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang masingmasing sekitar 8,77 persen dan 6,75 persen. Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana Pulau Jawa sangat mendominasi. Sekitar 34,33 persen dari keseluruhan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara, bertujuan di wilayah-wilayah Pulau Jawa.

Provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan favorit wisatawan nusantara adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai sekitar 6,64 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisnus di Indonesia. Kemudian disusul oleh wisatawan dengan tujuan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Sumatera Barat yang masingmasing sekitar 3,91 persen; 3,58 persen; 3,41 persen; dan 2,39 persen.

6.1.1.3. Aktivitas Wisata

Aktivitas wisata merupakan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan nusantara selama melakukan perjalanan wisata. Kegiatan/aktivitas pariwisata dikelompokan menjadi 10 jenis aktivitas, yaitu: wisata bahari, eko wisata, wisata petualangan, wisata sejarah/religi, wisata kesenian, wisata kuliner, wisata kota & pedesaan, wisata MICE, wisata olahraga/kesehatan, dan wisata terintegrasi.

Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan nusantara adalah jenis wisata kota dan perdesaan seperti wisata belanja, mengunjungi teman atau kerabat, menikmati hiburan malam, tinggal di desa tradisional/homestay, mengunjungi pasar tradisional, wisata darmabakti, philantropis (dermawan), program tanggung jawab sosial perusahaan, fotografi & architectural visit, dan live-in program. Aktivitas ini mencapai sekitar 42,76 persen dari seluruh aktivitas yang dilakukan selama melakukan perjalanan wisata. Aktivitas selanjutnya adalah wisata bahari yang mencapai sekitar 17,28 persen kemudian diikuti oleh wisata terintegrasi/terpadu dan wisata kuliner yang masing masing sekitar 11 persen. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan oleh wisatawan nusantar adalah wisata MICE yang masih sekitar 0,92 persen.

Wisata Kuliner
11%

Wisata Kesanian
1%

Wisata Sejarah
9%

Wisata Petualangan
1%

Eho Wisata Bahari
1%

Wisata Bahari
1%

Wisata Kesahatan
3%

Wisata Terintegrasi
11%

Gambar 6.4 Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Aktivitas Wisata Yang Dilakukan Tahun 2017

Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.1.1.4. Akomodasi Yang Digunakan

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke wilayah-wilayah di Indonesia, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan pola yang hampir sama dalam hal penggunaan akomodasi, dimana sebagian besar menginap di akomodasi. Pada tahun 2017, wisnus yang menggunakan akomodasi mencapai sekitar 53,65 persen sedangkan pada tahun 2016 proporsinya mencapai sebesar 56,48 persen.

Gambar 6.5 Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Akomodasi Yang Digunakan Tahun 2016-2017(Persen)



Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Akomodasi yang digunakan oleh wisnus untuk menginap sebagian besar adalah rumah teman atau keluarga. Hal ini diduga karena sebagian besar mereka bermaksud untuk mengunjungi teman atau keluarga. Berdasarkan hasil Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara tahun 2017 menunjukan bahwa proporsi wisnus yang menginap di rumah teman atau keluarga mencapai sekitar 82,15 persen dari jumlah wisnus yang menginap di akomodasi, dimana proporsinya cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 79,44 persen.

Sedangkan wisnus yang menginap di akomodasi komersial hanya sekitar 15,33 persen saja, dimana 8,94 persen menginap di hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang, dan 6,38 persen wisnus menginap di akomodasi komersial lainnya. Proporsi wisnus yang menginap di akomodasi komersial, baik di hotel maupun di akomodasi komersial lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 18,15 persen dari jumlah wisnus yang menggunakan akomodasi.

6.1.1.5. Maksud Kunjungan

Maksud atau tujuan dari wisatawan nusantara dalam melakukan bepergian/ perjalanan atau kunjungan sangat beragam. Pada tahun 2017, sebagian besar wisnus melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengunjungi teman/ keluarga/ mudik. Proporsi wisatawan nusantara yang mengunjungi teman/ keluarga/ mudik mencapai sekitar 44,56 persen. Kelompok ini terbagi atas 32,67 persen wisnus yang bertujuan utama untuk mengunjungi teman/keluarga dan 11,89 persen wisnus yang tujuan utamanya adalah untuk mudik/ pulang kampong pada hari raya. Selanjutnya adalah wisnus yang bertujuan untuk berlibur atau rekreasi yang mencapai sekitar 41,16 persen dari seluruh perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia.

Proporsi wisnus yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama berlibur/ rekreasi ini menunjukkan peningkatan dibanding 2016 yang hanya mencapai sekitar 38,53 persen. Selain itu, terdapat wisnus dengan tujuan utama untuk berziarah/ keagamaan (5,86 persen), kesehatan/berobat (1,53 persen), profesi/ bisnis (1,32 persen), sedangkan sisanya terbagi dengan tujuan utama pertemuan/ kongres/ seminar, training/ pelatihan, olahraga/ kesenian, dan lainnya

2016

2017

43.52

41.16

44.56

38.58

43.52

41.16

44.56

3.53

0.94 180 2.27 1/46 3.44

1.22 0.36 1.53

8 Bienis ® Mice ® Diklat «Kesehatan ® Ziarah ® Mangunjungi Teman ® Olahraga ® Laihmya

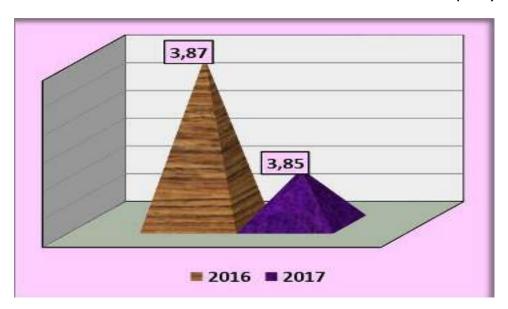
Gambar 6.6 Distribusi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Maksud Kunjungan Tahun 2016-2017(Persen)

Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

6.1.1.6. Rata-Rata Lama Bepergian

Rata-rata lama bepergian penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata selama dua tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan meskipun cenderung mengalami penurunan. Selama dua tahun terakhir, baik tahun 2017 maupun 2016, rata- rata lama bepergian wisatawan nusantara adalah 3,85 hari dan 3,87, atau sedikit menurun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 6.7 Rata-Rata Lama Bepergian Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2017 (Hari)



Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Wisatawan yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara cenderung bepergian dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan wisnus dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Rata-rata lama bepergian dari ke empat provinsi ini berkisar antara 7,63 hingga 14,07 hari. Sedangkan wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, rata-rata lama bepergiannya hanya sekitar 2 hingga 5 hari. Apabila dilihat dari provinsi yang menjadi tujuan utama, wisatawan yang melakukan perjalanan ke Provinsi Papua Barat, dan Maluku juga cenderung lebih lama waktu bepergiannya. Rata-rata lama bepergian wisatawan nusantara yang berkunjung ke provinsi tersebut mencapai sekitar 7 hingga 12 hari, sedangkan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dengan tujuan ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa hanya sekitar 2 hingga 6 hari.

6.1.1.7. Rata-Rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran setiap perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara dalam melakukan kunjungan ke berbagai wilayah-wilayah di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sebesar 935,84 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pada tahun 2016 hanya sekitar 914,3 ribu rupiah. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 2,36 persen dibandingkan tahun 2016.

Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran yang terbesar adalah wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur. Rata-rata pengeluaran wisatawan asal Provinsi Papua Barat dan Papua mencapai lebih dari 5 juta rupiah setiap kunjungan. Di sisi lain, wisatawan yang berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pengeluarannya hanya sekitar 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah.

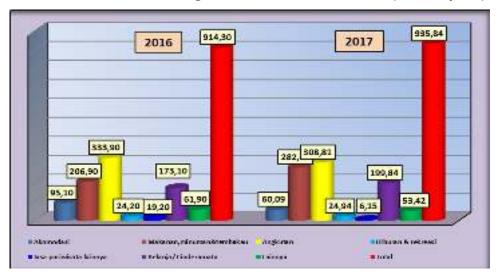
Komposisi pengeluaran yang dilakukan wisatawan nusantara baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017, memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai angkutan (sebesar 36,5 persen pada 2016 dan 33,00 persen pada 2017). Rata-rata pengeluaran per kunjungan untuk angkutan mencapai sebesar 308,81 ribu rupiah atau terjadi penurunan sekitar 7,51 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 333,90 ribu rupiah.

Sementara itu, pengeluaran wisnus untuk membeli makanan, minuman, dan tembakau dalam melakukan perjalanan mencapai sekitar 30,20 persen dari total pengeluaran atau rata-rata sebesar 282,60 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 36,59 persen dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 206,90 ribu rupiah.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan wisnus untuk berbelanja dan pembelian cinderamata adalah sekitar 199,84 ribu rupiah, atau sekitar 21,35 persen dari rata-rata pengeluaran total wisnus.Pengeluaran untuk berbelanja dan pembelian cinderamata mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 173,10 ribu rupiah. Rata-rata pengeluaran untuk akomodasi

menyumbang proporsi sekitar 6,42 persen atau kira-kira sekitar 60,09 ribu rupiah

Gambar 6.8 Rata-Rata Pengeluaran Per Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2017 (000 Rupiah)



Sumber: Publikasi Kajian Data Pasar Wisnus, 2017

Berdasarkan informasi dari Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017, membuktikan bahwa aktivitas pariwisata sudah mulai berkembang. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan aktivitas pariwisata menjadi salah satu alternatif dari kegiatan ekonomi yang potensial dalam membangun suatu wilayah. Dengan memberikan dukungan atas terselenggarakannya kegiatan pariwisata dengan baik, maka kegiatan tersebut diharapkan dapat mengarah menjadi aktivitas ekonomi yang handal dan mampu mendorong sektor-sektor ekonomi lain terkait.

Aktivitas pariwisata dapat berdampak pada peningkatan lapangan usaha, pendapatan masyarakat dan produksi nasional. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan infrastruktur yang cukup memadai, jaminan keamanan dan keselamatan baik jiwa maupun harta benda, dan juga memberikan informasi yang cukup memadai kepada wisatawan

6.1.2. Wisatawan Mancanegara

Pertumbuhan minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bertumbuh sangat signifikan seiring dengan semakin gencarnya kegiatan promosi dan bertumbuhnya daya tarik wisata baru di seluruh wilayah nusantara termasuk kabupaten Jeneponto.

Letak geografis kabupaten Jeneponto yang cukup strategis dalam pertimbangan wisatawan memutuskan pola perjalanan wisata yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat internasional dalam koridor wisata Toraja-Bulukumba-Selayar sebagai ikon utama daya Tarik pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan

kabupaten Jeneponto sebagai destinasi wajib dikunjungi oleh wisatawan.

Kekayaan dan keindahan alam yang sangat eksotis, keragaman budaya, keunikan tinggalan sejarah dan peradaban masyarakat masa lalu serta keramah-tamahan penduduk kabupaten Jeneponto menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan mancanegara. Hal tersebut juga ditunjang oleh kemudahan aksesibilitas dengan keragaman moda transportasi yang tersedia serta perkembangan sarana prasarana pendukung kepariwisataan lainnya yang semakin membaik menjadikan posisi kabupaten Jeneponto sebagai destinasi pariwisata nasional semakin kompetitif.

Berbeda halnya halnya dengan kunjungan wisatawan nusantara, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto menunjukkan angka yang sangat kurang bahkan cenderung belum ada. Hal ini tentu saja menjadi tugas prioritas dalam menata, mengembangkan, mengemas serta mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Jeneponto pada pasar pariwisata internasional.

6.2. Karakteristik Pasar Wisatawan Kabupaten Jeneponto

Karakteristik atau tipologi wisatawan merupakan hal yang perlu dianalisis oleh sebuah destinasi untuk mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian produk pariwisata yang tersedia dan dimiliki oleh kabupaten Jeneponto dengan preferensi minat kunjungan wisatawan sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, akan dijadikan dasar dlam pengembangannya.

Secara umum, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto adalah wisatawan yang terdistribusi dari pintu masuk utama ke kota atau provinsi lain yang melanjutkan kegiatan wisatanya di kota Makassar dan melintasi kabupaten Jeneponto sehingga dalam identifikasi karakteristik pasar harus melihat perkembangan pada wilayah tersebut.

6.2.1. Karakteristik Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto sebahagian besar adalah wisatawan bisnis dan tujuan urusan dinas, baik yang bersifat individu maupun kelompok berupa komunitas dan profesi yang berasal dari dalam provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk wisatawan nusantara, wisatawan asal pulau Jawa termasuk Jakarta merupakan pasar wisatawan yang bertumbuh sangat signifikan sehingga diperlukan strategi promosi dan pemasaran yang lebih baik. Selain itu, perlu penambahan dan perbaikan sarana transportasi darat dan laut dari berbagai jalur pelayaran baik komersil penumpang umum maupun kapal pesiar pribadi.

Berdasarkan distribusi kelompok umur, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto di dominasi oleh wisatawan pada kelompok usia 26 sampai dengan 50 tahun sebesar 64,70%, disusul oleh wisatawan kelompok usia 17 sampai dengan 25 tahun sebesar 27,03%, dan yang terkecil adalah wisatawan pada kelompok usia kurang dari 17 tahun sebesar 8,27%.

Berdasarkan data tersebut, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto merupakan wisatawan pada pada kelompok umur yang sangat produktif, matang (*mature*), selektif dan aktif. Kelompok wisatawan pada rentang usia 17 sampai dengan 50 tahun merupakan kelompok yang sangat produktif dan aktif sehingga menjadi pangsa pasar yang sangat baik dan potensial untuk berkembang.

Untuk dapat mengetahui kualitas wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto, maka penelusuran data dan informasi terhadap pekerjaan/ profesi wisatawan menjadi bagian penting dalam menganalisis kecenderungan pilihan destinasi yang diminati wisatawan. serta menjadi referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi dan atraksi wisata kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan pekerjaan dan profesi, wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto sebahagian besar adalah pegawai negeri sipil dan BUMN yaitu sebesar 60 %, disusul oleh kelompok pegawai swasta sebesar 27, %, kelompok profesional sebesar 11 % dan yang terkecil adalah kelompok mahasiswa/ pelajar yaitu hanya sebesar 2 %.

Dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dan profesional, maka dapat diyakini bahwa kemampuan daya beli terhadap produk wisata sangat kompetitif. Untuk itu kemasan paket wisata dengan daya tarik dan atraksi yang menantang, unik dan memberikan kenangan merupakan peluang yang perlu diantisipasi.

Motivasi dan tujuan kunjungan ke kabupaten Jeneponto oleh wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan sebahagian besar datang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dan rapat, yaitu sebesar 51%. Selanjutnya adalah wisatawan yang bermaksud untuk bisnis dan perdagangan sebesar 24%, wisatawan dengan aktivitas menghadiri event, seminar serta penelitian sebesar 13%, wisatawan dengan tujuan liburan sebesar 9%, dan motivasi yang paling kecil adalah mengunjungi teman, kerabat, keluarga yaitu sebesar 3%.

Jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa sebanyak 27% wisatawan merupakan kunjungan pertama ke kabupaten Jeneponto, dan sisanya sebanyak 73% telah berkunjung ke kabupaten Jeneponto sebanyak 2 sampai dengan 5 kali. Dalam hal jumlah wisatawan per kunjungan, sebanyak 16 % wisatawan melakukan kunjungan secara sendiri-sendiri, dan sisanya sebanyak 84 % melakukan kunjungan bersama keluarga atau teman dengan jumlah 2 sampai dengan 3 orang.

Besaran pendapatan dari wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan (74 %) merupakan kelompok masyarakat sejahtera dengan pendapatan antara 5,1 sampai dengan 10 juta rupiah per bulan dan hanya sebahagian kecil wisatawan yang berpenghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan.

Data dan informasi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya strategis dalam hal pengembangan kualitas serta diversifikasi produk dan destinasi serta atraksi wisata sehingga dapat memacu minat wisatawan dalam melakukan kunjungan ulang (*repeater*) dengan membawa keluarga, rekan maupun kerabat untuk menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai destinasi wisata.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh wisatawan tentang kabupaten Jeneponto, sebahagian besar wisatawan (58%) memperoleh informasi melalui penelusuran terhadap media *on-line* termasuk media sosial, disusul oleh wisatawan yang memperoleh informasi dari teman/ keluarga 24 %, dan informasi dari media lain seperti koran, majalah, buletin dan jurnal sebanyak 18%, dan tidak ada wisatawan yang memperoleh informasi tentang kabupaten Jeneponto melalui biro perjalanan wisata.

Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dalam membangun relasi dengan kantor atau perusahaan serta biro perjalanan wisata sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat dilaksanakan di kabupaten Jeneponto. Selain itu, pemanfaatan media sebagai saluran distribusi (distribution channel) dalam mempromosikan dan memasarkan pariwisata kabupaten Jeneponto perlu lebih dioptimalkan.

Sumber biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa sebanyak 27% melakukan perjalanan dengan biaya sendiri, 67% wisatawan melakukan perjalanan atas biaya kantor/ perusahaan, dan sisanya sebanyak 6% dibiayai oleh rekan, keluarga maupun kerabatnya.

Rata-rata lama kunjungan wisatawan di kabupaten Jeneponto adalah 1 hari. Sebahagian besar wisatawan (91%) belum menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai destinasi utama. Sebanyak 9% dari wisatawan yang menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai tujuan utama wisata minat khusus budaya dan sejarah, alam, dan menghadiri event tertentu yang tinggal selama 2 sampai dengan 3 hari. Lama tinggal yang terbesar yaitu 4 sampai dengan 5 hari hanya sebanyak 6,51% yaitu kelompok wisatawan dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis di kabupaten Jeneponto.

Jenis akomodasi yang digunakan wisatawan selama melakukan kunjungan di kabupaten Jeneponto menunjukkan pilihan yang bervariasi. Sebahagian besar wisatawan (63%) lebih menyukai menginap di hotel. Selain itu, terdapat 37% responden dikategorikan visitor karena waktu kunjungan di kabupaten Jeneponto kurang dari 24 jam.

Besarnya pengeluaran wisatawan per hari selama melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto sangat bervariasi dengan rata-rata sebesar Rp. 550.000. Distribusi pengeluaran

terbesar untuk wisatawan adalah akomodasi, kemudian makan minum, transportasi, serta cinderamata.

Jika kecenderungan minat wisatawan dalam beraktivitas atau menikmati daya tarik destinasi pada saat melakukan kunjungan di tempat lain dikorelasikan dengan motivasi dan rencana aktivitas mereka pada saat melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto menunjukkan hubungan yang signifikan.

Selain aktivitas wisata yang dilakukan wisatawan, jenis atraksi wisata yang paling diminati oleh wisatawan nusantara adalah panorama pantai khususnya pada sore hari (*sunset*) dan panorama pemandangan alam pegunungan di kawasan Rumbia dan hutan Mangrove di kawasan Tarowang.

Pilihan wisatawan terhadap kuliner dan minuman yang paling diminati selama melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa sebahagian besar wisatawan memilih makanan dan minuman tradisional coto Kuda dan Lammang. Pilihan tersebut lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya restoran dan rumah makan yang layak (representatif) dan menjual makanan dan minuman tradisional serta terbatasnya kreativitas masyarakat dan pengusaha restoran dalam mengembangkan produk kuliner.

Tanggapan wisatawan terhadap ketersediaan makanan dan minuman tradisional menunjukkan terbatasnya pilihan terhadap tempat penjualan produk kuliner selain coto kuda. Restoran, rumah makan dan warung yang menyediakan kuliner tradisional lainnya kurang layak dari sisi kenyamanan dan kebersihan.

Dalam hal cinderamata menunjukkan bahwa wisatawan nusantara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto lebih cenderung membeli cinderamata berupa buah mangga dan srikaya/ sirsak, serta produk khas Jeneponto seperti bawang, garam dan tuak manis.

6.2.2. Karakteristik Wisatawan Mancanegara

Untuk wisatawan mancanegara, kecenderungan minat terhadap atraksi dan aktivitas wisata yang tertinggi adalah aktivitas wisata alam seperti panorama pegunungan dan pantai. Selain itu, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang banyak mempekerjaan konsultan asing menyebabkan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, walaupun sebagian dari mereka lebih senang untuk tinggal di kota Makassar.

Mengingat keberadaan kabupaten Jeneponto belum menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan mancanegara sehingga karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto digeneralisasi berdasarkan karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Makassar. Berdasarkan analisis profil wisatawan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang profil umum dan kecenderungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto berdasar kelompok dan karakter tertentu, sebagai berikut:

a. Wisatawan Malaysia:

Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 42 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.
- 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, kunjungan keluarga dan wisata religi.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, ziarah, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri, dan melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok.
- 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 4 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 95 atau US\$. 375 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

b. Wisatawan Singapura

Adapun karakteristik wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia produktif antara 35 sampai dengan 45 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional dan pegawai.
- 2) Motif kunjungan adalah MICE, bisnis, dan belanja.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah pertemuan, kuliner, golf, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 4) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara sendiri-sendiri.
- 5) Menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, khususnya dalam pelaksanaan *meeting* dan bisnis
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$.115 atau US\$. 350 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

c. Wisatawan Jerman

Adapun karakteristik wisatawan asal Jerman yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia cukup produktif antara 35 sampai dengan 50 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional.
- 2) Motif kunjungan adalah berlibur.
- 3) Aktivitas utama yang diminati adalah atraksi budaya, pantai dan pulau, kuliner, dan belanja
- 4) Sangat peka terhadap kualitas akomodasi, keramahan, pelayanan, dan keunikan lokal
- 5) Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata secara berkelompok dan sendiri-sendiri.
- 6) Belum menjadikan kota Makassar sebagai destinasi utama, keberadaan di kota Makassar hanya transit

- sebelum atau setelah melakukan perjalanan ke Tana Toraja, atau Bulukumba.
- 7) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 2 malam.
- 8) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 68 atau US\$. 130 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

d. Wisatawan China

Adapun karakteristik wisatawan asal China yang berkunjung ke kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Berusia cukup produktif antara 30 sampai dengan 55 tahun, dan sebahagian besar merupakan profesional, militer dan pegawai.
- 2) Aktivitas utama yang diminati adalah kuliner, wisata alam, spa, hiburan malam, dan belanja.
- 3) Motif kunjungan adalah liburan, bisnis, kuliner dan belanja.
- Sebahagian besar merencanakan dan melakukan perjalanan sendiri secara berkelompok melalui biro perjalanan wisata.
- 5) Membutuhkan *guide* khusus berbahasa mandarin.
- 6) Rata-rata lama tinggal di kota Makassar adalah 3 malam.
- 7) Pengeluaran rata-rata di kota Makassar sebesar US\$. 123 atau US\$. 500 per kunjungan (tidak termasuk biaya transportasi kedatangan dan keberangkatan).

6.3. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Program dan kegiatan pemasaran kabupaten Jeneponto yang belum optimal menyebabkan belum terjadinya pemasaran terintegrasi secara optimal dalam konteks keseluruhan wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah wilayah yang akan dikembangkan sebagai destinasi unggulan regional Sulawesi Selatan, destinasi pariwisata nasional dengan skala internasional, diperlukan strategi pemasaran pariwisata yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

Kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan brosur, *flyer* dan buku informasi kepariwisataan yang belum secara optimal memberikan informasi komprehensif terhadap kepariwisataan kabupaten Jeneponto.
- Pengembangan web-site kepariwisataan yang secara umum belum mampu mengetengahkan informasi yang komprehensif terkait dengan kepariwisataan kabupaten Jeneponto.
- c. Pengembangan event-event budaya sebagai bentuk promosi pariwisata yang belum secara signifikan mampu menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto.
- d. Peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi pariwisata kabupaten Jeneponto belum optimal.

- e. Calendar of Event pariwisata kabupaten Jeneponto belum tersusun secara komprehensif untuk dijadikan acuan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanannya
- f. Identifikasi kesesuaian produk dan pasar terlaksana dengan baik.
- g. Keterbatasan pusat informasi kepariwisataan serta rendahnya kualitas bahan informasi pariwisata kabupaten Jeneponto.

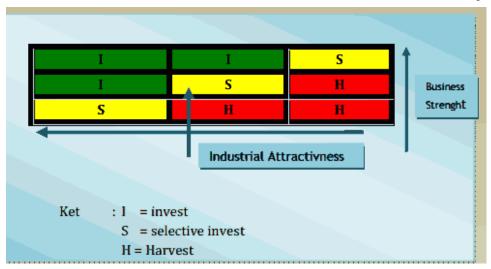
Sebagai sebuah destinasi pariwisata yang sedang berkembang dan belum dikenal oleh pasar wisatawan, peningkatan awareness merupakan langkah utama yang harus dikembangkan dalam pemasaran kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan motivasi wisatawan terhadap kekayaan sumber daya dan potensi daya Tarik wisata di kabupaten Jeneponto sehingga diharapkan akan berimplikasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto sebagai destinasi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pembentukan citra destinasi (destination image). Citra Destinasi menggambarkan keseluruhan ekosistem pariwisata meliputi citra kognitif dan citra afektif yang merupakan bagian dari identitas destinasi melalui pembentukan produk wisata yang unik dan membedakannya dari destinasi lainnya dan membentuk persepsi wisatawan.

Kualitas informasi dapat mempengaruhi efektivitas pemasaran kepada target pasar, mengingat fungsinya sebagai alat pemasaran maupun sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan interaktif. Sejalan dengan perkembangan peradaban yang didominasi oleh kontribusi teknologi informasi, maka pemanfaatan media *on-line* (digitalisasi) menjadi sangat dominan dalam pemasaran pariwisata. Ekspektasi pasar terhadap ketersediaan dan kualitas informasi kawasan melalui media *on-line* berdampak pada keharusan pemerintah, pengusaha dan masyarakat kabupaten Jeneponto untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran pariwisata.

Analisis kekuatan bisnis pariwisata kabupaten Jeneponto melalui dengan daya tarik potensi pariwisata dapat dianalisis melalui matriks Mc Kinsey berikut ini:

Gambar 6.9 Matriks Mc. Kinsey



Sumber: Mc. Kinsey Analysis

Posisi kepariwisataan kabupaten Jeneponto saat ini berada pada kolom I (*invest*) yaitu kegiatan pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto harus ditata dan dibangun dengan investasi dalam upaya perbaikan-perbaikan di berbagai aspek. Manifestasi dari strategi dasar tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber kompetitif yang terdapat pada aspek nilai beda/daya tarik dan komitmen stakeholders.
- 2) Penciptaan kebijakan dan iklim Investasi di bidang pariwisata yang mampu menarik minat investor.
- 3) Perencanan pengembangan pariwisata yang berimbang antara manfaat (*benefit*) dan korbanan (*cost*) yang dihasilkan.
- 4) Perluasan akses masyarakat lokal dalam investasi pariwisata

Berdasarkan strategi dasar tersebut, maka untuk menyelaraskan antara strategi pengembangan produk dan pasar dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa langkah stratejik yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetrasi Pasar (*Market Penetration*), yang ditujukan untuk mendayagunakan atau mengoptimumkan kapasitas produk dan pasar yang ada. Saat ini, kabupaten Jeneponto hanya dikenal sebagai dengan wisata alam pegunungan dan air terjun dengan daya tarik utama adalah Bossolo dan Rumbia. Sementara potensi yang dimiliki sangat besar dalam potensi wisata sejarah dan budaya serta potensi pulau dengan panorama pantai yang sangat variatif. Maka langkah penetrasi pasar yang dilakukan adalah dengan menggiatkan kegiatan pariwisata pada pasar existing, namun lebih mengetengahkan bahari, wisata sejarah dan budaya
- b. Pengembangan Produk (*Product Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan produk-produk baru bagi pasar yang ada saat ini. Misalnya, dengan mengembangkan

kegiatan wisata *leisure and experience*, berupa pembangunan wisata bahari, geowisata, *eco heritage*, maupun *eco beach* atau kegiatan wisata lain termasuk mengangkat potensi wisata bahari lain yang potensial di kabupaten Jeneponto.

- c. Pengembangan Pasar (*Market Development*), yang ditujukan untuk mengembangkan pasar wisatawan baru agar berkunjung ke kabupaten Jeneponto dan menikmati produk wisata yang telah berkembang saat ini maupun yang akan dikembangkan. Pasar tersebut dapat berasal dari pasar wisata nusantara maupun pasar wisata mancanegara dengan melakukan promosi pada daerah-darah yang secara geografis merupakan pintu masuk aksesibilitas wisatawan ke kabupaten Jeneponto.
- d. Diversifikasi Produk (*Product Diversification*), yang ditujukan untuk menciptakan produk dan pasar yang baru bagi pariwisata kabupaten Jeneponto. Strategi ini utamanya ditujukan bagi pasar Internasional maupun *niche market* (eco, sejarah dan budaya, MICE).

Berdasarkan kajian pada masing-masing aspek pemasaran tersebut, perlu diterapkan beberapa prinsip-prinsip pengembangan pemasaran kepariwisataan sebagai berikut:

a. Memahami Profil Pasar Sasaran

Pengamatan terhadap pasar dibutuhkan untuk dapat mengembangkan produk-produk pariwisata yang menarik dan mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan pasar wisatawan. Utamanya untuk menciptakan produk dan pelayanan pariwisata yang dapat menciptakan kepuasan wisatawan. Selain itu, pemahaman terhadap profil pasar sasaran dapat mengarahkan desain produk wisata agar pengalaman wisatawan dalam berwisata menjadi semakin berkesan sehingga sektor pariwisata semakin maju dan unggul. Pemahaman terhadap profil pasar sasaran juga akan semakin meningkatkan harmonisasi produk pariwisata dengan kegiatan pemasaran pariwisata.

b. Peningkatan Kualitas Produk Wisata

Kualitas pariwisata ditentukan oleh keberadaan produk wisata yang bersifat nyata (tangible) dan pelayanan (intangible) yang secara keseluruhan bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia yang mengelola dan yang memberikan pelayanan terhadap wisatawan. Oleh sebab itu, kualitas pariwisata yang unggul dapat dipicu melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan penerapan standar usaha pariwisata.

c. Pengembangan Inovasi

Inovasi berupa pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas yang menghasilkan nilai tambah dan daya saing merupakan salah

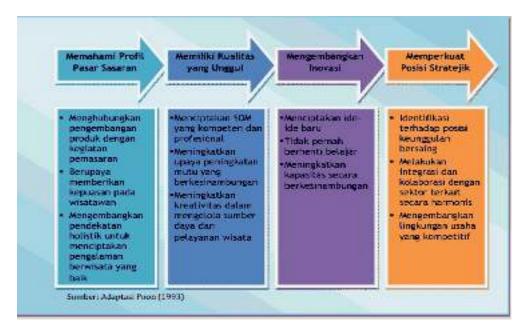
satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Inovasi dimulai dari pengembangan ide dan gagasan kreatif untuk menghasilkan identitas (*branding*) sebagai ciri pembeda kepariwisataan kabupaten Jeneponto. Hal tersebut diperoleh dari proses belajar yang terus menerus dari segenap *stakeholders* yang terlibat didalam pengembangan kepariwisataan. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata harus dapat memfasilitasi proses belajar, bertumbuh, dan berkembang bagi seluruh *stakeholders* yang terkait.

d. Penguatan Posisi Stratejik

Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan bersaing dengan destinasi lain di Indonesia. Oleh sebab itu kabupaten Jeneponto harus mampu mengidentifikasi faktor keunggulan sekaligus mengeliminir kekurangan serta memantapkan posisinya untuk dapat bersaing dengan destinasi lain dengan memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut terdapat pada Gambar berikut ini:

Gambar 6.1 Prinsip dan Langkah Stratejik Pengembangan Daya Saing Pariwisata



вав - 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

Perubahan paradigma sistem pemerintahan pada era otonomi daerah memberikan peluang dan ruang kepada pemerintah kabupaten Jeneponto untuk merencanakan dan mengelola pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Tuntutan terhadap partisipasi aktif dari seluruh komponen yang dikenal dengan peristilahan *pentahelix* pembangunan pariwisata yang terdiri dari unsur akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah dan media (ABCGM) dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto, mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat dari diangkat sebagai bagian dari potensi pariwisata yang dikembangkan.

Pelibatan komponen kelembagaan kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata dalam mewujudkan peningkatan daya saing kepariwisataan kabupaten Jeneponto sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang secara akumulatif menyebabkan masing-masing pihak masih berjalan secara sendiri-sendiri.

7.1 Unsur Akademisi (*Academician*)

Unsur akademisi merupakan komponen yang memegang peran penting dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto. Pihak perguruan tinggi memiliki tugas pokok dalam melaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat di bidang pariwisata seharusnya secara terpadu dan berkelanjutan melaksanakan sinergi program khususnya dalam membantu unsur lainnya (pemerintah, masyarakat, pengusaha) dalam menyampaikan hasil-hasil kajian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten Jeneponto.

Selain hal tersebut, unsur akademisi juga bertanggungjawab dalam membuat program dan jenjang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat mendorong ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan kompeten pada tingkat pelaksana dan manajerial dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan daya saing industri dan destinasi pariwisata kabupaten Jeneponto.

Kajian-kajian ilmiah serta program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang dilakukan oleh unsur akademisi, selanjutnya dikomunikasi kepada unsur media sehingga

penyebarluasan informasi kepada masyarakat termasuk wisatawan tentang ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata kabupaten Jeneponto dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Saat ini di kabupaten Jeneponto telah berdiri beberapa perguruan tinggi antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Amanah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPNAS, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YAPTI, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YAPTI, . Dari keseluruhan perguruan tinggi tersebut, belum ada yang membuka jurusan atau program studi kepariwisataan. Demikian pula halnya dengan satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah, terdapat 7 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) namun belum ada Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pariwisata sebagai wadah pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pariwisata di kabupaten Jeneponto.

Selain potensi unsur akademisi yang berada di kabupaten Jeneponto, pemerintah daerah kabupaten Jeneponto juga menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendukung berbagai program pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto seperti pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sertifikasi usaha serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata.

7.2 Unsur Birokrasi (Government)

Unsur birokrasi merupakan komponen yang sangat dominan dan menentukan arah pembangunan kepariwisataan. Melalui pengkajian dan penyusunan kebijakan yang efektif, maka arah pelaksanaan pengembangan pariwisata akan terwujud secara efektif dan efisien serta menjadi acuan bagi seluruh komponen kepariwisataan yang ada (stakeholders) dalam merencanakan dalam melaksanakan kegiatan menurut tugas dan tanggungjawab para pihak.

Peran birokrasi dalam pembangunan kepariwisataan di kabupaten Jeneponto belum berjalan secara optimal dan masih bertumpu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, sementara dalam pembangunan kepariwisataan yang baik harus melibatkan seluruh komponen birokrasi menurut kewenangan yang dimiliki oleh masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Jeneponto, termasuk hubungan dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan kepariwisataan.

Beberapa komponen pariwisata yang harus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi program antara lain sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas pariwisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perluasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, pengembangan frekuensi dan pembukaan jalur pelayaran, peningkatan dan pengembangan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan kualitas akses dari dan ke destinasi dan atraksi wisata, pengembangan moda transportasi, dan sebagainya.
- b. Atraksi wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal perencanaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, penataan lingkungan pariwisata, pengembangan dan pelestarian nilai dan tinggalan sejarah budaya, dan sebagainya

- c. Aktivitas wisata, dibutuhkan koordinasi dalam hal penyediaan dan pembangunan sarana dan prasaran penunjang kegiatan wisata, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan investasi, dan sebagainya.
- d. Akomodasi, koordinasi dibutuhkan dalam hal kebijakan investasi usaha akomodasi, pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia, pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi usaha, penyediaan lahan (*land clearing*) untuk usaha akomodasi, dan sebagainya.
- e. Amenitas, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi program dalam penyediaan listrik, air bersih, sarana telekomunikasi, fasilitas perbankan, toilet umum, dermaga, fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Mengingat pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga pemerintahan dalam pembangunan pariwisata kabupaten Jeneponto, diperlukan sebuah bentuk Badan Koordinasi Pembangunan Kepariwisataan sebagai pelengkap dari Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata kabupaten Jeneponto yang belum terbentuk. Melalui keberadaan kedua badan tersebut diharapkan akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan sinergitas program antar satuan kerja perangkat daerah dengan masyarakat, pengusaha dan komponen kepariwisataan lainnya.

7.3 Unsur Masyarakat (Community)

masyarakat merupakan Unsur obyek sekaligus subyek pembangunan kepariwisataan daerah karena pengembangan kepariwisataan disesuaikan dengan ketersediaan potensi yang berasal budaya masyarakat, dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta dampaknya harus memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga arah pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto didesain berbasis masyarakat (community based tourism development)

Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksitas dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan meningkatkankan kesejahteraannya dan pada akhirnya akan mengurangi urbanisasi.

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim karena masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelola potensi pariwisata daerah atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

Pemerintah kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaab telah membentuk berbagai kelompok sadar wisata serta komunitas pendukung kepariwisataan lainnya di kabupaten Jeneponto sebagai perwujudan penyiapan masyarakat dalam mengelola dan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan. Dukungan pemerintah daerah tersebut berupa pembentukan wadah organisasi, pelatihan dan pemberdayaan, fasilitasi akses dan modal usaha, serta fasilitasi pemasaran produk dalam menunjang pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto.

Beberapa hal yang masih harus didorong adalah pembentukan komunitas usaha industri kreatif berbasis potensi daerah seperti kuliner khas kabupaten Jeneponto, kerajinan dan cinderamata, pengemasan produk kuliner, pembentukan usaha kuliner, pelestarian nilai budaya melalui pembentukan sanggar seni budaya, serta peran serta masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan potensi dan daya tarik destinasi wisata di kabupaten Jeneponto.

Selain pembentukan komunitas masyarakat pariwisata tersebut, juga diperlukan untuk membentuk asosiasi profesi pariwisata sesuai jenis profesi yang sudah ada di kabupaten Jeneponto seperti *Indonesia Hotel General Manager Association* (IHGMA), *Hotel Frontliner Association* (HAFLA), *Indonesia Housekeeping Association* (IHKA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), *Indonesia Food & Beverage Association* (IFBEC), *Indonesia Chef Association* (ICA), *My Trip My Adventure* (MTMA, Generasi Pesona Indonesia (GENPI) dan lain sebagainya. Keberadaan asosiasi profesi pariwisata tersebut akan sangat membantu mendorong dan mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Selain itu, asosiasi profesi juga akan membantu meningkatkan kualitas usaha/ industri pariwisata dan mengenalkan potensi pariwisata daerah secara nasional.

7.4 Unsur Pengusaha (*Business*)

Unsur pengusaha merupakan salah satu komponen yang menentukan perkembangan kepariwisataan kabupaten Jeneponto. Keberadaan unsur pengusaha menentukan minat kunjungan wisatawan melalui penyediaan berbagai usaha akomodasi dan aktivitas wisata lainnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pada saat melakukan kunjungan wisata di kabupaten Jeneponto.

Pariwisata memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengusaha industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Dalam menjalankan perannya, pengusaha pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri pendukung serta asosiasi industry pariwisata lainnya.

Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang ada di kabupaten Jeneponto sampai saat ini masih dikelola secara konvensiaonal sehingga berdampak pada daya saing destinasi yang masih rendah. Untuk itu perlu memacu minat investasi pengusaha pariwisata dalam mengembangkan usaha akomodasi berupa pembangunan hotel dan resort berbintang, restoran, ruang pertemuan (MICE), rekreasi dan aktivitas wisata, transportasi wisata dan lain sebagainya.

Melalui penyediaan sarana pariwisata yang baik dan berkualitas, akan mendorong minat wisatawan untuk berkunjung dan mempromosikan kabupaten Jeneponto sebagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi sorga yang memanjakan setiap wisatawan yang berkunjung.

Selain ketersediaan usaha pariwisata, keberadaan asosiasi pengusaha sebagai tempat berhimpun dan memecahkan masalah pengembangan pariwisata secara bersama-sama menjadi sebuah keharusan dalam mendukung keberlangsungan usaha/ industri pariwisata. Saat ini asosiasi pengusaha industri pariwisata yang sudah ada di kabupaten Jeneponto adalah Perhimpunan Hotel dan restoran Indonesia. pengusaha Keberadaan asosiasi bidang perhotelan tersebut bertanggungjawab dalam mengembangkan dan memelihara standar industry dan pelayanan serta memberikan saran dan ususlan kebijakan pengembangan usaha perhotelan di kabupaten Jeneponto. Untuk itu optimalisasi peran asosiasi pengusaha pariwisata perlu terus ditingkatkan dan asosiasi pengusaha pariwisata lainnya seperti ASITA, PUTRI, GAHAWISRI perlu dibentuk seiring dengan operasionalisasi usaha pariwisata tersebut di kabupaten Jeneponto.

7.5 Unsur Media (*Media*)

Unsur media memegang peran sentral yang sangat menentukan dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto. Seiring dengan perkembangan peradaban yang sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi melalui berbagai media, baik media on-line maupun off-line. Media berkewajiban untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat termasuk wisatawan.

Saat ini, peran media khususnya media *on-line* termasuk media penyiaran lokal dan nasional sudah banyak meliput dan memberitakan potensi dan daya tarik kabupaten Jeneponto sebagai salah satu destinasi

pariwisata daerah, namun intensitas dan kualitas informasi yang disampaikan masih perlu dioptimalkan.

Mengingat jumlah pengguna media sosial saat ini melonjak secara spektakuler, maka salah satu media yang perlu dioptimalkan dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepariwisataan kabupaten Jeneponto adalah pemanfaatan media sosial. Untuk itu melalui peran serta masyarakat dan komunitas media (*blogger*, dll) dengan sendirinya akan menjadi agen penyebarluasan informasi potensi dan daya tarik pariwisata kabupaten Jeneponto.

вав -

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan

Seiring dengan semakin menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara yang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang semakin membaik, menjadikan setiap daerah dengan potensi alam dan budaya yang sangat beragam mulai dilirik dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

Hal tersebut menjadikan kompetisi antar daerah kabupaten dan kota dalam provinsi Sulawesi Selatan menjadi semakin kompetitif. Tentu saja hal ini akan memberikan dampak negatif jika persaingan tersebut tidak disikapi dengan baik menjadi sebuah pola kemitraan dan integrasi bagi setiap daerah dalam bentuk pengembangan pemaketan bersama dalam pola perjalanan wisata yang menarik.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam pengembangan pariwisata antara lain sebagai berikut :

- a. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah.
 Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Jeneponto, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten Jeneponto.
- b. Degradasi lingkungan dan vandalisme.
 Sebagai kawasan wilayah pegunungan dan pulau dimana kondisi geografis wilayah kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama ini telah banyak mengalami degradasi lingkungan akibat pola hidup masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan ramah terhadap lingkungan dalam melakukan eksploitasi potensi alam sebagai sumber mata pencaharian utama keluarga dan masyarakat.
 Pola pembukaan lahan pada wilayah-wilayah konservasi serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah menurunkan dan merusak kualitas lingkungan khususnya ekosistem mangrove, dan laut sehingga menurunkan kualitas destinasi kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam

wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian pula halnya dengan pengrusakan ekosistem hutan dengan pembukaan areal hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar, menebang pohon dan melakukan alih fungsi lahan secara tidak bertanggungjawab telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, udara, air, dan memperluas daerah rawan bencana di kabupaten Jeneponto.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, menjadikan kawasan penyangga dan pelindung seperti kawasan hutan mangrove ikut terdegradasi dan berubah fungsi.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan adalah masalah sampah khususnya sampah plastik dan sampah lain yang timbul akibat pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Untuk kabupaten Jeneponto, selain sampah penduduk lokal juga pada waktu-waktu tertentu terdapat sampah kiriman di laut dari kawasan lain dari luar wilayah kabupaten Jeneponto sehingga jika pengembangan pariwisata tidak dilakukan secara terencana, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dan menjadikan kabupaten Jeneponto sebagai destinasi yang tidak menarik.

c. Koordinasi lintas sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

Sampai saat ini, koordinasi antar SKPD dalam pemerintahan daerah kabupaten Jeneponto, kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lain di sekitarnya di dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lain di sekitarnya di luar wilayah provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Jeneponto dengan pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto dengan kabupaten lain di sekitarnya dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan belum bersinergi dengan baik.

d. Regulasi yang kontraproduktif.

Regulasi merupakan salah satu masalah klasik yang dihadapi khususnya dalam hal relevansi dan tumpang tindihnya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.

Selain tumpang tindih kebijakan, juga terdapat banyak kebijakan yang tidak relevan dalam mendorong pembangunan pariwisata daerah seperti kebijakan investasi, pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan wilayah laut, pantai dan pesisir, dan sebagainya.

Masih banyak ditemukan regulasi yang tidak sinkron dengan regulasi lainnya atau regulasi yang secara operasional menimbulkan resistensi pada masyarakat ataupun regulasi yang tidak dapat diimplementasikan.

e. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah di sekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan kabupaten Jeneponto salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sector andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dermaga, transportasi laut dan darat serta hampir seluruh jenis infrastruktur utama dalam pembangunan kepariwisataan masih sangat terbatas dari sisi jumlah dan kualitas.

Selain itu, infrastruktur dasar yang menghubungkan antara daya Tarik wisata baik wilayah daratan dan kepulauan juga belum tersedia dengan baik. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

f. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintahan maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan dengan optimal.

Pada sektor swasta khusnya pada usaha/ industri pariwisata, rendahnya kualitas sumberdaya manusia lebih banyak disebabkan oleh kualitas indistri pariwisata yang masih berskala kecil sehingga belum menarik minat tenaga kerja professional untuk bekerja pada industri pariwisata di kabupaten Jeneponto.

Keberadaan SMK pariwisata juga masih menyelenggakan program dan jenjang pendidikan yang sangat terbatas dengan fasiliutas dan tenga pendidik yang terbatas pula sehingga kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata belum optimal. Di sisi lain, putra-putri terbaik kabupaten Jeneponto yang menimba ilmu pada pendidikan tinggi dan vokasi di luar kabupaten Jeneponto, selanjutnya enggan kembali untuk bekerja di kabupaten Jeneponto karena pertimbangan kualitas industri dan usaha yang masih kecil serta pendapatan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan mereka pada industri yang lebih besar dan daerah yang lebih maju dalam pembangunan pariwisatanya.

g. Investasi pariwisata yang masih terbatas

Investasi pariwisata yang ada di kabupaten Jeneponto saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/ industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya.

Hal ini mengakibatkan rendah kualitas industri/ usaha pariwisata yang ada. Bentuk dan desain bangunan yang tidak sesuai, ketersediaan fasilitas yang sangat terbatas, serta desain interior yang kurang menarik.

Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan investasi yang dapat menarik

minat investor dalam menanamkan modal dan membangun usaha pariwisata di kabupaten Jeneponto sehingga akan meningkatkan daya saing destinasi sekaligus mendorong minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto.

h. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai. Mengacu pada prinsip promosi *Destination-Origin-Timeline* (DOT), sejatinya kabupaten Jeneponto mampu mengidentifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan sediaan produk yang dimiliki saat ini. Jika pintu masuk utama wisatawan ke kabupaten Jeneponto adalah kota Makassar, maka sebaiknya kabupaten Jeneponto melakukan *branding* dan promosi di bandara dan tempat-tempat strategis di kota Makassar atau kota-kota lain yang menjadi pintu masuk wisatawan ke kabupaten Jeneponto.

Digitalisasi pemasaran pariwisata juga belum dilakukan secara optimal serta pelibatan masyarakat untuk ikut mempromosikan potensi kabupaten Jeneponto melalui media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Hal lain yang perlu menjadi prioritas adalah pembuatan *branding* dan *tag-line* promosi dan pemasaran pariwisata kabupaten Jeneponto sehingga lebih mudah diingat, dikenal dan menarik untuk dikunjungi. Pembuatan *branding* dan *tag-line* pariwisata harus dibuat bersesuaian dengan visi dan misi pembangunan serta sistem nilai masyarakat Jeneponto.

8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

Prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Jeneponto, yaitu "Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dengan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera".

Berdasarkan Visi pemerintah kabupaten Jeneponto tersebut, maka visi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah "Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religious, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera".

Dari tatanan tersebut, menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan kabupaten Jeneponto terdapat 4 prinsip utama yang harus diwujudkan, yaitu :

a. Mengembangkan pariwisata yang tangguh dan berdaya saing;
Dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan kabupaten Jeneponto, dimana gabungan potensi alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terdiri dari wilayah perairan berupa pulau, laut, dan pantai, wilayah pegunungan, hutan,air terjun, gua, sawah, kebun dan sungai, serta potensi sejarah dan budaya pada akhirnya memposisikan kabupaten Jeneponto

sebagai destinasi yang unggul dan berdaya saing pada potensi wisata, alam, budaya dan minat khusus berbasis ekologi.

Berdasarkan potensi alam tersebut, masyarakat kabupaten Jeneponto menempatkan sumber ekonomi utama dari hasil perikanan sebagai nelayan dan perkebunan serta pertanian sehingga pola dan cara hidup masyarakat ini yang harus dioptimalkan dengan mengintegrasikannya sebagai daya tarik wisata.

Beberapa konteks kehidupan masyarakat maritim yang menarik untuk menjadi daya tarik wisata adalah pengembangan perkampungan nelayan, desa wisata, area bumi perkemahan (camping ground), kuliner tradisional, keterampilan kerajinan, kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan, pengembangan destinasi wisata pantai, pulau dan laut.

b. Berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, dan kebudayaan Pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang sarat dengan kekayaan sumberdaya alam, sejarah dan budaya sehingga peran pariwisata sebagai media pelestarian alam, lingkungan serta sejarah dan budaya harus diwujudkan.

Keuntungan ekonomis yang diperoleh dari penerimaan sektor pariwisata yang tidak berorientasi pada pelestarian alam, lingkungan, sejarah dan akar budaya masyarakat Jeneponto, tentu saja tidak sebanding dengan kerusakan alam dan karakter budaya masyarakat Jeneponto. Untuk itu dibutuhkan peran serta dan kepedulian dari seluruh komponen masyarakat untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.

Kabupaten Jeneponto juga sarat dengan tinggalan sejarah dan nilai budaya luhur masyarakat sehingga pengembangan pariwisata harus menjamin tumbuh dan lestarinya budaya masyarakat maritim dalam pengemasan paket dan atraksi wisata.

Berbagai jenis artefak dan tinggalan sejarah serta kebudayaan masyarakat masa lampau yang masih terpelihara dalam hidup dan kehidupan masyarakat kabupaten Jeneponto saat ini harus memperoleh ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Jeneponto

c. Berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat;

Pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pola keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi dengan mengedepankan sebesar-besar untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Pariwisata yang dibangun harus ramah lingkungan dan membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat kabupaten Jeneponto untuk terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan perlindungannya melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

Eksploitasi lingkungan alam, sosial dan budaya yang berlebihan serta berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah dan dihindari. Untuk itu, 2 (dua) prinsip utama dalam pengembangan

pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development) dan pariwisata berkelanjutan (sustainability tourism development) menjadi mutlak untuk diintegrasikan dan menjadi dasar pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto.

d. Berlandaskan pada nilai religius agama dan kepercayaan;

Masyarakat kabupaten Jeneponto dikenal sebagai masyarakat yang religius dan melandaskan hidup dan kehidupannya pada nilainilai agamais yang dianut. Mayoritas penduduk kabupaten Jeneponto adalah penganut agama Islam sehingga pembangunan pariwisata harus direncanakan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyakat.

Pembangunan pariwisata tidak boleh bertentangan apa lagi berpotensi merusak sendi-sendi agama dan kepercayaan masyarakat. Interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan harus menjamin terpeliharanya nilai moralitas masyarakat sehingga asosiasi dan asimilasi budaya dari luar harus mampu memperkuat aspek agama dan kepercayaan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan sistem nilai masyarakat kabupaten Jeneponto antara lain adalah :

- Pengwilayahan kawasan pulau, pantai, hutan mangrove, dan kawasan pegunungan sesuai peruntukan wisatawan, karena karakteristik dan gaya hidup wisatawan asing dengan masyarakat lokal sangat berbeda.
- 2) Pengembangan produk kuliner dan minuman yang disediakan untuk wisatawan harus diyakini bersesuaian dengan kehidupan masyarakat religius sehingga harus halal dan bebas alkohol.
- 3) Penataan desa wisata atau *homestay* yang dapat menjamin perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan perempuan).

8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisataan

Konsep pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto disusun berdasarkan integrasi dan arahan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto.

8.3.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Jeneponto merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rumusan tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- 1. Visi dan misi wilayah kabupaten;
- 2. Karakteristik wilayah kabupaten;
- Isu strategis;
- 4. Kondisi obyektif yang diinginkan.

Kriteria yang digunakan dalam perumusan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

- Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang provinsi dan nasional;
- 2. Jelas dan dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan;
- 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian di atas, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jeneponto dirumuskan sebagai berikut :

"mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pengembangan wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi, mengoptimalkan sumberdaya lahan yang ada, dan mengatasi masalah sumberdaya air pada lahan budidaya melalui penciptaan peluang alokasi investasi secara efisien, bersinergi antar wilayah, dan optimalisasi sumberdaya wilayah yang ada menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat".

8.3.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Jeneponto, terdiri atas :

- a. Pengembangan sistem perkotaan;
- b. Pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. Pengelolaan dan pemantapan Kawasan lindung;
- d. Pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung;
- e. Pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi dan Tsunami, dan gerakan tanah dan longsor;
- f. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya;
- g. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. Pengembangan potensi perekonomian daerah;
- i. Pengembangan kawasan strategis provinsi (KSP) Sulawesi Selatan;

- j. Pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK) Jeneponto;
- k. Penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema intekoneksitas lainnya);
- 1. Pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

8.3.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten Jeneponto merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi penataan ruang Kabupaten Jeneponto, terdiri atas :

- 1. Strategi pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pengembangan wilayah, terdiri dari:
 - a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- 2. Strategi pengembangan infrastruktur wilayah kabupaten, terdiri dari:
 - Pengembangan sistem prasarana transportasi, yang terdiri dari pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan kereta api; pengembangan pelabuhan, pengembangan sistem angkutan umum massal; dan pengembangan sarana transportasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan DAS, meliputi pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
 - c. Pengembangan air bersih yaitu peningkatan kualitas air bersih dan cakupan pelayanan air bersih;
 - d. Pengembangan sistem drainase;
 - e. Pengembangan prasarana energi;
 - f. Pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - g. Pengembangan sistem persampahan (pengembangan fasilitas pengelolaan sampah);
 - h. Pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang terdiri dari kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman; dan kebijakan pengembangan sistem pengolahan air limbah;
- 3. Strategi pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung, terdiri dari:
 - a. Pemantapan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;
 - Peningkatan kualitas ekologi kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku.

- 4. Strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung, terdiri dari:
 - a. Pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung;
 - b. Pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang berpotensi dan rawan bencana alam.
- 5. Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi, Tsunami, dan gerakan tanah, terdiri dari:
 - a. Perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
 - b. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah;
 - c. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi Tsunami di sepanjang pesisir;
 - d. Penyusunan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana.
- 6. Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari:
 - a. Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung terutama pada zona atas (perbukitan/pegunungan) wilayah kabupaten melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi:
 - b. Pengembangan kegiatan pertanian dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - c. Pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian perairannya;
 - d. Pengembangan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan dan berpedoman pada *good mining practices* dan prinsip pertambangan yang baik dan benar;
 - e. Pengembangan kegiatan pariwisata dengan cara intensifikasi promosi ODTW dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - f. Mendorong pengembangan kawasan siap bangun untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu.

- 7. Strategi pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum, terdiri dari:
 - a. Pengembangan inventarisasi asset;
 - b. Penyebaran infrastruktur;
 - c. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- 8. Strategi pengembangan potensi perekonomian daerah, terdiri dari:
 - a. Promosi investasi, aplikasi teknologi, dan penciptaan iklim usaha yang baik;
 - b. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.
- 9. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
 - a. Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Suaka Margasatwa Komara;
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Migas Blok Karaengta.
 - c. Pengembangan program koordinasi perlindungan kawasan dengan kabupaten sekitar.
- 10. Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
 - a. Pengembagan Kawasan Strategis Industri Malasoro dan sekitarnya;
 - b. Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT);
 - c. Pengembangan Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara;
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agro-minapolitan;
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis (Rencana) Bendungan Kelara-Karaloe;
 - f. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis Pesantren.
 - g. Pengembangan Kawasan strategi BINTARU (Binamu, Batang dan Tarowang).
- 11. Strategi penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema intekoneksitas lainnya), terdiri dari:
 - a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi, dan pemasaran potensi

- sumberdaya dan produk-produk lokal untuk menibkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional, serta:
- c. Pengembangan kerjasama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan prokduktivitas dan kualitas produk-produk daerah.

12. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:

- a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dilaksanakan secara terpadu dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya;
- b. Perlindungan *lahan pertanian pangan berkelanjutan* (irigasi teknis dan lahan kelas satu untuk pertanian pangan);
- c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten:
- d. Penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
- e. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana;
- f. Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perUndang-Undangan.
- 13. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
 - c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara

8.4 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kepariwisataan

8.4.1 Visi Pembangunan Kepariwisataan

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian visi pembangunan kabupaten Jeneponto secara umum. Oleh karena itu, rumusan Visi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah "Terwujudnya Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus Berbasis Ekologi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Religious, Tangguh, Berdaya Saing dan Berkesinambungan Sebagai Pilar Perekonomian Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera"

8.4.2 Misi Pembangunan Kepariwisataan

Untuk mewujudkan visi pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto tersebut di atas, maka rumusan misi pengembangan pariwisata disusun bersesuaian dengan komponen utama dalam pembangunan pariwisata, yaitu :

- a. Mengembangkan Produk Pariwisata;
- b. Membangun Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata;
- d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jati Diri Masyarakat Sinjai; dan
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan.

8.4.3 Tujuan Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan misi pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata kabupaten Jeneponto yaitu :

- a. Mengembangkan destinasi di Kabupaten Jeneponto yang berdaya saing;
- b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Jeneponto sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi;
- Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis ekologi;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata;
- g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke Kabupaten Jeneponto;
- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata kabupaten Jeneponto ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto;
- j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan

k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

8.4.4 Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Berdasarkan tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto, maka berikut ini adalah sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata,pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
- b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
- c. Meningkatan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk dan atraksi wisata;
- d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
- f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

вав -9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten Jeneponto tidak lepas dari kebijakan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Jeneponto, dengan arah Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. Pengembangan sistem perkotaan;
- b. Pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. Pengelolaan dan pemantapan Kawasan lindung;
- d. Pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung;
- e. Pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi dan Tsunami, dan gerakan tanah dan longsor;
- f. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya;
- g. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. Pengembangan potensi perekonomian daerah;
- i. Pengembangan kawasan strategis provinsi (KSP) Sulawesi Selatan;
- j. Pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK) Jeneponto;
- k. Penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema intekoneksitas lainnya);
- Pengendalian pemanfaatan ruang;
 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana direduksi dari kebijakan pengembangan pariwisata, dikemukakan sebagai berikut :

 a. Strategi pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pengembangan wilayah, terdiri dari:

- 1) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- Strategi pengembangan infrastruktur wilayah kabupaten, terdiri dari:
 - a) Pengembangan sistem prasarana transportasi, yang terdiri dari pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan dan kereta api; pengembangan pelabuhan, pengembangan sistem angkutan umum massal; dan pengembangan sarana transportasi;
 - Pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan DAS, meliputi pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah;
 - c) Pengembangan air bersih yaitu peningkatan kualitas air bersih dan cakupan pelayanan air bersih;
 - d) Pengembangan sistem drainase;
 - e) Pengembangan prasarana energi;
 - f) Pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - g) Pengembangan sistem persampahan (pengembangan fasilitas pengelolaan sampah);
 - Pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang terdiri dari kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman; dan kebijakan pengembangan sistem pengolahan air limbah;
- b. Strategi pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1) Pemantapan fungsi kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan;
 - Peningkatan kualitas ekologi kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku.
- c. Strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung, terdiri dari:
 - Pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung;
 - 2) Pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan lindung yang berpotensi dan rawan bencana alam.
- d. Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam banjir, gempa bumi, Tsunami, dan gerakan tanah, terdiri dari:
 - 1) Perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir;
 - 2) Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan

- penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah;
- 3) Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk meminimasi dampak areal berpotensi Tsunami di sepanjang pesisir;
- 4) Penyusunan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana.
- e. Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang meliputi kawasan budidaya kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari:
 - Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung terutama pada zona atas (perbukitan/ pegunungan) wilayah kabupaten melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi;
 - Pengembangan kegiatan pertanian dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - 3) Pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian perairannya;
 - Pengembangan kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan dan berpedoman pada good mining practices dan prinsip pertambangan yang baik dan benar;
 - 5) Pengembangan kegiatan pariwisata dengan cara intensifikasi promosi ODTW dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 6) Mendorong pengembangan kawasan siap bangun untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu.
- f. Strategi pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum, terdiri dari:
 - 1) Pengembangan inventarisasi asset;
 - 2) Penyebaran infrastruktur;
 - 3) Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- g. Strategi pengembangan potensi perekonomian daerah, terdiri dari:
 - Promosi investasi, aplikasi teknologi, dan penciptaan iklim usaha yang baik;
 - 2) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.

- h. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
 - 1) Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Suaka Margasatwa Komara;
 - 2) Pengembangan Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Migas Blok Karaengta.
 - 3) Pengembangan program koordinasi perlindungan kawasan dengan kabupaten sekitar.
- i. Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Jeneponto, terdiri dari:
 - Pengembagan Kawasan Strategis Industri Malasoro dan sekitarnya;
 - 2) Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT);
 - 3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Rumbia-Kelara;
 - 4) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agro-minapolitan;
 - 5) Pengembangan Kawasan Strategis (Rencana) Bendungan Kelara-Karaloe;
 - 6) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan berbasis Pesantren.
 - 7) Pengembangan Kawasan strategi BINTARU (Binamu, Batang dan Tarowang).
- j. Strategi penguatan kerjasama regional antar daerah (RM-AKSESS dan skema intekoneksitas lainnya), terdiri dari:
 - Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat:
 - 2) Pengembangan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi, dan pemasaran potensi sumberdaya dan produk-produk lokal untuk menibkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional, serta;
 - 3) Pengembangan kerjasama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan prokduktivitas dan kualitas produk-produk daerah.
- k. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - 1) Pengaturan zonasi rencana pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dilaksanakan secara terpadu dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya;

- 2) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (irigasi teknis dan lahan kelas satu untuk pertanian pangan);
- 3) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten;
- 4) Penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
- 5) Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana;
- 6) Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perUndang-Undangan.
- I. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
 - Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
 - 3) Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan: dan
 - 4) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara

Untuk mendukung strategi pembangunan kabupaten Jeneponto, dalam rencana tata ruang wilayah direncanakan struktur ruang wilayah yang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan dimaksud, terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kabupaten Jeneponto adalah di perkotaan Bontosunggu Kecamatan Binamu. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) terdiri dari PKLp Pa'biringa Kecamatan Binamu; PKLp Bungeng di Kecamatan Batang; PKLp Allu di Kecamatan Bangkala dan PKLp Tolo di Kecamatan Kelara.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) kabupaten Jeneponto terdiri atas Kawasan Rumbia di Kecamatan Rumbia; Kawasan Tarowang di Kecamatan Tarowang; Kawasan Paitana di Kecamatan Turatea; dan Kawasan Arungkeke di Kecamatan Arungkeke; dan Perkotaan Bontotangnga di Kecamatan Tamalatea. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas kelurahan Bontoramba di kecamatan Bontoramba, dan kelurahan Bulujaya di kecamatan Bangkala Barat.

9.3 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Jeneponto adalah sistem jaringan transportasi yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Sistem jaringan

prasarana utama tersebut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi laut; dan sistem jaringan kereta api.

9.3.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat kabupaten Jeneponto adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan; jaringan prasarana lalu lintas; dan jaringan layanan lalu lintas.

Jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di kabupaten Jeneponto, terdiri atas Batas Kabupaten Takalar – batas kota Jeneponto 45,786 km; jalan Lanto Dg. Pasewang di kecamatan Binamu sepanjang 3,204 km; ruas jalan Arah ke Makassar sepanjang 1,305 km; jalan Pahlawan Di kecamatan Binamu sepanjang 1,472 km; batas kota Jeneponto – batas kabupaten Bantaeng sepanjang 25,331 km; dan ruas jalan arah ke Bantaeng sepanjang 1,232 km.

Untuk jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di kabupaten Jeneponto, terdiri atas ruas batas Gowa – Boro sepanjang 0,42 km; ruas Boro - batas Bantaeng sepanjang 6,59 km; ruas Boro – Jeneponto sepanjang 33,83 km. Jaringan jalan kolektor primer dan jaringan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di kabupaten Jeneponto, terdiri atas jalan kolektor primer (K4); dan jalan lokal primer.

Rencana pengembangan jalan di kabupaten Jeneponto, terdiri atas rencana pengembangan jalan alternatif dalam kecamatan Binamu (kota Bontosunggu), bagian utara jalan kolektor eksisting dengan panjang sekitar 7,50 km; rencana pengembangan jalan alternatif primer dalam kecamatan Bontoramba menuju utara ke kabupaten Gowa dengan panjang sekitar 14,5 km; rencanan pengembangan jalan alternatif primer mulai dari kecamatan Bangkala Barat (perbatasan dengan kabupaten Takalar) melewati zona tengah: Bangkala-Bontoramba-Turatea-Batang, dengan panjang sekitar 43,5 km; rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan Bontosunggu dan sekitarnya; dan rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Jaringan prasarana lalu lintas, terdiri atas terminal penumpang tipe B terdapat di perkotaan Bontosunggu Kecamatan Binamu; terminal penumpang tipe C ditetapkan masing-masing terminal penumpang tipe C di kota Allu Kecamatan Bangkala; terminal penumpang tipe C di kota Tamanroya kecamatan Tamalatea; terminal penumpang tipe C di kota Tarowang kecamatan Tarowang; terminal penumpang tipe C di kota Tolo kecamatan Kelara. Selanjutnya terminal barang ditetapkan di terminal Pelabuhan Jeneponto di Pelabuhan Jeneponto di Kecamatan Batang, dan terminal Pelabuhan Ujung Petang di Kecamatan Arungkeke.

Jaringan layanan lalu lintas meliputi trayek angkutan barang dan angkutan penumbang, terdiri atas trayek angkutan barang; trayek penumpang antar kota antar Provinsi (AKAP); trayek angkutan penumpang kota dalam propinsi (AKDP); dan trayek angkuatn pedesaan.

9.3.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut kabupaten Jeneponto meliputi tatanan kepelabuhanan; dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan di kabupaten Jeneponto terdiri atas pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Ujung Petang di kecamatan Arungkeke, dan pelabuhan pengumpan, yaitu pelabuhan Jeneponto di Kecamatan Batang. Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran nasional: Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2; dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3.

9.3.3 Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan perkereta-apian kabupaten Jeneponto terdiri atas: jalur kereta api; dan stasiun kereta api. Jalur kereta api merupakan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Sulawesi. Stasiun kereta api terdiri atas rencana stasiun kereta api di Kecamatan Bangkala Barat, di Kecamatan Bangkala, Tamalatea di Kecamatan Tamalatea, di Kecamatan Binamu, di Kecamatan Batang, kecamatan Arungkeke dan di Kecamatan Tarowang.

9.4 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya dalam pembangunan kabupaten Jeneponto adalah keseluruhan jaringan prasarana yang terdiri atas sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

9.4.1 Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi kabupaten Jeneponto meliputi sistem jaringan pembangkit tenaga listrik; istem jaringan transmisi tenaga listrik; dan Depo bahan bakar minyak. Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU Punagaya terdapat di Kecamatan Bangkala dengan kapasitas 2 x 100 MW; dan PLTU Bosowa Massaloro terdapat di Kecamatan Bangkala dengan kapasitas 2 x 125 MW.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kelara, terdapat di Kecamatan Kelara dengan kapasitas 2 x 125 MW; dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari Sungai Munte dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke desa-desa di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro.

Sistem jaringan transmisi tenaga listrik kabupaten Jeneponto, terdiri atas Gardu induk (GI) yaitu GI Jeneponto 1 dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke; GI Jeneponto 2 dengan kapasitas 30 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke; dan Rencana Pembangunan GI Jeneponto 3 dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Arungkeke. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang terdiri atas GI Bulukumba – GI Jeneponto; GI Bulukumba –

GI Jeneponto; GI Jeneponto TIP 58; GI Jeneponto TIP 58; dan GI Jeneponto – GI Tallasa.

Depo bahan bakar minyak (BBM) kabupaten Jeneponto terdiri atas Depo BBM Paccelanga di Kecamatan Bangkala; Depo BBM Pakkaterang di Kecamatan Binamu; Depo BBM Bontosunggu di Kecamatan Binamu; dan Depo BBM Pammengkang Bulo-Bulo di Kecamatan Arungkeke.

9.4.2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten Jeneponto terdiri atas sistem jaringan kabel; sistem jaringan nirkabel; dan sistem jaringan satelit. Sistem jaringan kabel berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) Jeneponto dengan kapasitas 900 SST. Untuk mendukung sistem interkoneksitas, diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan. Sistem jaringan nirkabel terdiri atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan. Ssedangkan sistem jaringan satelit direncanakan menjangkau hingga pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya

9.4.3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas sumber air; dan Prasarana sumber daya air. Sumber air terdiri atas wilayah sungai strategis nasional; sumber air permukaan; dan bendungan. Wilayah sungai strategis nasional yang ada di kabupaten Jeneponto yaitu wilayah sungai Jeneberang yang meliputi DAS Jeneberang, dan DAS Jeneponto.

Sumber air permukaan meliputi air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pappa, Sungai Allu, Sungai Taman Roya, S. Jenponto (Sungai Kelara), Sungai Tino dan anak sungai lainnya. Untuk air permukaan lainnya terdiri dari embung yang terdiri dari: Embung Bira-Bira, Embung Bulu Jaya, Embung Buludoang, Embung Garasikang, Embung Gunung Silanu, Embung Kapita, dan Embung Pattiro di Kecamatan Bangkala Barat, Embung Maero dan Embung Tabuakkang di kecamatan Bontoramba; dan mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Jeneponto. Bendungan yang ada di kabupaten Jeneponto adalah bendungan Kelara di kecamatan Kelara.

Prasarana sumber daya air kabupaten Jeneponto terdiri atas daerah irigasi; sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan sistem pengendalian banjir. Daerah irigasi kabupaten Jeneponto terdiri atas Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat adalah DI Kelara dengan luas 7.199 Ha; dan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 106 DI meliputi total luas 21.840 Ha.

Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna di kabupaten Jeneponto terdiri dari IPA Kalakkara di Kecamatan Binamu, dengan kapasitas terpasang 20 L/Detik, dan kapasitas produksi 20 L/Detik.; IPA Kalakkara I di Kecamatan Binamu, dengan kapasitas terpasang 10 L/Detik, dan kapasitas produksi 8 L/Detik. IPA Munte di Kecamatan

Turatea, dengan Kapasitas terpasang 20 L/Detik, dan Kapasitas Produksi 20 L/Detik.

Sistem Pengendalian Banjir kabupaten Jeneponto dilakukan melalui normalisasi Sungai Pappa, Sungai Allu, Sungai Taman Roya, Sungai Jeneponto (Sungai Kelara), Sungai Tino, serta mengendalikan pembangunan di sepanjang sempadan sungai.

9.4.4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan kabupaten Jeneponto terdiri atas sistem jaringan persampahan; sistem jaringan air minum; sistem Jaringan air limbah; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana:

9.5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto

9.5.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

9.5.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di kabupaten Jeneponto seluas kurang lebih 6.715 Ha, yang terdiri atas kawasan hutan lindung di Kecamatan Bangkala dengan luas kurang lebih 3.536 Ha; kawasan hutan lindung di Kecamatan Bangkala Barat dengan luas kurang lebih 1.467Ha; kawasan hutan lindung di Kecamatan Bontoramba dengan luas kurang lebih 848 Ha; kawasan hutan lindung di Kecamatan Kelara dengan luas kurang lebih 216 Ha; dan kawasan hutan lindung di Kecamatan Rumbia dengan luas kurang lebih 647 Ha.

9.5.1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%. Sedangkan kawasan resapan air ditetapkan di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kelara,

Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Turatea, dan Kecamatan Tarowang.

9.5.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di kabupaten Jeneponto terdiri atas kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan sungai; kawasan sempadan pantai; kawasan sekitar danau atau waduk; dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Kawasan sempadan pantai kabupaten Jeneponto ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang, dengan ketentuan bahwa daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan sungai kabupaten Jeneponto ditetapkan di Sungai Jeneponto, Sungai Tamanroya, Sungai tarowang, Sungai Allu, dan Sungai Topa dengan ketentuan bahwa daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima pulh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan persiapan rencana pembangunan Bendungan Kelara-Karaloe di Kecamatan Kelara yang berjarak 100 (seratus) meter dari rencana pembangunan bendungan.

Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

9.5.1.4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri dari Kawasan suaka margasatwa; dan Kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan suaka margasatwa kabupaten Jeneponto ditetapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara berada di Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 2.250,87 (dua ribu dua ratus lima puluh koma delapan puluh tujuh) hektar; dan kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Batang dan Kecamatan Arungkeke dengan luasan kurang lebih 206 (dua ratus enam) hektar.

9.5.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di kabupaten Jeneponto terdiri dari Kawasan rawan banjir; kawasan rawan tanah longsor; dan kawasan rawan gelombang pasang. Kawasan rawan banjir ditetapkan di sebagian Kecamatan Bangkala, sebagian Kecamatan Bangkala Barat, sebagian Kecamatan Binamu, sebagian Kecamatan Binamu, sebagian Kecamatan Arungkeke, dan sebagian Kecamatan Batang. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Kelara; dan Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan di sepanjang pesisir Kabupaten Jeneponto di Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang.

9.5.1.6 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi kabupaten Jeneponto merupakan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan di seluruh wilayah kecamatan dengan kategori seismisitas rendah. Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan di Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Kelara.

Kawasan rawan tsunami ditetapkan di sepanjang pesisir Kabupaten Jeneponto meliputi Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang; dan Kawasan rawan abrasi pantai ditetapkan di sepanjang pesisir Kabupaten Jeneponto meliputi Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Tarowang.

9.5.1.7 Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya kabupaten Jeneponto terdiri atas Taman buru; dan Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan taman buru kabupaten Jeneponto ditetapkan di Taman Buru Bangkala Kecamatan Bangkala Barat yang menyatu dengan Suaka Margasatwa Ko'mara dengan luasan kurang lebih 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar; dan Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan di Kecamatan Bangkala dengan luasan krang lebih 214 (dua ratus empat belas) hektar.

9.5.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten Jeneponto, terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan industri; kawasan

peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

9.5.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Jeneponto terdiri atas Kawasan hutan produksi terbatas; dan Kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba; Kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rumbia dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba.

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Jeneponto ditetapkan di Desa Kapita, Desa Gunung Silanu dan Desa Marayoka Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

9.5.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Jeneponto terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; dan Kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar.

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 19.592 (sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh dua) hektar.

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura terdiri dari kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran ditetapkan di Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 2.826 (dua ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar; dan Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian

wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 196.530 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar.

Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan perkebunan dan kawasan wanatani terdiri dari kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kopi robusta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar; kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat dengan luasan kurang lebih 2.103 (dua ribu seratus tiga) hektar; kawasan peruntukan perkebunan kakao, dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba dengan luasan kurang lebih 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar; kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, jambu mete, dan kapuk ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kelara dengan luasan kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar; dan kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, cengkeh, jambu mete, dan kapuk ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar.

Kawasan peruntukan peternakan berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 10.540 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh) hektar.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar.

9.5.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap; kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan kawasan pengolahan ikan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores dan wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bangkala Barat, kawasan pesisir Kecamatan Bangkala, kawasan pesisir Kecamatan Tamalatea, kawasan pesisir Kecamatan Binamu, kawasan pesisir Kecamatan Arungkeke, dan kawasan pesisir Kecamatan Tarowang.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Kecamatan Batang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea

dengan luasan kurang lebih 8.150 (delapan ribu seratus lima puluh) hektar; dan kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan ikan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Batang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea dengan luasan kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.

Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Rumbia, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea dengan luasan kurang lebih 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar. Kawasan pengolahan ikan ditetapkan di Kawasan Pengolahan Ikan Pabiringa Kecamatan Binamu dengan luasan kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar.

9.5.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari wilayah usaha pertambangan; dan wilayah pertambangan rakyat.

Wilayah usaha pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan mineral logam komoditas tambang pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Binamu dan sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke. Wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas tambang bentonit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala dan sebagian wilayah Kecamatan Binamu; Komoditas tambang clay ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea; Komoditas tambang dolomit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea; Komoditas tambang oker ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rumbia dan sebagian wilayah Kecamatan Kelara; Komoditas tambang mika ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat; dan Komoditas tambang zeolit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea.

Wilayah usaha pertambangan mineral batuan meliputi komoditas tambang batu gamping ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea; Komoditas tambang andesit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batang; Komoditas tambang basalt ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Rumbia, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea; Komoditas tambang breksi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, dan sebagian wilayah Kecamatan Batang.

Komoditas tambang tufa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba; Komoditas tambang kaldeson ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea; dan Komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea.

Wilayah usaha pertambangan rakyat berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta yang berada di wilayah perairan laut Kabupaten Jeneponto.

9.5.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri kabupaten Jeneponto terdiri atas Kawasan peruntukan industri besar; Kawasan peruntukan industri sedang; dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar terdapat di Kawasan Industri Mallasoro, dengan luasan kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar. Kawasan Industri Mallasoro dilengkapi dengan infrastruktur pendukung meliputi pembangkit listrik; dan pelabuhan khusus. Pembangkit listrik pada kawasan industri ini adalah PLTU Mallasoro, dan PLTU Punagaya sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari pelabuhan khusus PLTU Punagaya yang dilengkapi dengan terminal barang di sisi Timur Teluk Laikang Kecamatan Bangkala; dan Pelabuhan khusus PLTU Mallasoro yang dilengkapi dengan terminal barang di sisi Timur Tanjung Mallasoro Kecamatan Bangkala.

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari kawasan tambak garam Nassara Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 220 hektar; dan kawasan tambak garam Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan luasan kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar. Sedangkan untuk kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.

9.5.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata kabupaten Jeneponto terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya; kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas Rumah Adat (*Balla Kambara*) dan Masjid Tua Tolo di kelurahan Tolo kecamatan Kelara; Rumah Adat Kampala di desa Kampala kecamatan Arungkeke; Rumah Adat Binamu di kelurahan Pabbiringa kecamatan Binamu; Rumah Adat Kalimporo di desa Kalimporo kecamatan Bangkala; Artefak Serpih Bilah di kelurahan Palengu, kecamatan Bangkala; Situs Serpih Bilah Karama di desa Banrimanurung, kecamatan Bangkala Barat; Kompleks

Makam Nong dan Bungung Lompoa di kampung Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara; Benteng Karampuang berada di lingkungan Karampuang dan Balai Pasui, Kecamatan Kelara; Kompleks Makam Raja-Raja Binamu di kecamatan Bontoramba; Makam Manjang Loe di kecamatan Tamalatea; Kompleks Makam Joko di kecamatan Bontoramba: Kompleks Makam Kalimporo di desa Kalimporo, kecamatan Bangkala; Makam Pasiri Dg Mangasa Karaeng Labbua Talibannanna di desa Tuju kecamatan Bangkala Barat; Makam I Maddi Dg Ri Makka di kelurahan Tonrokassi kecamatan Tamalatea; Makam Pattima Dg Ti'no di kelurahan Pabbiringa kecamatan Binamu; Makam Karampuang Butung di kelurahan Biringkasi kecamatan Binamu; Makam Sapanang (Kr. Bebang) desa Sapanang di kecamatan Binamu; Makam Dampang Tolo dan Makam Karaeng Sapaloe di kelurahan Tolo , kecamatan Kelara; Makam Ta'baka di desa Arungkeke Pallantikang, kecamatan Arungkeke; dan Makam Karaeng Sengge dan Makam Karaeng Bisea di desa Balangloe Tarowang kecamatan Tarowang.

Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas Pantai Birta Ria Kassi di kelurahan Tonrokassi kecamatan Tamalatea; Pantai Balangloe Tarowang di desa Balangloe Tarowang kecamatan Tarowang; Tanjung Mallasoro' di kecamatan Bangkala; Pulau Libukang (Pulau Harapan) di kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala; Air Terjun Je'ne Aribba di desa Kapita, kecamatan Bangkala; Air Terjun Boro di kecamatan Rumbia; Kawasan Mangrove Kassi desa Tarowang kecamatan Tarowang; Bungung Salapang di desa Bontorappo kecamatan Tarowang; Agrowisata dan Pesanggrahan Loka di Kecamatan Rumbia; Pantai Karsut di desa Kampala kecamatan Arungkeke; Pasar Kuda di kelurahan Tolo kecamatan Kelara; dan Kawasan Pelestarian Tanaman Lontara di kecamatan Tamalatea.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas Bintang Karaeng Resort di kecamatan Binamu; Kawasan Tambak Garam Tradisional Nassara di kecamatan Bangkala; Kawasan Tambak Garam tradisional Arungkeke di Kecamatan Arungkeke; Arena Pacuan Kuda di Kecamatan Bangkala; dan Anjungan Pantai Arungkeke di Kecamatan Arungkeke.

9.5.7 Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan peruntukan permukiman kabupaten Jeneponto terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Bontosunggu Kecamatan Binamu dan Kawasan Perkotaan Allu Kecamatan Bangkala.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman

perdesaan ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagian wilayah Kecamatan Rumbia. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan juga ditetapkan kawasan permukiman Perdesaan transmigrasi pada sebagian wilayah kecamatan Bangkala Barat.

9.5.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di kabupaten Jeneponto merupakan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pertahanan dan adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Kantor Komando Daerah Militer 1425 Jeneponto di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu; Kantor Batalyon Infanteri 726 Tamalatea di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat; Kantor Komando Rayon Militer 1425-01 Binamu di Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu; Kantor Komando Rayon Militer 1425-02 Bangkala di Kelurahan Allu Kecamatan Bangkala, Kantor Komando Rayon Militer 1425-03 Tamalatea di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea; Kantor Komando Rayon Militer 1425-04 Kelara di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara; Kantor Komando Rayon Militer 1425-05 Batang di Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang; Kantor Kepolisian Resort Jeneponto di Kelurahan Empong Kecamatan Binamu; Kantor Kepolisian Sektor Batang di Kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang; Kantor Kepolisian Sektor Arungkeke di Kelurahan Arungkeke Kecamatan Arungkeke; Kantor Kepolisian Sektor Binamu di Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu; Kantor Kepolisian Sektor Kelara di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara; Kantor Kepolisian Sektor Tamalate di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea; dan Kantor Kepolisian Sektor Bangkala di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala.

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dan atau setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Jeneponto.

9.6 Kawasan Strategis Kabupaten Jeneponto

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Jeneponto terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi; dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Jeneponto terdiri atas KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kabupaten Jeneponto terdiri atas kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagian wilayah Kecamatan Rumbia.

Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rumbia; dan Kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Batang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea.

KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Penambangan Minyak Blok Karaengta ditetapkan di wilayayah perairan Kabupaten Jeneponto; dan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Punagaya di Kecamatan Bangkala. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan hutan lindung kabupaten Jeneponto dengan luasan kurang lebih 6.715 (enam ribu tujuh ratus lima belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagian wilayah Kecamatan Rumbia.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan agropolitan Rumbia-Kelara ditetapkan di Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Kelara; Kawasan industri perikanan dan pariwisata terpadu (KIPPT)di Kecamatan Binamu; Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Agro-minapolitan di Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Tarowang;

Kawasan Strategis Kabupaten BINTARU di Kecamatan Binamu, Kecamatan Batang, dan Kecamatan Arungkeke. KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropiltan Berbasis Pesantren ditetapkan di Kecamatan Turatea; KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi terdiri atas Kawasan strategis industri Mallasoro di Kecamatan Bangkala; dan Kawasan strategis rencana pembangunan Bendungan Kelara-Karaloe di Kecamatan Kelara.

вав - 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

10.1 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Perwilayahan Destinasi Pariwisata merupakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Jeneponto ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas serta keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Jeneponto, maka Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Jeneponto ditetapkan sebagai berikut :

a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pulau Libukang (Pulau Harapan) dan sekitarnya. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis pantai, laut, dan pulau, wisata minat khusus, serta wisata sejarah dan budaya.

DPD ini terdiri dari terdiri dari Pulau Libukang (Pulau Harapan) di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala; Batu Sipinga di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat; Bukit Toenga di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala; Je'ne A'ribaka di Desa Kapita Kecamatan Bangkala; Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya) di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala; Bukit dan Danau Bulu Jaya di Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat; Pantai Garassikang di Kecamatan Bangkala; Tanjung Mallasoro' di Kecamatan Bangkala; Pantai Katubiri di Desa Bisoli Kecamatan Bangkala Barat; Makam Kr. Toayya (Kr. Ngilanga) di Kel. Benteng Kec. Bangkala; Makam Kr. Lompo Bongga di Kel. Bontorannu Kec. Bangkala; Makam Kr. Tanatoa di Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala; Makam Parang Loe

di Desa Kalimporo (Borong Camba) Kec. Bangkala; Makam Manukulang Dg. Pasore' di Desa Pallantikan Kec. Bangkala; Rumah Adat Alm. Pabisei Kr. Tunru Kel. Pantai Bahari Kec. Bangkala; Rumah Adat Kr. Tanatoa di Desa Tanatoa Kec. Bangkala; Makam Kr. Banri Manurung di Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat; Makam Pabisei Kr. Tunru di Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat; Rumah Adat Kalimporo di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala; Artefak Serpih Bilah di Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala; Situs Serpih Bilah Karama di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat; Kompleks Makam Kalimporo di Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala; Makam Pasiri Dg Mangasa Karaeng Labbua Talibannanna di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat; Kawasan Pacuan Kuda di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala; Accera Gaukang di Desa Bisoli Kecamatan Bangkala Barat; Pesta Panen di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat; Kawasan Tambak Garam Tradisional Nasara di Kecamatan Bangkala; dan Kawasan pembuatan dan penjualan Lammang di Ruku-Ruku kelurahan Palengu' kecamatan Bangkala.

b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Lembah Hijau Rumbia dan sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis Gunung, Bukit, Lembah, Air Terjun, Goa dan Hutan dengan variasi aktivitas wisata sejarah dan budaya.

DPD ini terdiri dari

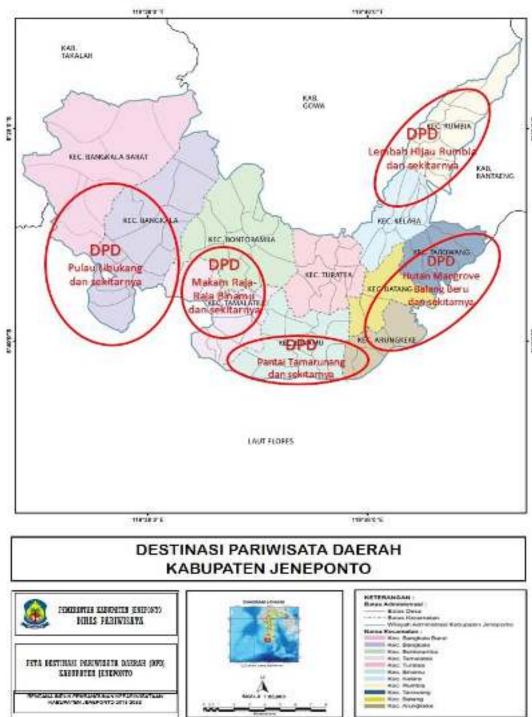
Goa Gantarang Buleng di Desa Gantarang Kecamatan Kelara: Lembah Hijau Rumbia di Desa Bontonompo Kecamatan Rumbia; Air Terjun Tama'lulua Bossolo di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia; Air terjun Boro di Desa Bontonompo Kecamatan Rumbia: Pasanggarahan Loka di Desa Loka Kecamatan Rumbia: Air terjun Lembah Impian di Desa Bontomanai Kecamatan Rumbia; Air terjun Kara'ngasa di Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia; Wisata Lembah Bontolojong di Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia; Sungai Ta'lambua di Desa Paitana Kecamatan Turatea; Rumah Adat (Balla Kambara) dan Masjid Tua Tolo di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara; Kompleks Makam Nong dan Bungung Lompoa di Kampung Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara; Benteng Karampuang berada di Lingkungan Karampuang dan Balai Pasui, Kecamatan Kelara; dan Makam Dampang Tolo dan Makam Karaeng Sapaloe di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara;

c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kompleks Makam Raja-Raja Binamu dan sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah makam Raja-Raja, Rumah Adat, dan tinggalan sejarah lainnya dengan variasi aktivitas wisata alam rekreasi pantai.

DPD ini terdiri dari Air terjun Tuang Loe di Desa Datara Kecamatan Bontoramba; Pantai Birta Ria Kassi di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea; Rumah Adat Binamu di Kelurahan Pabbiringa Kecamatan Binamu; Kompleks Makam Raja-Raja Binamu di Kecamatan Bontoramba; Makam Manjang Loe di Kecamatan Tamalatea; Kompleks Makam Joko di Kecamatan Bontoramba; Makam I Maddi Dg Ri Makka di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan

Tamalatea; Makam Pattima Dg Ti'no di Kelurahan Pabbiringa Kecamatan Binamu; Makam Karampuang Butung di Kelurahan Biringkasi Kecamatan Binamu; Makam Sapanang (Kr. Bebang) desa Sapanang di Kecamatan Binamu;

- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Hutan Mangrove Balang Beru dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata edukasi dan ekologi, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus.
 - DPD ini terdiri dari Wisata Hutan *Mangrove* di Desa Balang Beru Kecamatan Tarowang; Pantai Ujung Timur di Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang; Je'ne-je'ne Sappara di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang; Permandian Bungung Salapang di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang; Pantai Kampung Sicini di Desa Sicini Kec. Arungkeke; Pantai Balangloe Tarowang di Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang; Kawasan Tambak Garam tradisional Arungkeke di Kecamatan Arungkeke; Makam Ta'baka di Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke; dan Makam Karaeng Sengge; Makam Karaeng Bisea di Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang; Rumah Adat Kampala di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke;
- e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pantai Tamarunang dan Sekitarnya. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata buatan (manmade) rekreasi keluarga, kuliner serta wisata sejarah dan budaya. DPD ini terdiri dari Kawasan Pantai Tamarunang di Kecamatan Binamu; Bintang Karaeng Resort di Kecamatan Binamu; Waterpark Boyong di Tonro Kassi Timur (Boyong) Kecamatan Tamalatea; Pantai Karaeng Sutte (Karsut) di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke; Taman tematik di Binamu; Hutan Kota di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu; Je'ne-je'ne Sappara di Karampang Pa'ja Kecamatan Tamalatea; Lapangan Pacuan Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba di Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu; Maulid Sidenre Khusus Kelompok Sayye di Sidenre' Kecamatan Binamu; Coto dan Konro Kuda di kecamatan Binamu, Kawasan penjualan Ballo Tanning di kecamatan Tamalatea;



Gambar 10.1 Peta Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kabupaten Jeneponto

Sumber: Data Olahan, 2018

10.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Jeneponto, selanjutnya diidentifikasi potensi daya tarik wisata yang menjadi tema utama sehingga akan memudahkan dalam menyusun pemaketan dan pola perjalanan wisata termasuk dalam menyesuaikan

beberapa komponen pendukung seperti pusat pelayan wisata, aksesibilitas pariwisata, amenitas serta infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Jeneponto sebagi berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1, terdiri dari kecamatan Bangkala dan kecamatan Bangkala Barat;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2, terdiri dari kecamatan Bonto Ramba dan kecamatan Turatea;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3, terdiri dari kecamatan Kelara dan kecamatan Rumbia;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4, terdiri dari kecamatan Tarowang, kecamatan Batang, dan kecamatan Arungkeke; dan
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5, terdiri dari kecamatan Binamu dan kecamatan Tamalatea.

10.2.1 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1 merupakan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten Jeneponto yang meliputi kecamatan Bangkala Barat dan kecamatan Bangkala. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketingggian 17 meter sampai dengan 67 mdpl.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa pantai, laut, pulau, bukit, danau, air terjun dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa rumah adat, makam, pacuan kuda, tinggalan sejarah masa lampau berupa artefak, serta potensi daya tarik wisata minat khusus usaha tambak garam tradisional.

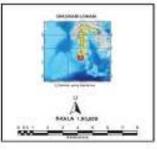
Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan dengan kabupaten Takalar sebagai pintu masuk ke kabupaten Jeneponto dari arah kota Makassar melalui akses transportasi darat, maka kecamatan Bangkala Barat harus mampu menjadi gerbang yang memberikan gambaran menarik bagi pengunjung yang mengunjungi atau sekedar melewati kabupaten Jeneponto.

Gambar 10.2 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 1 KABUPATEN JENEPONTO







Sumber: Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA 1





Daya Tarik Wisata	Pulau Libukang (Pulau Harapan); Pantai Katubiri; Batu Sipinga; Pantai Garassikang; Tanjung Mallasoro'; Bukit Toenga; Je'ne A'ribaka; Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya); Bukit dan Danau Bulu Jaya; Rumah Adat Kalimporo; Artefak Serpih Bilah; Situs Serpih Bilah Karama; Kompleks Makam Kalimporo; Makam Pasiri Dg Mangasa Karaeng Labbua Talibannanna; Kawasan Pacuan Kuda Kalimporo; Accera Gaukang; Pesta Panen Beroanging; Penjualan Lammang; dan Kawasan Tambak Garam Tradisional Nasara.	
Tema Pengembangan	Wisata bahari pantai, laut dan pulau, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus tambak garam tradisional dan kuliner sebagai daya tarik utama	
Komponen Pengembangan	Jabaran	
Atraksi Wisata	1. Pengembangan DTW Bahari 2. Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya 3. Pengembangan DTW Minat Khusus	
Fasilitas Wisata	 Pengembangan resort dan homestay. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi pantai. Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta Tourist Information Centre. Pengembangan fasilitas Money Changer, ATM dan Internet Penataan dan pengembangan kawasan wisata kuliner di kawasan penjualan Lammang Palengu. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di kawasan tambak garam tradisional Nasara Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di Kawasan Pacuan Kuda. Penataan dan pengembangan fasilitas wisata di Bukit dan Danau Bulu Jaya. Pengembangan Desa Wisata 	

Aksesibilitas		 Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan. Pengembangan dermaga dan fasilitas transportasi wisata bahari.
Manajemen Ruang	Tata	 Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.2.2 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2 merupakan kawasan strategis pariwisata kabupaten Jeneponto yang meliputi kecamatan Bontoramba dan kecamatan Turatea. Karakteristik wilayah di kedua kecamatan tersebut berada di daerah dengan ketingggian di bawah 39 meter sampai dengan 178 mdpl, sehingga terdapat variasi yang sangat berbeda antara kondisi dataran rendah di kecamatan Bontoramba dengan daerah perbukitan di kecamatan Turatea.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa Air Terjun dan panorama, daya tarik wisata budaya berupa makam dan Rumah Adat

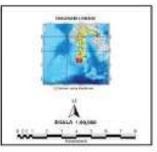
Sebagai wilayah kawasan pengembangan pariwisata daerah dengan karakter geografis dan potensi daya tarik serta atrtaksi wisata yang sangat spesifik pada wisata alam dan wisata sejarah. Mengingat kelompok peminat selaku pasar sasaran sangat terbatas, maka prioritas pengembangan yang harus dilakukan adalah pengembangan sarana aktivitas wisata di sekitar daya tarik yang telah ada dengan mengandalkan panorama alam serta keunikan budaya dan pola hidup masyarakat setempat yang masih ada dan terus berkembang dalam masyarakat berupa pengembangan desa wisata (tourism village).

Gambar 10.3 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 2 KABUPATEN JENEPONTO







Sumber: Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA 2





Daya Tarik Wisata	Air terjun Tuang Loe; Sungai Ta'lambua; Kompleks Makam Raja-Raja Binamu; Kompleks Makam Joko		
Tema Pengembangan	Wisata Budaya, Wisata Alam, dan Wisata Minat Khusus		
Komponen Pengembangan	Jabaran		
Atraksi Wisata	 Pengembangan DTW Alam Pengembangan DTW Budaya Pengembangan DTW Minat Khusus 		
Fasilitas Wisata	 Pengembangan restoran, rumah makan, dan sarana pariwisata rekreasi. Pengembangan Desa Wisata Pengembangan Museum Raja-Raja Binamu Pengembangan fasilitas wisata minat khusus river tubing di kawasan Sungai Ta'lambua. 		
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain		
Manajemen Tata Ruang	 Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. I. Zona inti adalah daerah dimana objek itu berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti. 		

10.1.3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3 merupakan kawasan strategis pariwisata kabupaten Jeneponto yang meliputi kecamatan Rumbia dan kecamatan Kelara. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketingggian 221 sampai dengan 509 mdpl.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang sangat beragam terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air terjun, permandian, dan panorama. Daya tarik wisata budaya berupa pesta adat dan makam, rumah adat, dan

tinggalan sejarah masa lampau serta berbagai daya tarik minat khusus seperti kawasan hutan dan perkebunan rakyat.

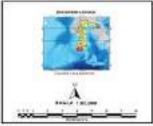
Sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang sangat variatif khususnya keberadaan kawasan ekowisata Rumbia serta aksesibilitas yang menghubungkan kabupaten Jeneponto dengan wilayah kabupaten Bantaeng, maka potensi kawasan pengembangan pariwisata daerah pada zona ini menjadi sangat besar dibandingkan dengan kawasan lain di kabupaten Jeneponto.

Gambar 10.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 3 KABUPATEN JENEPONTO







Sumber: Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA 3





A STREET OF THE PARTY OF THE PA	
Daya Tarik Wisata Tema Pengembangan	Goa Gantarang Buleng; Lembah Hijau Rumbia; Air Terjun Tama'lulua Bossolo; Air Terjun Boro; Pasanggarahan Loka; Air terjun Lembah Impian; Air terjun Kara'ngasa; Wisata Lembah Bontolojong. Rumah Adat (<i>Balla Kambara</i>) dan Masjid Tua Tolo; Kompleks Makam Nong dan Bungung Lompoa; Benteng Karampuang; Makam Dampang Tolo dan Makam Karaeng Sapaloe. Wisata Alam, Wisata Sejarah, dan Wisata minat
	khusus Agro dan ekologi
Komponen	Jabaran
Pengembangan	
Atraksi Wisata	 Pengembangan DTW Alam Pengembangan DTW Sejarah Pengembangan DTW Minat Khusus Agro dan Ekologi
Fasilitas Wisata	 Penataan kawasan dan pengembangan falisitas wisata di Kawasan Ekowisata Rumbia Penataan kawasan dan pengembangan falisitas wisata di Kawasan Lembah Bontolojong. Pengembangan fasilitas olah raga dan rekreasi wisata petualangan dan <i>camping</i> Pengembangan fasilitas minat khusus fotography Pengembangan resort area dan hotel. Pengembangan pasar wisata milenial Pengembangan fasilitas wisata persawahan (<i>rice field tracking and riding</i>) Pengembangan fasilitas ATM Pengembangan fasilitas pembuatan dan penjualan cinderamata Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di Jeneponto.

Manajemen Tata Ruang

Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.

- 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi.
- 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.1.4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4 merupakan kawasan pariwisata kabupaten Jeneponto yang meliputi kecamatan Arungkeke, kecamatan Batang dan kecamatan Tarowang. Karakteristik wilayah dari kecamatan pada zona ini yang didominasi oleh daerah dengan ketingggian 26 sampai dengan 41 mdpl.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam berupa air pantai, hutan *mangrove* dan panorama. Daya tarik wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, dan ritual budaya, serta berbagai potensi ekonomi masyarakat sebagai daya tarik minat khusus tambak garam tradisional dan pasar tradisional serta sentra penjualan buah dan sayur-sayuran khas kabupaten Jeneponto yaitu srikaya, sirsak, mangga, dan bawang merah

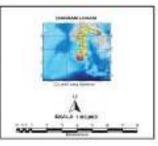
Sebagai wilayah kecamatan yang berbatasan dengan akses utama kabupaten Bantaeng, maka kawasan pengembangan pariwisata daerah ini membutuhkan infrastruktur aksesibilitas serta fasilitas pariwisata yang baik sehingga menarik minat wisatawan untuk singgah dan berkunjung ke kabupaten Jeneponto.

Gambar 10.5 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 4 KABUPATEN JENEPONTO







Sumber: Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA 4





Daya Tarik Wisata	Pantai Ujung Timur; Pantai Karaeng Sutte (Karsut); Pantai Kampung Sicini; dan Pantai Balangloe. Rumah Adat Kampala; Makam Ta'baka; dan Makam Karaeng Sengge dan Makam Karaeng Bisea. <i>Je'ne-je'ne Sappara</i> Tarowang; dan Permandian Bungung Salapang. Wisata Hutan Mangrove Desa Balang Beru. Kawasan Tambak Garam Tradisional Arungkeke.		
Tema Pengembangan	Pengembangan Wisata Alam, Minat Khusus Ekowisata dan Wisata Edukasi Hutan <i>Mangrove</i> , Wisata Sejarah dan Budaya		
Komponen Pengembangan	Jabaran		
Atraksi Wisata	 Pengembangan DTW Alam Pengembangan DTW Sejarah dan Budaya Pengembangan DTW Minat Khusus Ekowisata dan Wisata Edukasi Hutan <i>Mangrove</i> 		
Fasilitas Wisata	 Pengembangan fasilitas makan minum dan fasilitas penunjang di kawasan Ekowisata dan Wisata Edukasi Hutan Mangrove Pengembangan fasilitas rekreasi wisata terintegrasi di kawasan wisata pantai Ujung Timur dan Pantai Karsut. Pengembangan Homestay dan akomodasi lainnya 		
	 Pengembangan Sistem Informasi, Guiding, Interpretasi, serta <i>Tourist Information Centre</i>. Pengembangan <i>Rest Area</i> Pengembangan fasilitas ATM Pengembangan sentra penjualan cinderamata 		
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di dalam kawasan dan antar kawasan.		
Manajemen Tata Ruang	Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata.1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi.2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.		

10.1.5 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5 merupakan kawasan pariwisata kabupaten Jeneponto yang meliputi kecamatan Tamalatea dan kecamatan Binamu. Karakteristik wilayah dari kedua kecamatan ini didominasi oleh daerah dengan ketingggian 65 sampai dengan 178 mdpl.

Kondisi geografis wilayah pada kawasan pengembangan pariwisata ini mempengaruhi jenis daya tarik dan atraksi wisata yang dimiliki yang terdiri dari daya tarik wisata alam pantai panorama, dan taman kota tematik. Daya tarik wisata sejarah berupa makam dan rumah adat, serta berbagai daya tarik minat khusus seperti wisata rekreasi keluarga.

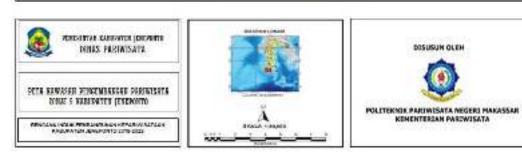
Sebagai kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang sekaligus merupakan wilayah ibukota kabupaten Jeneponto, maka zona ini merupakan wilayah dengan fasilitas dan atraksi wisata yang paling lengkap di kabupaten Jeneponto.

Program pengembangan pariwisata yang diprioritaskan pada kawasan ini adalah *business tourism*, melalui pelaksanaan even regular, pelaksanaan kegiatan MICE, penyediaan dan pengembangan fasilitas rekreasi keluarga dan aktivitas olahraga dan rekreasi pantai serta pengembangan wisata minat khusus kuliner sebagai daya tarik utama peningkatan minat kunjungan wisatawan ke kabupaten Jeneponto.

Gambar 10.6 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5



KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 5 KABUPATEN JENEPONTO



Sumber: Data Olahan, 2018

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KPPD ZONA 5





Daya Tarik Wisata	Pantai Birta Ria Kassi Kawasan Pantai Tamarunang; Bintang Karaeng Resort; Waterpark Boyong; Taman tematik; dan Hutan Kota. Rumah Adat Binamu; Makam Manjang Loe; Makam I Maddi Dg Ri Makka; Makam Pattima Dg Ti'no; Makam Karampuang Butung; Makam Sapanang (Kr. Bebang). Maulid Sidenre Khusus Kelompok Sayye; Je'neje'ne Sappara Karampang Pa'ja; Lapangan Pacuan Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba. Kuliner Coto, Konro Kuda dan Gantala Jarang; Kawasan penjualan Ballo Tanning.		
Tema Pengembangan	Wisata Alam Pantai, Wisata Sejarah dan Budaya, Wisata Minat Khusus Rekreasi Keluarga dan Olahraga, serta Kuliner		
Komponen Pengembangan	Jabaran		
Atraksi Wisata	 Pengembangan Wisata Alam Pantai Pengembangan Wisata Sejarah dan Budaya Pengembangan Wisata Minat Khusus MICE, Rekreasi Keluarga dan Olahraga, serta Kuliner 		
Fasilitas Wisata	 Pengadaan Tourism Information Center yang menyediakan peta wisata, display, panduan wisata dll. Penyediaan sarana akomodasi dan restoran Pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi wisata keluarga Pengembangan fasilitas wisata MICE. Pengembangan museum. Pengembangan fasilitas ruang pameran, pertunjukan dan night activity. Pengembangan sentra ekonomi kreatif Pengembangan sanggar seni Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga wisata 		

	10. Pengembangan sentra kuliner11. Pengembangan fasilitas <i>out bound</i>
Aksesibilitas	Pengembangan jalur dan moda transportasi ke Daya Tarik Wisata yang lain yang berada di Jeneponto.
Manajemen Tata Ruang	 Pembagian zona terhadap Daya Tarik Wisata. 1. Zona inti adalah daerah dimana objek berada dan sekaligus sebagai zona konservasi. 2. Pengembangan fasilitas tambahan diluar dari zona inti.

10.3 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

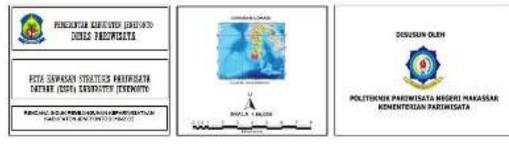
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Jeneponto ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya nasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, provinsi dan/ atau nasional; dan
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Gambar 10.7 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Jeneponto



KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) KABUPATEN JENEPONTO



Sumber: Data Olahan, 2018

Rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Jeneponto juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam tiap paket perwilayahan yang dikembangkan, dengan tetap

mempertimbangkan kondisi aksesibilitas dan karakter budaya yang ada di kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan pengertian, kriteria dan pertimbangan-pertimbangan karakter wilayah tersebut, maka Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kabupaten Jeneponto meliputi:

a. KSPD Bangkala dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Bangkala dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata berbasis pulau, pantai dan pesona dataran tinggi dengan variasi wisata sejarah dan budaya (*island – highland*).

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Pulau Libukang (Pulau Harapan) di wilayah pulau; Pantai Katu'biri, Tanjung Massaloro', dan Batu Sipinga di kawasan pantai; Bukit Toenga serta Bukit dan Danau Bulu Jaya di kawasan perbukitan. Diantara perjalanan wisata tersebut terdapat potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, artefak dan tinggalan sejarah lainnya.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bangkala dan Sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.1 Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Bangkala dan Sekitarnya

No	Nama DTW		Atraksi	Kondisi Aktual
DTW	Alam			
1	Bukit Toenga Kec. Bangkala	2.	Panorama Alam	Potensial
2	Pulau Libukang (Pulau Harapan) Kec. Bangkala	I	Panorama Alam Rekreasi dan Olahraga	Potensial
3	Je'ne A'ribaka Kec. Bangkala	ı	Panorama Alam Air Terjun	Potensial
4	Timuru (Air Terjun Patugurrunna Jongayya) Kec. Bangkala		Panorama Alam Air Terjun	Kurang
5	Pantai Katubiri Kec. Bangkala Barat	3. 4.		Potensial
6	Batu Sipinga Kec. Bangkala Barat	2.	Panorama Alam	Potensial
7	Pantai Garassikang Kec. Bangkala	3. 4.		Potensial
8	Bukit dan Danau Bulu Jaya Kec. Bangkala Barat	3. 4.	Panorama Alam Danau	Potensial

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
9	Tanjung Mallasoro' Kec.Bangkala	Panorama Alam	Baik
DTW	Sejarah dan Budaya		
10	Makam Kr. Toayya (Kr. Ngilanga), Kec. Bangkala	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
11	Makam Kr. Lompo Bongga, Kec. Bangkala	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
12	Makam Kr. Lompo Lappe, Kec. Bangkala	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
13	Makam Kr. Tanatoa, Kec. Bangkala	3. Makam4. Tinggalan Arkeologi	Kurang
14	Makam Parang Loe, Kec. Bangkala	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
15	Makam Manukulang Dg. Pasore', Kec. Bangkala	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
16	Rumah Adat Alm. Pabisei Kr. Tunru, Kec. Bangkala	3. Rumah Adat4. Benda Sejarah	Kurang
17	Rumah Adat Kr. Tanatoa, Kec. Bangkala	Rumah Adat Benda Sejarah	Kurang
18	Makam Kr. Banri Manurung, Kec. Bangkala Barat	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
19	Makam Pabisei Kr. Tunru, Kec. Bangkala Barat	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
20	Kawasan Pacuan Kuda, Kec. Bangkala	3. Pacuan Kuda4. Atraksi Budaya	Baik
21	Accera Gaukang Bangkala, Kec. Bangkala Barat	3. Pesta Rakyat4. Tinggalan Sejarah	Baik
22	Pesta Panen Kec. Bangkala Barat	3. Pesta Panen4. Atraksi Budaya	Potensial
23	Rumah Adat Kalimporo Kec. Bangkala	Rumah Adat Benda Sejarah	Kurang
24	Artefak Serpih Bilah Kec. Bangkala	2. Tinggalan Sejarah	Kurang
25	Situs Serpih Bilah Karama Kec. Bangkala Barat	2. Tinggalan Sejarah	Kurang

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
26	Kompleks Makam	2. Makam Sejarah	Kurang
	Kalimporo		
	Kec. Bangkala		
27	Makam Pasiri Dg	2. Makam Sejarah	Kurang
	Mangasa Karaeng		
	Labbua Talibannanna		
	Kec. Bangkala Barat		
DTW	Minat Khusus		
28	Dermaga Pantai	3. Rekreasi Keluarga	Potensial
	Garassikang	4. Panorama Pantai	
	Kec. Bangkala Barat		
29	Tambak Garam	3. Kreativitas Masyarakat	Potensial
	(Paccelanga)	4. Industri Garam Rakyat	
	Kec. Bangkala		
30	Pembuatan	1. Kuliner Tradisional	Potensial
	Lammang		
	Kec. Bangkala		

Sumber: Data Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik Wisata di KSPD Bangkala dan sekitarnya bervariasi, dari 30 daya tarik dan atraksi wisata yang ada, terdapat 11 buah daya tarik termasuk "Potensial" untuk dikembangkan, 16 buah daya tarik termasuk "kurang", dan 3 buah data tarik termasuk "Baik".

b. KSPD Tamalatea dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Tamalatea dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata berbasis wisata sejarah dan budaya dengan variasi pantai dan kuliner.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Makam Raja-Raja Binamu, Pantai Birta Ria Kassi, Air Terjun Tuang Loe, *Water Park Boyong*, potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, artefak dan tinggalan sejarah lainnya, serta wisata minat khusus kuliner penjualan *Ballo' Tanning*.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tamalatea dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.2 Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Tamalatea dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW	Alam		
1	Birtaria Kassi Kec. Tamalatea	3. Panorama Alam4. Rekreasi	Potensial
No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
2	Air terjun Tuang Loe Kec. Bontoramba	3. Panorama Alam4. Air Terjun	Potensial
DTW	Sejarah dan Budaya		
3	Rumah Adat Bonto Tangnga Kec. Tamalatea	Rumah Adat Benda Sejarah	Kurang
4	Je'ne-je'ne sappara Karampang Pa'ja Kec. Tamalatea	Pesta Rakyat Ritual Budaya	Baik
5	Je'ne-je'ne sappara Borong Tala Kec. Tamalatea	Pesta Rakyat Ritual Budaya	Baik
6	Makam Joko Kec. Bontoramba	Makam Tinggalan Arkeologi	Baik
7	Makam Raja-Raja Binamu Kec. Bontoramba	3. Makam4. Tinggalan Arkeologi	Potensial
DTW	Minat Khusus		
8	Water Park Boyong Kec. Tamalatea	3. Rekreasi Keluarga4. Kolam Renang	Potensial
9	Penjualan <i>Ballo' Tanning/</i> Tuak Manis Kec. Tamalatea	Minuman Tradisional	Potensial

Sumber: Data Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Tamalatea dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 9 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 5 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk "Potensial", 2 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Baik" dan 2 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Kurang".

c. KSPD Binamu dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Binamu dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata buatan berbasis pantai dan rekreasi

keluarga, wisata sejarah dan budaya dengan variasi hutan kota tematik dan kuliner.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan Pantai Tamarunang, potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, artefak dan tinggalan sejarah lainnya, serta wisata minat khusus kuliner Coto Kuda, Konro Kuda dan *Gantala Jarang*.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Binamu dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.3 Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Binamu dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
DTW	Alam		
1	Pantai Tamarunang Kec. Binamu	3. Rekreasi Keluarga4. Panorama Pantai	Potensial
2	Pantai Karaeng Sutte (Karsut) Kec. Arungkeke	Panorama Alam Rekreasi dan Olahraga	Potensial
3	Sejarah dan Budaya Rumah Adat		Kurana
3	Kerajaan Binamu Kec. Binamu	Rumah Adat Benda Sejarah	Kurang
4	Rumah Adat Kerajaan Binamu Raja Patappoi Kr Loloa Kec. Binamu	3. Rumah Adat4. Benda Sejarah	Kurang
5	Rumah adat Sapanang Kec. Binamu	3. Rumah Adat4. Benda Sejarah	Kurang
6	Makam Kr. Balang dan Gallarang Tannginunga Je'ne Kec. Binamu	3. Makam4. Tinggalan Arkeologi	Kurang
7	Makam Kr. Karampang Butung Kec. Binamu	Makam Tinggalan Arkeologi	Kurang
8	Makam Kr. Bebang Kec. Binamu	3. Makam4. Tinggalan Arkeologi	Kurang
9	Makam Patima Dg Ti'no Kec. Binamu	3. Makam4. Tinggalan Arkeologi	Kurang
10	Maulid Sidenre Khusus Kelompok Sayye Kec. Binamu	2. Ritual Budaya	Baik
	Minat Khusus		1
11	Lapangan Pacuan	3. Pacuan Kuda	Potensial

	Kuda Andi Lomba Lamae Kr. Lomba Kec. Binamu	4. Atraksi Budaya	
12	Taman Turatea Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Baik
13	Taman Siswa Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Kurang
14	Taman PKK Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Kurang
No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual
15	Taman Dharma Wanita Persatuan Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Kurang
16	Taman Lalu Lintas Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Kurang
17	Taman Pacuan Kuda Kec. Binamu	1. Rekreasi Keluarga	Kurang
18	Hutan Kota Kec. Binamu	Rekreasi Keluarga	Baik
19	Coto/ Konro Kuda Kec. Binamu	Kuliner Tradisional	Potensial

Sumber: Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Binamu dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 19 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 4 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk "Potensial", 3 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Baik" dan 12 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Kurang".

d. KSPD Tarowang dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Tarowang dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata buatan berbasis pantai, wisata edukasi dan ekologi berbasis hutan *Mangrove*, dengan variasi wisata sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Kawasan Hutan Mangrove Balang Beru, Pantai Ujung Timur, potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat dan tinggalan sejarah lainnya, serta wisata minat khusus pembuatan garam pada tambak garam tradisional .

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Tarowang dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.4 Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Tarowang dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual		
DTW Alam					
1	Pantai Ujung Timur	3. Panorama Alam	Potensial		
	Kec. Tarowang	4. Rekreasi pantai			
2	Wisata Hutan	4. Panorama alam	Potensial		
	Mangrove Balang	5. Flora dan fauna			
	Beru Kec. Tarowang	6. Wisata Edukasi			
No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual		
3	Pantai Kampung	3. Panorama Alam	Baik		
	Sicini	4. Rekreasi dan Olahraga			
	Kec. Arungkeke				
DTW	Sejarah dan Budaya				
4	Rumah Adat	3. Rumah Adat	Kurang		
	Kampala	4. Benda Sejarah			
	Kec. Arungkeke				
5	Rumah Adat	3. Rumah Adat	Kurang		
	Bulo – Bulo	4. Benda Sejarah			
	Kec. Arungkeke				
6	Je'ne-je'ne Sappara	3. Pesta Rakyat	Potensial		
	Kec. Tarowang	4. Ritual Budaya			
7	Permandian	3. Sumur Permandian	Kurang		
	Bungung Salapang	4. Ritual Budaya			
	Kec. Tarowang				
8	Rumah Adat	3. Rumah Adat	Kurang		
	Arungkeke	4. Benda Sejarah			
	Kec. Arungkeke				
	Minat Khusus	T			
9	Tambak Garam	3. Kreativitas Masyarakat			
	Kec. Arungkeke	4. Industri Garam Rakyat			

Sumber: Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Tarowang dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 9 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 4 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk "Potensial", 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Baik" dan 4 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Kurang".

e. KSPD Rumbia dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Rumbia dan sekitarnya merupakan kawasan strategis dengan tema unggulan aktivitas dan atraksi wisata ekologi terintegrasi antara keindahan

alam berupa air terjun, goa, gunung, sungai dan hutan dengan wisata buatan berupa kolam permandian, sawah, perkebunan dan wisata sejarah dan budaya.

Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Lembah Hijau Rumbia, Air Terjun Tama'lulua, Air Terjun Boro, Air Terjun Lembah Impian, dan Lembah Bontolojong, potensi wisata sejarah dan budaya berupa makam, rumah adat, artefak dan tinggalan sejarah lainnya, serta wisata minat khusus wisata agro, persawahan, dan sungai Ta'lambua.

Kondisi potensi wisata pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rumbia dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.5 Kondisi Aktual Daya Tarik Wisata KSPD Rumbia dan Sekitarnya

No	Nama DTW	Atraksi	Kondisi Aktual			
DTW Alam						
1	Goa Gantarang Buleng Kec. Kelara	1. Goa 2. Panorama Alam	Potensial			
2	Lembah Hijau Rumbia Kec. Rumbia	1. Panorama Alam 2. Kolam Renang 3. Out-bound 4. Wisata Agro	Potensial			
3	Air Terjun Tama'lulua Bossolo Kec. Rumbia	1. Panorama Alam 2. Air Terjun 3. Goa	Potensial			
4	Air terjun Boro Kec. Rumbia	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Potensial			
5	Pasanggarahan Loka Kec. Rumbia	Panorama Alam	Baik			
6	Salu Lompoa Kec. Rumbia	Panorama Alam	Baik			
7	Air terjun Lembah Impian Kec. Rumbia	1. Panorama Alam 2. Air terjun 3. Goa dan Sumur	Potensial			
8	Wisata Lembah Bontolojong Bulu Kec. Rumbia	Panorama Alam	Potensial			
9	Air terjun Kara'ngasa Kec. Rumbia	1. Panorama Alam 2. Air Terjun	Potensial			
10	Sungai Ta'lambua Kec. Turatea	1. Panorama Alam 2. Permandian Alam	Baik			
DTW Sejarah dan Budaya						
11	Rumah adat	1. Rumah Adat	Baik			

	Kambara' Tolo'	2. Benda Sejarah	
	Kec. Kelara		
12	Mesjid Tua Tolo'	1. Rumah Ibadah	Kurang
	Kec. Kelara	2. Benda Sejarah	
13	Makam Tuang	1. Makam	Baik
	Nong (Tung Nung)	2. Tinggalan Arkeologi	
	Kec. Kelara		

Sumber: Hasil Olahan, 2018

Kondisi aktual Daya Tarik dan Atraksi Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Rumbia dan sekitarnya cukup bervariasi, dari 13 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata yang ada terdapat 7 buah Daya Tarik Wisata dan atraksi diantaranya termasuk "Potensial", 5 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Baik" dan 1 buah Daya Tarik dan Atraksi Wisata termasuk "Kurang".

BAB - 11

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN JENEPONTO

Strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu pada konsep-konsep umum pengembangan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai pariwisata dunia yang kuat, berenergi, tenteram, ekologis, dinamis, sehat, terkendali dan diperuntukkan bagi rakyat. Berlandaskan pada konsep pengembangan tersebut, maka strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto diarahkan pada konsep pengembangan dalam aspek tata ruang, pengembangan produk, pengembangan industri dan investasi, pengembangan pasar dan pemasaran, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

11.1 Arahan dan Strategi Dalam Pengwilayahan Destinasi

Arahan kebijakan pengwilayahan destinasi pariwisata di Kabupaten Jeneponto yang baik untuk diterapkan sesuai dengan konsep pengembangan umum pariwisata adalah kebijakan sistem ruang pariwisata yang terpadu yang merupakan sistem pengelompokan daya tarik dan atraksi wisata dengan tema khusus yang terdapat fungsi-fungsi penunjang lainnya.

Konsep strategi kepariwisataan secara spasial disusun dengan tujuan mengorganisasi daerah tujuan wisata agar terdristribusi secara terpadu dan saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya daerah tujuan wisata yang terdistribusi secara terpadu akan menjadi pendorong untuk terwujudnya distribusi kunjungan wisatawan yang merata. Pembentukan ruang-ruang pariwisata yang bertema khusus dan berciri khas tertentu akan mendukung pengembangan karakter produk wisata. Ruang ini ditentukan melalui zonasi dengan konsep bounderless-tourism.

Secara detail, pengembangan ruang atau kawasan pengembangan atau daerah tujuan wisata (DTW) dengan karakter produk tertentu tersebut memiliki tujuan :

a. Untuk membuat delineasi produk wisata atau mengembangkan keragaman produk wisata dalam suatu wilayah pengembangan, sehingga dapat dikembangkan sejumlah kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik atau karakter produk yang spesifik. Keragaman atau diversifikasi produk tersebut, dimaksudkan agar wilayah tersebut memiliki daya tarik yang beragam dan menarik pangsa pasar yang beragam pula. Daya tarik yang beragam akan memberi

- peluang pergerakan atau distribusi yang merata pada kawasan pengembangan pariwisata yang dikembangkan
- b. Pembentukan kawasan pengembangan pariwisata untuk mengorganisasikan sejumlah daerah tujuan wisata (DTW) dan daya tarik wisata dalam suatu keterkaitan hubungan yang saling mendukung diantara daerah tujuan wisata (DTW) yang berdekatan, sehingga kunjungan wisatawan pada salah satu daerah tujuan wisata (DTW) pada suatu kawasan pengembangan pariwisata akan dapat didistribusikan dan memberi nilai manfaat bagi daerah tujuan wisata (DTW) di sekitarnya
- c. Pembentukan kluster pengembangan pariwisata yang menghimpun daerah tujuan wisata (DTW) yang berdekatan, memiliki kesamaan karakter, dan keterkaitan akses dan pencapaian dalam satu kawasan pengembangan juga dimaksudkan untuk membangunkan pola atau sistem layanan yang terpadu diantara daerah tujuan wisata yang saling dikaitkan tersebut.

Secara rinci strategi pengembangan pariwisata dalam aspek tata ruang dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto, diantaranya:

- 1. Mengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu;
- 2. Pemeliharaan dari dampak negatif terhadap Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

11.1.1 Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus Dan Terpadu

Strategi 1. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) merupakan landasan utama dalam pengembagan pariwisata daerah. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) kabupaten Jeneponto ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- f. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/ atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);
- g. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara lokal, regional, nasional dan/ atau internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- h. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;

- i. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- j. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan potensi alam, budaya dan sumberdaya pariwisata kabupaten Jeneponto maka program yang akan dilaksanakan adalah penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) sesuai dengan tema utama pengembangan, yaitu: DPD berbasis wisata alam, DPD berbasis wisata sejarah dan budaya, DPD berbasis wisata wisata minat khusus dengan pusat pangembangan sebagai berikut :

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) wisata alam, Pulau Libukang (Pulau Harapan) dan sekitarnya. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis pantai, laut, dan pulau, wisata minat khusus, serta wisata sejarah dan budaya, dengan perioritas pengembangan adalah :
 - 1) Berbasis pulau adalah Pulau Libukang (Pulau Harapan) di kecamatan Bangkala;
 - 2) Berbasis pantai adalah Pantai Garassikang di Kecamatan Bangkala;
 - 3) Berbasis panorama ketinggian adalah Bukit Toenga di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala;
 - 4) Berbasis panorama pesisir adalah Batu Sipinga di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat;
 - 5) Berbasis Bukit adalah Bukit dan Danau Bulu Jaya di Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat;
 - 6) Berbasis Kuliner adalah Kawasan Kawasan pembuatan dan penjualan Lammang di Ruku-Ruku kelurahan Palengu' kecamatan Bangkala.dan
 - 7) Berbasis Ekonomi Kreatif adalah Kawasan Tambak Garam Tradisional Nasara di Kecamatan Bangkala.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Lembah Hijau Rumbia dan sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata alam berbasis Gunung, Bukit, Lembah, Air Terjun, Goa dan Hutan dengan variasi aktivitas wisata sejarah dan budaya, dengan prioritas pengembangan adalah :
 - Berbasis minat khusus Ekowisata, pada kawasan Lembah Hijau Rumbia di Desa Bontonompo Kecamatan Rumbia;
 - Berbasis wisata minat khusus Petualangan dan Camping, pada Wisata Lembah Bontolojong di Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia;
 - Berbasis wisata minat khusus petualangan sungai (*river tubing*), pada Sungai Ta'lambua di Desa Paitana Kecamatan Turatea;

- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kompleks Makam Raja-Raja Binamu dan sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah makam Raja-Raja, Rumah Adat, dan tinggalan sejarah lainnya dengan variasi aktivitas wisata alam rekreasi pantai, dengan prioritas pengembangan adalah:
 - Berbasis wisata sejarah, pada Kompleks Makam Raja-Raja Binamu di Kecamatan Bontoramba;
 - 2) Berbasis wisata rekreasi pantai, pada Pantai Birta Ria Kassi di Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea.
- d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Kawasan Hutan Mangrove Balang Beru dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata edukasi dan ekologi, wisata sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus, dengan prioritas pengembangan adalah
 - 1) Berbasis wisata edukasi dan ekologi, pada Kawasan Hutan *Mangrove* di Desa Balang Beru Kecamatan Tarowang;
 - 2) Berbasis wisata rekreasi pantai, pada Pantai Ujung Timur di Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang;
 - 3) Berbasis wisata budaya, pada *Je'ne-je'ne Sappara* di Desa Tarowang Kecamatan Tarowang;
- e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) **Pantai Tamarunang dan Sekitarnya**. Daya tarik utama DPD ini adalah wisata buatan (*man-made*) rekreasi keluarga, kuliner serta wisata sejarah dan budaya, dengan prioritas pengembangan adalah
 - 1) Berbasis wisata MICE, pada Bintang Karaeng Resort dan Kawasan Pantai Tamarunang di Kecamatan Binamu;
 - 2) Berbasis wisata rekreasi pantai, pada Pantai Karaeng Sutte (Karsut) di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke;
 - 3) Berbasis wisata Kuliner, pada Coto Kuda, Konro Kuda dan Gantala Jarang di kecamatan Binamu, Kawasan penjualan Ballo Tanning di kecamatan Tamalatea;

Strategi 2. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

Berdasarkan hasil analisis potensi daya Tarik wisata dan pendekatan zonasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka program yang akan dilaksanakan adalah penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) kabupaten Jeneponto sebagi berikut :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1, terdiri dari kecamatan Bangkala dan kecamatan Bangkala Barat:
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2, terdiri dari kecamatan Bonto Ramba dan kecamatan Turatea;

- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3, terdiri dari kecamatan Kelara dan kecamatan Rumbia:
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4, terdiri dari kecamatan Tarowang, kecamatan Batang, dan kecamatan Arungkeke; dan
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5, terdiri dari kecamatan Binamu dan kecamatan Tamalatea.

Selain penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), program lain yang mendukung untuk dilaksanakan adalah penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) khususnya dalam mengantisipasi pertumbuhan daya tarik dan atraksi wisata baru yang ditemukan atau dikembangkan di kabupaten Jeneponto sehingga arah pengembangan dan pengelolaannya tetap terintegrasi dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan.

Strategi 3. Penentuan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) merupakan landasan bagi perumusan rencana lebih lanjut secara spasial. Perwilayahan ini merupakan salah satu metode yang ditujukan untuk menentukan batas-batas kesamaan produk ruang khususnya berkaitan dengan kepariwisataan (daya tarik wisata, pencapaian, dan fasilitas pendukung).

Secara spesifik, kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) ini merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata dan menjadi prioritas dalam pengembangan kepariwisataan khususnya untuk pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) atau destinasi. Mengingat pentingnya penentuan KSPD ini maka penentuannya didasarkan pada beberapa kondisi yang merujuk kepada tuntutan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Jeneponto, yaitu:

- 1. Memiliki sumber daya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan baik untuk pasar nasional maupun internasional
- 2. Kedudukan dan sebaran daerah tujuan wisata (DTW) sebagai kawasan yang memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan pariwisata guna pemerataan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jeneponto
- 3. Sebaran aksesibilitas/ pencapaian pendukung yang merata antar daerah tujuan wisata (DTW)
- 4. Sebaran fasilitas pendukung wisata/failitas pelayanan antar daerah tujuan wisata (DTW)
- 5. Struktur ruang dan potensi daerah tujuan wisata yang dapat berfungsi sebagai peghubung antar daerah tujuan wisata (DTW) disekitarnya
- 6. Adanya kesamaan karakter antar daerah tujuan wisata (DTW)

- 7. Kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan tren produk pariwisata ke depan
- 8. Kawasan tersebut telah memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata.
- 9. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
- 10. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan asset budaya
- 11. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah

Masing-masing KSPD memiliki karakter spesifik yang merupakan perpaduan antara unsur kesamaan tema, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian, serta kedekatan terhadap pusat pelayanan wisata. Cakupan daerah tujuan wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten Jeneponto.

Selain penetapan KSPD, pemerintah kabupaten Jeneponto juga menetapkan program penyusunan pola perjalanan wisata (travel pattern) sehingga dapat menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke kabupaten Jeneponto dalam memilih jenis wisata yang akan dilakukan berdasarkan tema minat kunjungan atau wilayah KPPD yang akan dikunjungi sesuai dengan ketersediaan waktu kunjungan dan biaya yang dikeluarkan selama melakukan kunjungan ke kabupaten Jeneponto.

Strategi 4. Penetapan Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata Pada Setiap KPPD

Karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing KPPD disatukan oleh tema pengembangan yang mencerminkan jenis aktifitas pariwisata yang berlangsung didalamnya. Masing-masing KPPD didalamnya tersebar beberapa daya tarik dan atraksi wisata sehingga untuk mendukung aktivitas wisata didalamnya dibutuhkan fasilitas pelayanan pariwisata. Menentukan pusat pelayanan pariwisata erat kaitannya dengan fungsi KPPD sebagai prioritas pengembangan pariwisata. Dengan demikian jangkauan pelayanan yang dilakukan terhadap aktifitas wisata yang berlangsung dapat dengan mudah dicapai oleh wisatawan.

Pusat pelayanan informasi pariwisata secara spesifik merupakan cakupan wilayah yang dapat mendukung seluruh aktifitas wisatawan sehingga wisatawan dalam melakukan kegiatannya merasa nyaman, aman, terpenuhi segala kebutuhannya. Mengingat pentingnya dukungan dari pusat pelayanan ini maka menentukan wilayah yang menjadi pusat pelayanan informasi pariwisata didasarkan atas jarak, kedekatan daerah tujuan wisata (DTW)/ destinasi dan kemudahan pencapaian.

Berdasarkan arahan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jeneponto, maka rencana program penetapan pusat pelayanan informasi pariwisata disesuaikan dengan fungsi

wilayah sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Program penetapan pusat pelayanan informasi pariwisata pada masing-masing KPPD adalah sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 1 terdiri dari kecamatan Bangkala Barat dan kecamatan Bangkala, ditempatkan di Allu Kecamatan Bangkala;
- b. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 2 terdiri dari kecamatan Bontoramba dan kecamatan Turatea, ditempatkan di Kawasan Paitana kecamatan Turatea;
- c. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 3, terdiri dari kecamatan Rumbia dan kecamatan Kelara, ditempatkan di Kawasan Rumbia kecamatan Rumbia;
- d. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 4, terdiri dari kecamatan Arungkeke, kecamatan Batang, dan kecamatan Tarowang di tempatkan di Kawasan Tarowang kecamatan Tarowang; dan
- e. Pusat pelayanan informasi pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona 5, terdiri dari kecamatan Tamalatea dan kecamatan Binamu, ditempatkan di Perkotaan Bontosunggu kecamatan Binamu sekaligus sebagai Pusat Informasi dan Promosi Kepariwisataan Kabupaten.

Selaian penetapan Pusat pelayanan informasi pariwisata (tourist information center) pada masing-masing Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPD), program lain yang mendukung peran Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) adalah penyusunan paket wisata dengan melibatkan para pelaku pariwisata kabupaten Jeneponto khususnya Biro perjalanan Wisata, pengelolan kawasan dan daya tarik serta atraksi wisata yang ada. Dengan demikian maka setiap daya tarik prioritas dan potensial pada masing-masing KSP dapat dipasarkan dengan baik dan terarah.

Strategi 5. Peningkatan dan Pengembangan KSPD

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) merupakan bagian penting dalam sistem kepariwisataan Kabupaten Jeneponto dengan fungsi utama sebagai kawasan yang bersentuhan langsung dengan aktifitas wisatawan sehingga strategi ini diharapkan mampu mendukung aktifitas wisatawan berdasarkan aktifitas yang disenangi wisatawan pada kawasan tertentu.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) jika dibangun sesuai dengan fungsi dan tahapan yang benar, maka sektor pariwisata akan mampu mendorong perekenomian daerah lebih cepat dan merata di Kabupaten Jeneponto dengan meningkatkan distribusi peluang usaha, peluang kerja, dan peluang bagi masyarakat untuk menerima manfaatnya. Penerapan fungsi KSPD akan didukung dengan penentuan *master plan*

kawasan dan zonasi kawasan sehingga akan memiliki arahan yang jelas dalam pengembangan fungsi KSPD.

Untuk dapat merencanakan dan mengembangkan potensi daya tarik dan atraksi wisata yang ada pada masing-masing KSPD, dibutuhkan dokumen perencanaan berupa Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPO) dengan memperhatikan tema utama pengembangan obyek dan kawasan, keterkaitan dengan daya tarik dan atraksi wisata lainnya dalam KSPD maupun dalam KPPD serta dengan KSPD dan KPPD lainnya di luar kawasan dalam kerangka perencanaan kabupaten Jeneponto dengan tetap memperhatikan serta menyesuaikan dengan pelestarian alam, lingkungan dan budaya masyarakat, visi dan misi pembangunan kepariwisataan serta sistem nilai masyarakat kabupaten Jeneponto.

Strategi 6. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata merupakan salah satu proses untuk menjadikan destinasi menjadi lebih baik dari sebelumnya yang dapat dilakukan dengan meremajakan, membangun baru ataupun dengan memelihara yang sudah ada agar lebih menarik dan berkembang sehingga mengundang wisatawan untuk datang berkunjung. Hal ini didukung dengan pengembangan DTW/ destinasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan pada umumnya. Akan tetapi, hal ini akan dapat berjalan denga n lancar jika didukung dengan keterlibatan semua *stakeholders* dalam pelaksanaannya.

Mengingat pentingnya pengembangan daerah tujuan wisata/ destinasi ini, maka strategi ini dilakukan dengan membutuhkan :

- a. Kesesuaian tema pengembangan daerah tujuan wisata/ destinasi dengan tema pengembangan pada KSPD dimana daerah tujuan wisata tersebut berada.
- b. Kesesuaian pusat pelayanan wisata dan skala pengelolaanya dengan zonasi yang akan dilakukan
- Kesesuaian akses pencapaian harus didukung dengan mudah dan cepat
- d. Dukungan oleh masing-masing stakeholders terkait untuk kesuksesan implementasi

11.1.2 Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata

Strategi 1. Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Usaha kepengelolaan dunia pariwisata mempunyai pengaruh yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari datangnya wisatawan untuk melakukan aktifitas wisatanya yang mempunyai kondisi berbeda dengan daerah asal wisatawan tersebut. Perkembangan pariwisata yang cepat dan terkonsentrasi tentu

saya diyakini juga memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap berbagai sektor didalamnya.

Sama halnya dengan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah yang telah direncanakan tentu saja akan memberikan berbagai dampak, baik terhadap lingkungan, dunia investasi, industri, dan masyarakatnya sendiri. Sehingga untuk memelihara perencanaan kawasan strategis pariwisata daerah ini juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang telah diatur didalamnya. Penegakan regulasi ini harus didukung oleh berbagai sektor dalam pelaksanaannya dilapangan sehingga dampakdampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.

Program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan strategi ini adalah Penetapan Naskah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), dan konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan.

Strategi 2. Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Dan Masyarakat.

Penegakan regulasi untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, keterlibatan seluruh *stakeholders* memiliki peranan yang paling penting dalam pelaksanaannya. Kenyataan ini harus didukung dengan adanya keterlibatan dan keterbukaan dari masing-masing pihak yang memiliki hubungan didalamnya. Dalam hal ini, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan harus berlangsung dengan baik dan berkelanjutan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya.

Koordinasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan ini dapat dilakukan koordinasi lintas wilayah maupun lintas sektoral terkait. Hal ini berkaitan dengan pengembangan yang akan dilakukan terhadap KSPD dan DTW dimana pengelolaannya tidak dapat diserahkan hanya kepada salah satu pihak saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama karena pada hakikatnya merupakan hal yang kompleks dan multidimensional sehingga keterpaduan dan keberlanjutan akan terus berjalan sesuai dengan yang visi misi pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka program yang akan dilaksanakan adalah pembentukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto (BPPPJ) sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto, Generasi Pesona Indonesia (GENPI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dan pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata

11.2 Arahan dan Strategi Pengembangan Produk Pariwisata

Produk wisata terdiri atas tiga aspek, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto perlu diarahkan pada peningkatan nilai produk pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui perencanaan dan pengembangan produk pariwisata.

11.2.1 Pengembangan Daya Tarik Dan Atraksi Wisata

Arahan pengembangan produk wisata yang pertama adalah mengembangkan daya tarik dan DTW. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat tercapai apabila daya tarik wisata lebih berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Daya tarik wisata bukan hanya dapat diperoleh dari pembenahan dan pengembangan daerah wisata yang telah ada, melainkan juga dapat ditingkatkan dengan penambahan daerah tujuan dan daya tarik wisata baru. Oleh karena itu, strategi yang perlu disusun untuk pemenuhan arahan pengembangan daya tarik wisata di antaranya peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi daerah tujuan wisata yang telah ada dan pengembangan daerah tujuan wisata baru di Kabupaten Jeneponto.

Strategi 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas DTW

Untuk mencapai strategi ini, dapat dilaksanakan beberapa program yang mendukung keberhasilan strategi pengembangan pariwisata. Program-program tersebut haruslah fokus terhadap lokasi maupun arah kegiatan. Pertimbangan tersebut kemudian dijadikan acuan penyusunan program pencapaian strategi yang berorientasi pada daerah tujuan wisata unggulan dan potensial pada masing-masing KSPD. Program-program tersebut di antaranya:

- Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya) melalui penjadwalan rutin pertunjukan dan koordinasi antar pengelola pariwisata;
- b. Penyusunan master plan kawasan night market & culinary (Food and Shopping Street);
- c. Pengembangan materi informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah melalui pembangunan museum;
- d. Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
- e. Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Jeneponto;
- **f.** Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata;
- g. Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi laut yang mudah dan aman dari dan ke pulau;

- h. Pengembangan ekowisata pada Kawasan Lebah Hijau dan Hutan Mangrove Balang Beru;
- i. Pengembangan wisata minat khusus adventure pada Kawasan Lembah Bontolojong dan Sungai Ta'lambua; dan
- j. Pengembangan fasilitas Wisata MICE.

Strategi 2. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata Baru

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Jeneponto dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan maka strategi pengembangan data tarik dan atraksi wisata baru merupakan langkah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di kabupaten Jeneponto.

Pola pembangunan daya tarik dan atraksi wisata sebaiknya dilakukan secara tuntas sehingga diharapkan setiap tahun akan terdapat daya tarik dan atraksi wisata baru yang akan memicu minat wisatawan berkunjung dan atau berkunjung kembali ke kabupaten Jeneponto.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan strategi tersebut adalah :

- a. Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi laut, pantai dan sungai seperti snorkeling, parasailing, Jetski, volley pantai, kitesurf/ selancar layang, flying fish, flyingboard dan tubing;
- **b.** Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan;
- c. Pengembangan kampung berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat seperti pasar tradisional sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto;
- **d.** Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep *marine tourism*;
- e. Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *marine tourism* dan *glamour camping* (*glamping*) pada kawasan pulau, pantai, hutan dan pegunungan;
- **f.** Perencanaan dan pengembangan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan panorama alam.

Strategi 3. Pengembangan Sistem Jaringan Fungsional Pariwisata

Pengembangan Sistem Jaringan Fungsional Pariwisata merupakan keterkaitan pengembangan antar komponen fungsional dalam mendukung dan mengakomodasikan pergerakan wisatawan dari memulai perjalanan, kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, pemanfaatan fasilitas wisata, hingga kembali ke pintu masuk.

Komponen-komponen fungsional yang dimaksud adalah (1) Gerbang (*Entry Point*), yaitu lokasi yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai titik rangkap kedatangan wisatawan sekaligus

titik distribusi perjalanan wisatawan ke lokasi atraksi wisata utama di kawasan; (2) Destinasi, yaitu lokasi-lokasi yang dikembangkan sebagai titik tujuan wisata; (3) Touring Base, yaitu lokasi yang dikembangkan untuk menyandang fungsi sebagai titik-titik perhentian wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata dimana pada lokasi tersebut dikembangkan fasilitas akomodasi untuk menginap (Stay overnight) dan fasilitas wisata lain untuk mendukung kebutuhan perjalanan wisata.; (4) Lokasi Persinggahan (Rest Area), Lokasi yang dikembangkan untuk menyandang fungsi sebagai titik persinggahan (stop over) wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Pada lokasi tersebut tidak diprioritaskan pengembangan fasilitas akomodasi. Pengembangan fasilitas wisata pendukung diprioritaskan pada fasilitas-fasilitas seperti: rumah makan, biro perjalanan wisata, toko cinderamata, kios informasi wisata, anjungan pandang, area parkir, dermaga dan fasilitas pelengkapnya; (5) Titik Transit, yaitu area ini menyandang fungsi sebagai titik simpul pergerakan untuk kegiatan transfer antar moda (terminal dan pelabuhan); (6) Kawasan Wisata Terpadu (Integrated Resort) yaitu area yang cukup luas yang dikembangkan untuk fungsi peristirahan dan rekreasi. (7) Jalur Wisata yang dikembangkan untuk menghubungkan lokasi-lokasi tujuan wisata dan mengakomodasikan rute pergerakan wisatawan.

Strategi 4. Pengembangan Produk Yang Berkontribusi Terhadap Pelestarian Alam dan Budaya.

Inovasi pengembangan pariwisata yang berkontribusi ada upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya menjadi salah satu yang dapat menarik wisatawan. Perubahan paradigma berlibur oleh wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa mereka menginginkan pengalaman berlibur yang berkualitas. Kualitas perjalanan sangat ditentukan oleh produk wisata dan pelayanan yang ditawarkan.

Hasil survey tahunan ABTA (*Association British Travel Agent*) tahun 2008, menunjukkan bahwa 83% wisatawan yang disurvey menginginkan liburannya tidak merusak lingkungan; 71% ingin liburannya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di destinasi yang dikunjungi; 77% ingin agar dalam liburannya mendapatkan pengalaman mencicipi makanan dan budaya lokal; 54% ingin tahu lebih banyak tentang isu sosial dan lingkungan di destinasi sebelum mereka memutuskan membeli paket perjalanan. Walaupun tidak merefleksikan semua wisatawan mancanegara, akan tetapi hasil survey ABTA setidaknya menunjukkan bahwa wisatawan selama berlibur menginginkan kontribusi yang positif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi peluang untuk pengelola bisnis pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menawarkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Sebagai contoh dengan melibatkan masyarakat dalam monitoring sumber daya alam laut, maka kegiatan yang ditawarkan

adalah melakukan penanaman dan penataan bersama masyarakat lokal untuk lakukan monitoring kualitas hutan *mangrove*, sekaligus mengamati dan menikmati keindahan wisata hutan mangrove. Sementara beberapa kegiatan bersama masyarakat, juga dapat ditawarkan seperti bagaimana melakukan proses masak-memasak dan juga persiapan kegiatan seni.

Kegiatan yang ditawarkan kepada wisatawan adalah prosesnya, bukan sekedar menikmati tarian maupun mencicipi makanan lokal, karena ikut melakukannya merupakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan dan juga masyarakat. Pada prinsipnya adalah menawarkan kegiatan wisata yang aktif dan interaktif dengan masyarakat lokal. Walaupun hampir merata pada setiap KSPD dapat menawarkan variasi produk wisata alam dan budaya, akan tetapi strategi menciptakan tema pada masingmasing KSPD bersadarkan keunggulannya, menjadi salah satu strategi yang akan memberikan nilai tambah. Tujuan pemberian tematik pada setiap KSPD adalah untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, selain itu untuk meningkatkan kualitas produk karena saling menunjang satu KSPD dengan KSPD yang lain dari sisi tawaran produk kepada wisatawan

11.2.2 Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata

Pengembangan daya tarik wisata perlu ditunjang dengan fasilitas pariwisata yang memadai. Pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang baik juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas profuk pariwisata. Arahan kebijakan fasilitas pariwisata adalah mengembangkan fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata secara masif dan terarah.

Untuk memenuhi arahan ini, maka ada dua strategi yang perlu disusun dan dijalankan, yaitu pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan peningkatan sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata yang berstandar nasional dan internasional.

Strategi 1. Pengembangan Fasilitas Pariwisata Yang Ramah Lingkungan.

Strategi ini merupakan salah satu strategi agar manajemen destinasi pariwisata Kabupaten Jeneponto beradaptasi dengan isu-isu perubahan iklim yang pada masa akan datang akan semakin kuat. Isu-isu lingkungan, hemat energy juga telah mempengaruhi wisatawan dalam memilih destinasi yang ingin dikunjunginya. Destinasi yang memperhatikan dan mengelola fasilitas pariwisata dengan teknologi yang ramah lingkungan, dipastikan akan mendapatkan nilai tambah dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan.

Peningkatan fasilitas pendukung yang mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan faktor keselamatan pengunjung akan mempermudah pengelolaan daya tarik itu sendiri. Strategi ini kemudian diikuti dengan penyediaan transportasi perahu kayu yang disewakan, sehingga pengunjung yang menunggu giliran dapat melakukan aktivitas mendayung perahu di sekitar lokasi wisata.

Hal ini tentunya peluang usaha baru dan juga melibatkan banyak masyarakat untuk menerima manfaat. Jika jumlah kunjungan mengalami peningkatan tajam, maka pengelola dapat menentukan lama waktu kunjungan, sehingga dapat merotasi pengunjung lebih cepat dan dengan demikian penerimaan manfaat menjadi optimal, sementara dampak terhadap lingkungan masih tetap dapat terjaga.

Sejalan dengan itu maka pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan fasilitas pariwisata yang berdampak rendah pada lingkungan, hemat sumber daya alam dan menggunakan teknologi tepat guna.

Strategi 2. Peningkatan Standar Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Fasilitas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Strategi ini merupakan upaya peningkatan kualitas fasilitas pariwisata Kabupaten Jeneponto. Strategi ini mencakup sistem pelayanan dan pengelolaan yang memenuhi standar yang merata kepada setiap pengunjung. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik dalam pengadaan, penempatan dan pemeliharaan fasilitas pariwisata sehingga perkembangan aktivitas pariwisata pada data tarik wisata tidak memberikan dampak negatif terhadap daya tarik wisata dan lingkungannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemenfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan informasi dalam pengelolaan fasilitas pariwisata khususnya pada daya Tarik wisata dengan potensi pengunjung yang temporer dengan karakteristik tamu rombongan yang cukup besar.

11.2.3 Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari Dan Ke DTW

Aksesibilitas atau kemudahan pencapaian daerah tujuan sangatlah penting karena merupakan bagian dari tiga komponen utama pengembangan produk pariwisata. Arahan kebijakan aksesibilitas pada pengembangan produk wisata Kabupaten Jeneponto adalah mengembangkan tingkat pencapaian daerah tujuan wisata di Kabupaten Jeneponto. Strategi yang penting untuk dijalankan sesuai dengan arahan tersebut adalah peningkatan tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi dan peningkatan aksesibilitas laut dan darat, mengingat wisata Kabupaten Jeneponto sebahagian besar berbasis wisata alam pegunungan, sejarah budaya dan pulau dengan kondisi sebaran wilayah yang cukup sulit diakses.

Strategi 1. Peningkatan Kualitas Tata informasi

Tata informasi harus mudah diakses oleh pengunjung, baik informasi di media elektronik, maupun informasi di destinasi. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna peningkatan kenyamanan pengunjung. Tata informasi yang terdiri dari media cetak termasuk papan informasi umum dan khusus, papan penunjuk arah, buku panduan untuk wisatawan, dan buku panduan untuk pelaku menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan destinasi pariwisata. Keberhasilan melakukan tata informasi diyakini dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk datang kembali ke Kabupaten Jeneponto. Wisatawan umumnya mengutamakan keamanan dan rasa aman diciptakan dengan informasi yang mudah diakses, dan akurat.

Informasi yang ditampilkan di mulai dari pintu masuk Pelabuhan Laut, dan Terminal Regional. Tata informasi juga sangat penting di tingkat daya tarik dan titik-titik persinggahan di jalur wisata. Informasi terpenting dalam upaya mencapai visi adalah informasi tentang kode etik yaitu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh (don't dan do) selama berada di daerah konservasi. Selain itu dalam memperkaya khasanah wisatawan tentang Kabupaten Jeneponto dan menambah pengalaman yang maka informasi dapat berisikan: (a) informasi mengenai ekosistem hutan mangrove, pulau, dan taman hutan raya meliputi species-species flora dan fauna atau tempat-tempat vang perlu dilindungi sekaligus lokasi yang perlu dihindari karena berbahaya; dan kawasan konservasi (b) budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat, utamanya situs sejarah dan budaya serta benda purbakala; (c) batasan waktu kunjungan yang ditetapkan oleh pengelola bagi para wisatawan pada beberapa daya tarik tertentu, guna menjaga keutuhan ekosistem atau spesies tertentu; dan (d) informasi dan pemantauan terhadap daerah rawan bencana.

Strategi 2. Peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata

Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal dapat menunjang dan membantu mobilitas para wisatawan untuk mencapai setiap daya tarik wisata di Kabupaten Jeneponto. Selain itu, jaringan aksesibilitas tidak hanya bermanfaat untuk wisatawan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat lokal untuk aktivitas sehari-hari. Aksesibilitas difokuskan untuk meningkatkan daya saing moda transportasi laut dan darat dengan standar pelayanan bertaraf nasional dan internasional.

Peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui peningkatan frekwensi maupun kapasitas kapal yang menghubungkan wilayah daratan sebagai titik penyebaran wisatawan menuju Pulau Libukang (Pulau Harapan). Oleh karena keterbatasan sumber daya, maka berbagai pihak harus ikut didorong untuk mengembangkan pelayanan ini; seperti kelompok masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha penyewaan perahu bermotor atau kendaraaan bermotor.

11.3 Arahan dan Strategi Pengembangan Industri dan Investasi

Industri dan investasi dalam dunia pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilannya. Kedua sektor ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Jeneponto karena akan memberikan *multiplier effect* dan berfungsi sebagai katalisator pembangunan pariwisata. *Multiplier effect* ini akan terjadi karena industri pariwisata ini tidak berdiri sendiri, industri dan investasi pariwisata akan mampu menghasilan devisa karena didalamnya terdapat sektor-sektor lain yang produk-produknya dibutuhkan oleh dunia pariwisata serta dapat juga digunakan sebagai saranan untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja. Selain itu, industri dan investasi bagaikan motor yang menggerakkan ekonomi nasional maupun regional, kehidupan karena pembentukan memperbesar kapasitas modal produksi, meningkatkan PDB, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Arahan kebijakan pengembangan industri dan investasi Kabupaten Jeneponto pariwisata juga dilakukan dengan menyesuaikan konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto yaitu dengan arahan kebijakan pengembangan secara terpadu. Sistem terpadu ini merupakan iuga pengelompokan kawasan industri pariwisata yang mana dalam kelompok tersebut akan dikolaborasikan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan wisata yang ada didalamnya. Konsep ini disusun dengan tujuan mengorganisasikan kawasan industri pariwisata agar mampu mendukung daerah tujuan wisata yang ada sehingga mampu memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam melakukan aktifitas wisatanya.

Secara rinci arahan kebijakan pengembangan pariwisata dalam aspek industri dan investasi dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Kebijakan tersebut meliputi :

- 1. Perencanaan Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto
- Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Pariwisaa Kabupaten Jeneponto
- 3. Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto
- 4. Peningkatan Pertumbuhan Investasi Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Strategi 1. Penetapan Kawasan Industri Pariwisata Yang Dapat Menjangkau Skala Regional Maupun Lokal

Kawasan industri pariwisata yang dimaksud merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan industri pariwisata baik berupa industri kecil dan industri menengah yang akan menjadi prioritas pengembangan pendukung kegiatan pariwisata. Kawasan industri ini merupakan kawasan primer untuk pemenuhan fungsi seluruh rangkaian pemenuhan kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya sampai kembali ke tempat asalnya.

Penentuan kawasan industri pariwisata ini merupakan landasan dalam perumusan pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan wisatawan yang berkaitan dengan aspek perwilayahan. Perwilayahan ini merupakan salah satu metode yang ditujukan untuk menentukan batas-batas pemenuhan kebutuhan fasilitas wisatawan khususnya berkaitan dengan kepariwisataan.

Mengingat pentingnya penentuan kawasan industri ini maka penentuannya didasarkan pada beberapa kondisi yang merujuk kepada tuntutan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan disesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Jeneponto, yaitu didasarkan berdasarkan jarak dan waktu tempuh, kedekatan daerah tujuan wisata (DTW)/ destinasi dan kemudahan pencapaian dalam skala pelayanannya.

Strategi 2. Peningkatan Fungsi Kawasan Industri Pariwisata

Berdasarkan fungsi kawasan industri pariwisata, maka perlu dukungan untuk melaksanakan fungsi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan dan pelibatan masyarakat untuk masuk dalam industri pariwisata masih terbatas pada pengelolaan rumah inap dengan kepemilikan sendiri ataupun jenis industri kecil yang diusahakan sendiri sehingga peluang-peluang lain tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti industri biro perjalanan wisata, industri kerajinan tangan, industri rumahan olah makanan, pemasok bahan baku lokal dan sebagainya.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dengan pelaku wisata yang datang dari luar mengenai industri dan bisnis pariwisata. Oleh karena itu, strategi ini ditawarkan untuk mendukung penentuan kawasan industri yang dengan mengidentifikasi peluang-peluang industri dan bisnis di tingkat lokal, membina secara khusus untuk menjadikan mereka pebisnis lokal dalam mengelola industri pariwisata oleh pemerintah sehingga dengan sendirinya pemasaran dan promosi dapat dilakukan secara tidak langsung oleh masyarakat pada produk-produk yang dilakukannya.

11.3.1 Pengembangan Perwilayahan Industri Pariwisata

Strategi 1. Peningkatan Kualitas Produk/ Rekayasa Inovasi Industri Pariwisata

Selain kebijakan perwilayahan kawasan industri, untuk mendukung keberhasilan pengembangan industri dan investasi pariwisata juga harus didukung dari sektor produk industri pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Produk industri wisata harus mampu memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah lain sehingga ada ciri khas yang diperoleh wisatawan ketika datang berkunjung ke Kabupaten Jeneponto. Hal ini harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru yang secara tidak langsung telah banyak mempengaruhi pola-pola persaingan antar wilayah atau antar negara untuk memperebutkan minat wisatawan datang berkunjung. Peningkatan kualitas produk dan rekayasa inovasi industri pariwisata yang mencakup destinasi, fasilitas penunjang wisata (amenitas), dan aksesibilitas.

Pemanfaatan sektor industri kecil dan industri menengah yang tersedia di Kabupaten Jeneponto diharapkan juga mampu menjadikan strategi ini sebagai cikal bakal dari pengembangan daya tarik wisata (atraksi) baru yang mampu menarik minat wisatawan datang berkunjung. Tentunya hal ini harus didukung dengan kesiapan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku industri yang akan menggarap produknya untuk dijual kepada wisatawan. Pemenuhan standar kebersihan pengelolaan, pengemasan, maupun hingga pelayanan secara berkelanjutan juga dibutuhkan untuk menimbulkan kepercayaan wisatawan akan produk yang ditawarkan.

Strategi 2. Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata.

Sejalan dengan pengembangan produk industri pariwisata yang ditawarkan, maka untuk meningkatkan hal tersebut harus didukung dengan kualitas pelaku industri yang baik pula. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan kreatiftas dan inovasi yang baru, maka pelaku industri harus mampu menemukan sesuatu yang spesifik yang dibutuhkan wisatawan sehingga mampu menarik minat wisatawan membeli produknya. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pelibatan masyarakat sebagai pelaku industri yang akan mendorong peningkatan perekenomian masyarakat sendiri, maka strategi ini ditawarkan sebagai salah satu cara memotivasi masyarakat untuk menciptakan peluang bisnis industri pariwisata.

Pelaksanaan strategi ini dapat memberikan suasana atau penyegaran baru untuk memunculkan ide kreatif dan inovasi/ rekayasa produk yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dalam pemenuhan produk industri pariwisata tersebut tercipta peningkatan keterampilan yang dimiliki, standar sertifikasi ahli yang dimiliki, ataupun pelibatan produk masyarakat dalam suatu pameran penjualan langsung kepada wisatawan.

11.3.2 Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Strategi 1. Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri.

Strategi ini diciptakan untuk membantu menarik pelaku usaha dalam hal ini masyarakat sehingga dapat menularkan pemahaman pelayanan yang baik melalui strategi *learning by doing* dimana masyarakat belajar langsung dari pelatihan yang

difasilitasi oleh pemerintah sehingga proses penciptaan ide kreatif atau rekayasa produk dapat dengan mudah dilakukan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan memberikan dukungan sehigga dengan mudah mempercepat proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bisnis pariwisata, standar pelayanan wisata serta hubungan yang kuat antara pariwisata dengan usaha pelestarian budaya dan alam sebagai asset pariwisata itu sendiri. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peluang bisnis industri pariwisata skala kecil dan menengah yang dapat menunjang pariwisata.

Strategi ini tentu saja memerlukan perhatian yang besar oleh pemerintah, karena strategi ini dapat mempercepat peningkatan pelibatan masyarakat dan sekaligus mengurangi potensi konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha (pemodal nasional maupun asing). Pola-pola kemitraan dapat diterapkan pemerintah dengan memberlakukan aturan bagi para pemodal untuk mengasuh atau membina usaha kecil dan menengah yang ada disekitar mereka melakukan investasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai mediator yang akan memfasilitasi peningkatan jejaring di antara pengusaha pariwisata dengan usaha kecil dan menengah di tingkat masyarakat.

Strategi 2. Penguatan Implementasi Kemitraan.

Untuk mendukung dilakukannya pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat maka usaha penguatan implementasi perlu dilakukan oleh keterlibatan dan pemahaman posisi masing-masing pihak. Dukungan usaha kepada masyarakat dapat diberikan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat melalui beberapa kementrian, misalnya Kementrian Pariwisata, Kementrian UMKM Dan Koperasi, dan sebagainya. Selain itu, strategi ini ditujukan juga kepada pemerintah guna memberikan penguatan implementasi penguatan keterlibatan masyarakat dengan menarik dukungan dari pihak lain, baik berupa LSM nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, perencanaan skema atau mekanisme penguatan pola kemitraan ini harus diperjelas sehingga masyarakat akan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang usaha yang ada. Pembentukan regulasi-regulasi oleh pemerintah sebagai fasilitator diperlukan untuk menguatkan posisi masyarakat dalam pola kemitraan tersebut juga diperlukan sehingga sosialisasi secara berkelanjutan terhadap pola kemitraan harus selalu dikembangkan. Strategi ini juga diperlukan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dapat menggunakan teknologi- teknologi terbaru dan berkembang dengan permodalan oleh pihak swasta.

11.3.3 Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Strategi 1. Penyusunan Kebijakan Investasi Pariwisata.

Keberadaan industri dan investasi pariwisata sebagai motor penggerak berkembangnya produk wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan tentu saja menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Secara ekonomi, investasi tersebut mampu meningkatkan kelayakan sektor pariwisata yang bersifat sebagai destinasi pariwisata yang mampu menarik perhatian wisatawan datang berkunjung. Tentu saja strategi ini diharapkan menjadi salah satu hal yang mampu mendorong peningkatan keberhasilan sektor pariwisata daerah dengan mendorong peningkatan populasi pertumbuhan investasi pariwisata sehingga peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola industri kecil dan menengah yang dihadapi dapat berjalan dengan lancar serta mampu meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk datang berkunjung.

Pembuatan regulasi dan skema sistem informasi kesempatan melakukan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitator untuk mempropagandakan produk wisata Kabupaten Jeneponto sehingga pihak swasta merasa tertarik untuk melakukan investasi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan promosi pameran pariwisata dan memaparkan peluang- peluang investasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Jeneponto dengan mengundang para investor mengunjungi daya tarik dan atraksi wisata yang akan ditawarkan dan jenis investasi yang dapat dilakukan.

Strategi 2. Reduksi Kendala Investasi Pariwisata

Guna mendukung strategi peningkatan pertumbuhan populasi investasi pariwisata melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan pihak swasta sebagai investor juga diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh investor ketika akan melakukan kegiatan investasinya. Hal ini untuk mendukung peningkatan kerjasama yang dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga semakin meningkatkan kemampuan pariwisata ketika bersaing merebut pasar wisatawan. Pemberian kemudahan-kemudahan melalui berbagai program pun dapat dilakukan, seperti pemberian insentif tertentu pada sektor investasi unggulan, atau perbaikan regulasi-regulasi investasi sehingga keinginan untuk melakukan investasi dapat berlangsung dengan pola kemitraan tertentu dan berkesinambungan.

11.4 Arahan dan Strategi Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya pengembangan dari aktifitas promosi dan pemasaran yang drencanakan dengan baik. Dengan demikian,

kebutuhan akar manajemen pemasaran tidak dapat diabaikan begitu saja dalam perjalanan suatu bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau bahkan pemerintah. Manajemen pemasaran adalah bagaimana menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat tergantung kepada penawar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut guna membantu dalam menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani kebutuhan pasar.

Pemasaran pariwisata (tourism marketing) juga sebagai suatu sistem dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, promosi dan pemasaran sebagai salah satu bagian penting dari sektor pariwisata yang harus dikembangkan.

Secara rinci arahan kebijakan pengembangan pariwisata dalam aspek industri dan investasi dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dimana setiap arahan kebijakan tersebut memiliki strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar program rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Jeneponto. Kebijakan tersebut, meliputi :

- Pemantapan Strategi Pasar Utama Dan Pasar Potensial Wisatawan Untuk Mendukung Pengembangan Daerah tujuan Wisata (DTW) Kabupaten Jeneponto
- 2. Pengembangan Dan Pemantapan Citra Pariwisata Kabupaten Jeneponto Sebagai Destinasi Pariwisata
- 3. Pengembangan Model promosi Dan Pemasaran Pariwisata Sesuai Pasar Wisatawan Kabupaten Jeneponto

11.4.1 Strategi Pemantapan Segmentasi Pasar Strategi 1. Optimalisasi Fungsi Pasar Wisatawan.

Pasar wisatawan sebagai bagian dari faktor penting yang mempunyai peranan dalam keberhasilan suatu program pemasaran sangat ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan pariwisata daerah, karena itu sebelum program pemasaran dilaksanakan hal yang terlebih dahulu harus diketahui bagaimana segmentasi pasar wisatawan Kabupaten Jeneponto yang meliputi persepsi dan preferensi wisatawan, sosio-demografi wisatawan, dan sebagainya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pada umumnya, calon wisatawan menginginkan suatu produk wisata tertentu yang kemudian sesuai dengan keinginan atau tujuan wisatanya. Faktor sosio-demografi dan psikografi memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan memilih jenis produk dan daerah tujuan wisata

yang diinginkan sehingga berawal dari strategi inilah strategi promosi dan pemasaran kemudian dilanjutkan.

Strategi 2. Pengembangan Orientasi Pasar Wisatawan

Disamping terdapatnya pasar utama dan pasar potensial yang dimiliki oleh pariwisata Kabupaten Jeneponto, maka untuk mendatangkan wisatawan yang lebih banyak lagi maka dapat dilakukan dengan strategi pengembangan pasar wisatawan kearah orientasi yang lebih besar lagi. Hal ini juga dapat dilakukan untuk penyegaran kualitas produk wisata yang ditawarkan yang sesuai dengan kesenangan target pasar wisatawan. Denga mengetahui kesenangan dan kebutuhan wisatawan, makan strategi promosi dan pemasaran akan lebih muda dilakukangan sehingga materi promosi yang diberikan lebih kepada apa saja yang mereka butuhkan.

Selain itu, untuk menggaet target pasar baru wisatawan, hal yang juga dapat dilakukan dengan strategi ini seperti memberikan kemudaha-kemudahan untuk kunjungan pertama kalinya dengan memberikan dan menciptakan citra pariwisata dalam memori wisatawan sehingga menarik minat dan motivasinya untuk datang berkunjung selanjutnya. Kemudahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui pemberian potongan harga, tiket terusan di beberapa daerah tujuan wisata (DTW), dan sebagainya

11.4.2 Pengembangan Dan Pemantapan Citra Pariwisata

Strategi 1. Pembentukan Citra Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Melihat posisi geografis Kabupaten Jeneponto yang memiliki sejarah yang penting, serta masyarakat yang memiliki budaya dan karakteristik yang baik maka sangat mendukung untuk dilakukan pengembangan pariwisata karena memiliki *positioning* dan peluang yang mampu bersaing merebut pasar wisatawan. Hal ini juga dilihat dengan kemampuan aksesibilitas menuju Kabupaten Jeneponto yang sudah sangat mudah dicapai.

Citra pariwisata yang juga sebagai salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan berkunjung oleh wisatawan. Dukungan seluruh pihak harus bersama-sama dilakukan guna mendapatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Jeneponto. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu stakeholders yang akan melakukan interaksi langsung dengan wisatawan harus mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut wisatawan yang datang berkunjung. Strategi ini cukup mampu memberikah perhatian lebih bagi pemerintah mengingat hal ini merupakan pengetahuan awal sebelum program promosi dan pemasaran dilakukan

Strategi 2. Peningkatan Kerjasama Dengan Media Promosi, Dalam Membentuk Citra Pariwisata.

Strategi ini tidak dapat dipisahkan dengan langkah pembentukan citra pariwisata Kabupaten Jeneponto. Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik elektronik, sebagai bahan promosi media cetak, maupun dalam bentuk acara-acara promosi khusus daerah tujuan wisata. Strategi ini tidak hanya dilakukan untuk menarik wisatawan dan dilakukan pada tempattempat sumber wisatawan, akan tetapi juga dilakukan untuk skala internal Kabupaten Jeneponto sendiri seperti pelaku usaha wisata di Kabupaten Jeneponto, pegawai pemerintahan sebagai sektor terkait dan fasilitator di dalamnya, masyarakat secara umum serta bagi kelompok-kelompok pariwisata yang terlibat langsung di dalamnya.

11.4.3 Pengembangan Model Promosi Dan Pemasaran

Strategi 1. Pembentukan Branding Pariwisata.

Pembentukan Kasawan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Jeneponto telah diarahkan dengan memgembangkan peta-peta tematik sesuai dengan karakteristik yang keunggulan yang dimiliki oleh produk wisata yang ditawarkan pada masing-masing KSPD. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan KSPD ini juga akan mencerminkan keseluruhan kekuatan pariwisata Kabupaten Jeneponto sesungguhnya dalam mempengaruhi minat wisatawan datang Untuk mewadahi keseluruhan pengembangan berkunjung. pariwisata Kabupaten Jeneponto, maka diperlukan strategi pembentukan branding atau tagline pariwisata untuk mempromosikan dan mempromosikan Kabupaten Jeneponto yang mencerminkan pariwisata secara menyeluruh dan komprehensif dan dilakukan secara terus menerus kepada wisatawan dan semua pihak hingga hal tersebut tertanam dalam memori dan secara otomatis mengenali dan memahami bahwa hal tersebut adalah promosi pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Strategi 2. Peningkatan Kegiatan Promosi

Membuat materi promosi dan pemasaran yang baik menjadi salah satu tantangan dan faktor penting dalam promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Jeneponto. Termasuk penyajian gambar yang baik, kualitas gambar dan audio yang baik juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemanfaatan materi promosi yang dilakukan melalui berbagai media sebagai salah satu strategi dalam pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Jeneponto. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaharui materi promosi yang sudah ada kemudian melakukan pemeliharaan terhadap materi-materi tersebut. Strategi ini kemudian disebarluaskan ke berbagai jenis media, baik media

offline mapun online. Penyebaran melalui media sosial juga saat ini menjadi salah satu program yang dapat mempropagandakan pariwisata Kabupaten Jeneponto secara cepat.

Strategi 3. Pengembangan Pemasaran Terpadu Dengan Bidang Lain Khususnya Bidang Industri Dan Perdagangan

Pemasaran terpadu pariwisata Kabupaten Jeneponto dengan melakukan kerjasama terhadap berbagai sektor, misalnya sektor industri dan perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk tetap mengadakan promosi dan pemasaran meskipun wisatawan telah berada di Kabupaten Jeneponto guna tetap memberikan informasi mengenai pariwisata Kabupaten Jeneponto sehingga wisatawan akan melakukan kunjungan selanjutnya. Pemasaran ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar wisatawan kemudian mengimplementasikan melalui tempat-tempat yang menjadi gerbang kedatangan wisatawan, touring base, rest area, dan transit point sehingga ingatan akan pariwisata Kabupaten Jeneponto ada dimana saja wisatawan berada.

Strategi 4. Pengembangan Pemasaran Terpadu Dengan Beberapa Destinasi Lainnya

Selain melakukan pemasaran terpadu melalui kerjasama lintas sektor, maka pemasaran terpadu Kabupaten Jeneponto juga dapat dilakukan melalui kerjasama promosi dan pemasaran dengan beberapa Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) seperti perluasan kerjasama paket-paket wisata untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan sehingga akan lebih banyak perbelanjaan yang terjadi. Selain itu, kerjasama penyelenggaraan event-event secara berkala dan berkelanjutan juga dapat dilakukan guna menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung di beberapa daerah tujuan wisata (DTW).

Strategi 5. Pengembangan Kerjasama Dengan Komunitas Kreatif, Seni Budaya, Sejarah, Dan Ilmu Pengetahuan

Sebagai salah satu pihak yang paling diperhatikan dalam pariwisata Kabupaten Jeneponto, komunitasi kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, serta komunitas lainnya juga dapat mendukung aktifitas promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunitas yang mereka lakukan di Kabupaten Jeneponto dan mengambil gambar pada daerah tujuan wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Jeneponto, maka secara tidak langsung penyebarluasan informasi yang mereka lakukan juga sebagai media promosi terhadap pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Berbagai strategi yang dilakukan untuk mengembangkan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Jeneponto, maka strategi ini juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk mengimplementasikan materi promosi yang akan dilakukan. Pemerlihaaran dan pemantauan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang telah ditimbulkan terhadap pariwisata Kabupaten Jeneponto

11.5 Arahan dan Strategi Pengelolaan lingkungan

Pengembangan pariwisata berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengarahan untuk mengelola lingkungan secara optimal, agar tetap terjaga keselarasan antara pengembangan daerah-daerah tujuan wisata dengan kestabilan kelestarian lingkungan.

11.5.1 Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata Strategi 1. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

ini mengkhususkan pengelolaan Strategi sampah, mengingat sampah selalu menjadi persoalan di kawasan pariwisata. Kesadaran banyak pihak masih kurang kuat di dalam pengelolaan sampah, terlebih lagi di kawasan pesisir dan laut. Mengolah sampah identik dengan pekerjaan yang rendah, sehingga sedikit sekali orang ingin terlibat di pengolahan sampah. Hal yang perlu dijaga dan dikembangkan adalah kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan konsep minimalisasi dan kelola sampah dari tingkat rumah tangga serta pengawasan ketat terhadap produksi sampah industri. Pemerintah harus secara paralel membangun sistem tata kelola sampah, termasuk menyediakan teknologi tepat guna untuk mengelola sampah mulai dari skala kampung hinggga skala kecamatan.

Pengolahan sampah harus diiringi dengan program peningkatan kesadaran dan pelatihan pengolahan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Sampah plastik sisa kemasan minuman yang biasa banyak dijumpai dapat diolah menjadi tas dompet dengan sedikit pelatihan tentang penganyamannya. Pemerintah bekerjasama daerah dengan masyarakat kampung wisata diarahkan dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto.

Strategi 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Strategi ini mengarahkan pada upaya pengadaan dan pengembangan ruang terbuka hijau pada setiap KSPD dan daerah tujuan wisata. Program pelestarian taman dan kebun pekarangan rumah juga merupakan suatu upaya dalam rangka pemenuhan strategi peningkatan ruang terbuka hijau secara vertikal maupun horisontal. Peraturan mengenai standar ruang terbuka hijau pada setiap destinasi wisata penting untuk disusun dan diberlakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam semata-mata bagi pengembangan ekonomi pariwisata tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan

11.5.2 Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan Strategi 1. Pengadaan Kajian Daya Dukung Lingkungan

Sebelum membuka atau mengembangkan kawasan pariwisata, penting adanya kegiatan penelitian khusus terkait dengan daya dukung lingkungan. Pengadaan AMDAL yang benarbenar telah melalui kajian yang bermutu perlu diwajibkan dan diberikan regulasi ketat serta perlu diawasi oleh seluruh pihak terutama forum kelembagaan pariwisata. Kajian lingkungan ini perlu didampingi oleh ahli yang berkompeten di bidangnya serta dievaluasi secara berkala.

Strategi 2. Pengelolaan Permintaan Kunjungan Wisatawan

sangat berkaitan Pengelolaan permintaan kunjungan perlindungan lingkungan pariwisata konservatif. dengan Pembatasan kunjungan terutama diterapkan pada wilayah pulaupulau yang memiliki sumberdaya alam terbatas serta kampungkampung ekowisata yang perlu dijaga kelestariannya. Peran pengelola pariwisata ataupun biro perjalanan wisata wajib mengatur permintaan kunjungan pada tempat-tempat tersebut dan menyampaikan aturan yang lebih ketat namun tidak mengurangi kebebasan eksplorasi pengunjung yang tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan pariwisata.

11.6 Arahan dan Strategi Pengelolaan Kelembagaan dan SDM

11.6.1 Penguatan Manajemen Pariwisata

Strategi 1. Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat

Jika manajemen daya tarik disusun dan opsi-opsi inovasi pengelolaan daya tarik dikembangkan serta diikuti pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk berpartisipasi dalam manajemen daya tarik, maka diharapkan konsep ini akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang ada disekitar daya tarik. Hal ini juga akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta budaya bahari dan sejarah yang menjadi aset pariwisata.

Pengembangan mekanisme pengelolaan daya tarik sebaiknya memperhatikan karakteristik lokal masyarakat, sehingga pola pendekatannya mengkombinasikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga lebih dapat menyerap. Pola pelatihan untuk pengelolaan juga dilakukan melalui pola pendampingan yang intens, kemudian dilakukan monitoring untuk jangka waktu satu tahun. Beberapa hal yang dapat dimonitoring adalah, pencatatan, administrasi, kendala-kendala yang dihadapi sebagai bahan untuk peningkatan kualitas serta potensi pengembangan ke depan.

Strategi 2. Pembentukan Forum Pariwisata

Strategi pembentukan Forum Pariwisata didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: (1) Mengingat sumber daya manusia pengelola yang masih perlu ditingkatkan; (2) Mengingat pengelolaan pariwisata cukup kompleks, karena multi sektor, multi pihak dan multi disiplin ilmu. Oleh karenanya membutuhkan pengembangan jejaring di dalam pelaksanaannya; (3) Dalam upaya mendukung pengelolaan yang lebih efektif, adaptif, dan profesional.

Forum ini ini terdiri dari berbagai pihak, perwakilan yang ditunjuk secara tetap dari sektor yang terkait perhubungan, kehutanan,perikanan dan kelautan, pekerjaan umum, kesehatan, serta perwakilan asosiasi resor, asosiasi biro perjalanan, LSM, dan Akademisi. Forum ini berfungsi sebagai kelompok berfikir dan membantu Dinas Pariwisata dalam merancang program dan membina hubungan dengan pihak- pihak lain di tingkat lokal, nasional dan internasional. Forum juga memastikan dan mengawasi jalannya program serta bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan dan pariwisata melakukan evaluasi dan penetapan target ke depan. Selain itu forum dapat memberikan masukan dalam penyelesaian konflik yang terjadi diantara pelaku serta juga pelaku dan masyarakat.

Strategi 3. Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.

Penyusunan kelola destinasi tata hingga tingkat pelaksanaan, bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Program DMO (Destination Management Organization) dapat digandeng oleh pemerintah daerah untuk penyusunan tata kelola yang lebih rinci sesuai dengan arahan dalam RIPPARKAB ini. Program dalam strategi ini di antaranya penetapan tujuan yang jelas serta tahapan pelaksanaannya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah program penting lain destinasi di Indonesia pemantauan. Di banyak program pemantauan selalu menjadi hal yang paling lemah, karena biasanya pemantauan tidak direncanakan sejak awal. Pada tahapan saat ini dimana pariwisata Kabupaten Jeneponto sedang pengembangan, adanya dalam tahap penting penetapan indikator-indikator keberhasilan sejak tahun 2017 untuk setiap lima tahun dan setiap tahunnya. Kemudian membuat kerangka pemantauan secara periodik terhadap program-program yang telah dilakukan.

Tatakelola destinasi meliputi pengelolaan pengunjung secara umum hingga pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata baik yang dikelola oleh swasta maupun oleh kelompok masyarakat. Strategi Tata kelola ini termasuk mengarahkan Dinas Pariwisata untuk menyusun mekanisme secara partisipatif bekerjasama

dengan forum pariwisata utamanya kelompok sadar wisata yang juga perlu dibentuk.

11.6.2 Peningkatkan Kapasitas Dalam Pengembangan Pariwisata Strategi 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata

Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata seringkali hanya diberikan pada masyarakat atau pelaku usaha, padahal pemerintah memegang peranan penting dalam upaya pembangunan kepariwisataan. Aparatur pemerintah adalah tokoh sentral, khususnya dalam perencanaan, pembuatan regulasi, dan pengawasan. Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga diharapkan oleh banyak pihak untuk sanggup memberikan pendampingan bagi masyarakat, dukungan teknis bagi pihak swasta, perlindungan bagi investor, dan banyak hal lagi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah mutlak diperlukan. Karena pariwisata bersifat lintas sektor, maka peningkatan kapasitas ini juga sebaiknya juga ditujukan bagi instansi – instansi terkait. Pembekalan ini sebaiknya dilakukan pada tahapan dimana sistem kelola dan juga "branding" pariwisata Kabupaten Jeneponto telah disepakati, sehingga pembekalan pada aparatur pemerintahan selain pada pengetahuan tentang pariwisata itu sendiri, tujuan dan target-target dari sektor pariwisata dalam 5 tahun ke depan, tentang bagaimana sektor lain dapat berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian lokal yang berkelanjutan.

Selain apa yang telah dijelaskan di atas, pelatihan-pelatihan untuk aparatur, khususnya di bidang perencanaan, pendampingan masyarakat dan pengelolaan daya tarik menjadi cukup penting, karena aparatur dinasmerupakan komponen penggerak program dan harus betul betul memahami tujuan dan teknis pendampingan, sehingga program yang dijalankan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Strategi 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata.

Pelaku usaha sebagai tokoh sentral lainnya juga perlu ditingkatkan fasilitasnya, terutama dalam hal peningkatan standar umum pelayanan. Pelaku usaha termasuk pemandu, pengelola fasilitas akomodasi (hotel, resor, rumah inap, kapal), pengelola fasilitas penunjang, operator transportasi, dan sebagainya. Peningkatan ini tidak mutlak menjadi tanggung jawab Dinas Kepariwisataan tetapi perlu bekerjasama dengan berbagai instansi, lembaga teknis, maupun LSM untuk melakukan strategi ini.

Strategi 3. Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

Pendampingan masyarakat menjadi bagian yang tak terlepas dari pengembangan aspek pariwisata sebagai bagian program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diarahkan untuk membuat ketentuan bagi pihak-pihak lain yang ingin berpartisipasi di dalam membangun masyarakat dan pelestarian sumber daya alam amaupun budaya, menetapkan pola pendampingan. Dengan demikian akan membantu meringankan Pemerintah Daerah dalam implemantasi program. Tantangan penerapan pola pendampingan adalah belum sejalannya dengan birokrasi administrasi pemerintahan yang seringkali hanya melakukan program satu kali saja.

Melihat kapasitas masyarakat Kabupaten Jeneponto, maka pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan untuk memberikan gambaran tentang sektor pariwisata secara baik, hingga implementasi program melalui pola pendampingan dan bantuan tenaga teknis dari pihak pemerintah maupun akademisi serta LSM.

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Jeneponto Tahun 2018-2033

TAHAPAN PENANGGUNG I III Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya

2	CTEACTS	MAN COOL CONTROL	TAHAPAN	PENANGGUNG
2	SIRAIES	INDINASI PROGRAM	= -	JAWAB
ro L	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPO) prioritas pada setiap KSPD	0	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vand
ø	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD		bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan		lainnya
		Pengembangan aksesisibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata		
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata		
Arah	Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaa	raan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata	rik dan Atraks	si Wisata
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)		DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)		jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya

Q	STRATE	MAGOGG BANIONI	TAHAPAN	PENANGGUNG
	SILVIES	MANDON I ISANIONI		JAWAB
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Pembentukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto (BPPPS)		parig bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto		
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata		

PEN	PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA	RIWISATA			
Arah	Arah Kebijakan 1 : Pengembang	embangan Daya Tarik dan Atrasi Wisata			
ON	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN	NA	PENANGGUNG
+	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)			Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Penyusunan master plan kawasan night market & culinary (Food and Shopping Street).			(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah			kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.			
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Jeneponto.			
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.			
(3)		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi laut yang mudah dan aman dari dan ke pulau			

PENANGGUNG	JAWAB	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung	kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya				16
AN	=						
TAHAPAN	Ξ					3	
		00,400			DESCRIPTION AND PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN ASSESSMENT OF THE PERSO		
MAGGOOGIANI	INDIRASI PROGRAM	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi laut, pantai dan sungai seperti snorkeling, parasailing. Jetski, volley pantai, kitesunfi selancar layang, fiying fish, fiyingboard dan tubing	Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jeneponto	Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep <i>marine</i> tourism, jelajah flora dan fauna laut	Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep marine tourism dan glamour camping pada kawasan hutan dan pegunungan	Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan	Perencanaan area perhentian/ istirahat (resting area) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam
CTDATEC	SINAIEGI	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru					
Ç	2	8					

NAME OF THE PERSON NAME OF THE P	September 1		TAHAPAN	MAG	PENANGGUNG
Q N	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	=	E	JAWAB
က	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (entry point) kabupaten Jeneponto pada batas-batas kabupaten			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
		Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas		0	bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (integrated resort area) di Mangrove, Bissolo dan sekitarnya			dan SKPD terkait lainnya
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi			
	500000	Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Jeneponto.			4
Arah	Kebijakan 2 : Pengembang	Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas. Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata	Pariwis	ata	
-	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>			
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata			
Arah	Kebijakan 3 : Peningkatan	Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW			
-	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional			7.2

2	CTDATEC	MAGOOGISANIGNI	TAHAPAN	PENANGGUNG
2	SIRAIEGI	INDINASI FROGRAM		II JAWAB
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi laut berstandar pariwisata internasional		Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman		(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata		dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)		

Arah	Kebijakan 1 : Perencanaar	Aran Nebijahan I. Perencanaan Perwinayanan muusu Panwisata Nabupaten Jenepomo	nodalla e lla	
ON	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN	PENANGGUNG
-	Penetapan kawasan industri pariwisata yang danat menjangkan ekala	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata		Satuan Kerja Perangkat Daerah
	regional maupun lokal	Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata		(SKPD) yang bertanggung
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata		kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
Arah	Kebijakan 2 : Pengembang	Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto	iten Jenepon	ito
	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata		Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan		(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kenanwisataan
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata	W	dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan		

0	emante.		TAHAPAN	PENANGGUNG
2	SIRAIEG	INDINASI PROGRAM	=	JAWAB
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (e-commerce)		
Arah	Arah Kebijakan 3 : Peningkatan	atan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Jeneponto	iten Jenepo	nto
-	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata		Satuan Kerja Perangkat Daerah
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal		(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang
		Pelibatan masyarakat (adat, desa. dsb) dalam kemitraan		kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
Arah	Kebijakan 4 : Peningkatan	Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Jeneponto	ten Jenepor	nto
-	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata		Satuan Kerja Perangkat Daerah
64	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)	*	(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata		dan SKPD terkait lainnya

PEN	PENGEMBANGAN PASAR DAN Arah Kebijakan 1 : Pemantapan	DAN PEMASARAN tapan Segmentasi Pasar				
2	CTDATECT	Maca Dodd 194 NIGHI	TAH	TAHAPAN		PENANGGUNG
2	SINAIEG	MANDON LONGING	_		=	JAWAB
←	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan			<u>%426</u>	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vano
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan			`g`@`s	bertanggung Jawab di bidang Kepariwisataan
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan			<u>a</u> <u>a</u>	dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
	**	Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan			ř	
Arah	Kebijakan 2 : Pengembang	Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata				
-	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Jeneponto	Pelaksanaan Fam Trip bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (travel writer) dan media			\$ 	
		Penyusunan calendar of event pariwisata			1 3	

9	- Carretto	an and opposite the same	TAHAPAN	z	PENANGGUNG
2	SIKAIEG	INDIKASI PROGRAM		=	JAWAB
		Pembangunan land-mark kabupaten Jeneponto			Satuan Kerja Perangkat Daerah
ŭ	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media online dan ofiline dalam promosi pariwisata			(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
	St.	Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Jeneponto			dan SKPD terkait lainnya
Arah	Arah Kebijakan 3 : Pengemban	mbangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata	sata		
÷	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Jeneponto		\$	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Jeneponto			(SKPD) yang bertanggung lawab di bidang
61	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media	8		kepariwisataan dan SKPD terkait
		Pemasangan promosi dengan <i>giant</i> screen pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten		7	
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya			

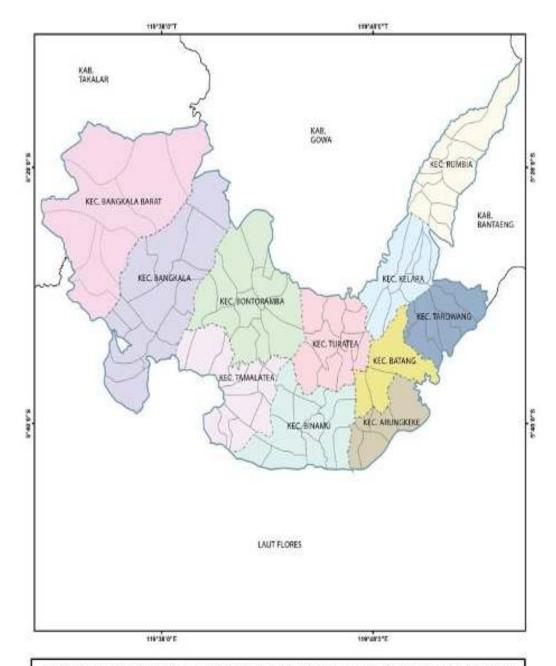
TAHAPAN PENANGGUNG	Satu Pera Daer	bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait	lainnya			
INDIKASI PROGRAM	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka Tourism-Trade and Investment	Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Jeneponto.	Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (instagramable) dalam promosi pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam
STRATEGI	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khisusaya bidang industri	dan perdagangan	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa	CCOLLIGOR MILITAGE	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	
ON	ю		4		ις.	

Arah	Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan	laan Lingkungan Pada Destinasi Wisata			
02	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN	Z =	PENANGGUNG JAWAB
-	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vang
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah			bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah	8		dan SKPD terkait lainnya
N	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau			
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman			70
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata			
Arah	Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan	Daya Dukung Lingkungan	l		
_	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi carrying capacity pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan			

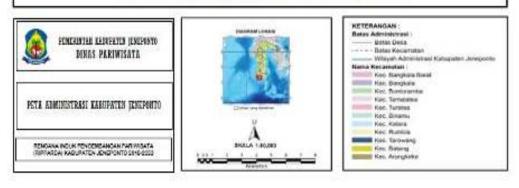
		***************************************	TAHAPAN	PENANGGUNG
QQ.	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	= -	1
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme		bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan		ki.
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan		

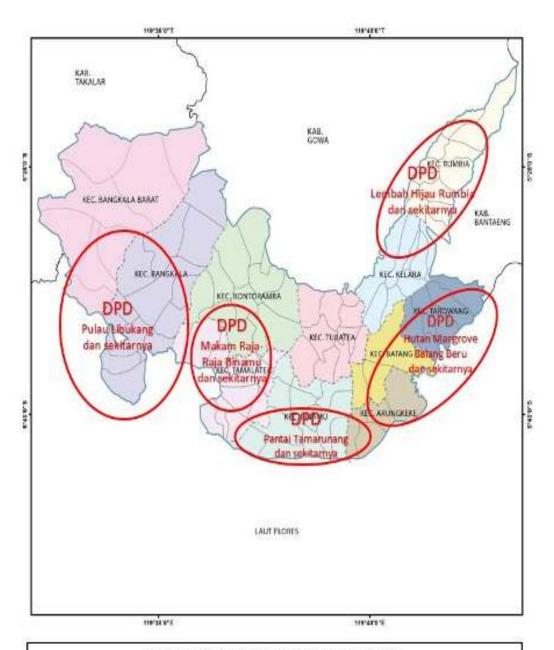
Arah	Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata	anajemen Pariwisata		
o N	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN	PENANGGUNG
-	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok	Pelatihan Community Based Tourism Development		Satuan Kerja Perangkat Daerah
	Masyarakat	Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya Tarik dan atraksi wisata		(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kenariwisataan
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan Destination Management Organization		dan SKPD terkait Iainnya
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb		
m	Tata kelola dan peningkatan kapasitas	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata		
	pelaksanaan, dan pemantauan program	Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata		
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi		

kepariwisataan bagi sh ig karier aparatur hidang pariwisata	Y.							
Pelatihan teknis k aparatur pemerintah Penataan jenjang	pemerintan dalam bidang pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata	Pelaksanaan sertifikasi usaha	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat	Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan	Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga keja pariwisata	Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata		Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata				

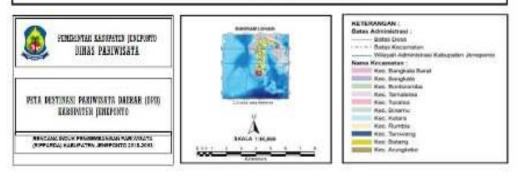


RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPPARDA) KABUPATEN JENEPONTO 2018-2033





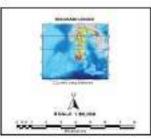
DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO





KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 1 KABUPATEN JENEPONTO



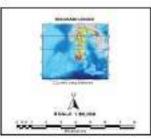






KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 2 KABUPATEN JENEPONTO



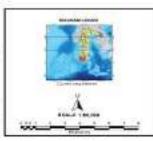






KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 3 KABUPATEN JENEPONTO



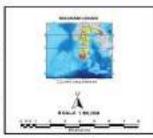






KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 4 KABUPATEN JENEPONTO



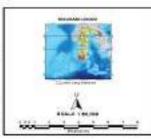






KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ZONA 5 KABUPATEN JENEPONTO



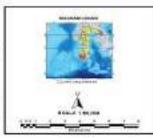






KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) KABUPATEN JENEPONTO







DAFTAR PUSTAKA

- **Alexander, P.A**, 1986, *Tourism and Its Significance in Local Development*, Michigan State University.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2017. Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017
- **Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2017.** Statistik Perhotelan Kabupaten Jeneponto 2017
- -----, **2018.** Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, *Jeneponto Regency In Figures* 2018
- **Briguglio, Lino**, dkk, 1996, Sustainable Tourism in Island and Small States: Issues and Policies, Biddles Limited, Guildrord and Kings Lynn.
- **Bull, Adrian**, 1991, *The Economics of Travel and Tourism*, Halsted Press. New York.
- Cook, S.D Stewart E, Ripass K, 1992, Tourism and the Environment.

 Travel Industry Association of America, Washington DC.
- Cool, Mc. SF. 1995, Linking Tourism the Environment and Concepts of Sustainability Setting the Stage. The Annual Meeting of the Nation Recreation and Park Association. Minneapolis MN.
- **Gartner, William**. 1996. *Tourism Development: Principless, Process, and Policies*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- **Gunn, Clare**. 1994. *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 3rd ed.,* Taylor & Francis, Washington DC.
- **Gee, Chuck Y**, dkk. 1997. *The Travel Industry*: Third Edition, Jhon Willey & Sons, Inc.
- http/// www: kemenpar. go. id
- Inskeep, Edward. 1993. Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Van Nostrand Reinhold, New York.
- **Harrison, David**. 1992, *Tourism and the Less Development Countries*, Halsted Press. New York.
- **Jhonson, Peter, Barry Thomas**, 1993, *Perspectives on Tourism Policy*, Biddles Ltd. Guildford & Kings Lynn.

- **Kusudianto, Hadinoto**, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, UI Press. Jakarta
- **Lea, Jhon**, 1993, *Tourism and Development in the Third World, Routledge*. London. New York.
- **L Foster, Dennis**. Disadur oleh Oka A Yoeti, 2003. Cetakan Ketiga. *Marketing Hospitality Hotel, Motel and Resort.* Jakarta: PT. Perca.
- Mile Post Consultant Inc, Promotion Of BIMP-EAGA As a Single Destination; With Empahasis on Notural and Cultural Tourism Resourses: Survey Report, ASEAN-Japan Center. 2007.
- Mowforth, Martin dan Land Munt, Tourism and Suatainaibility; Development and New Tourism In The Third World; Second Edition, Reutledge Taylor & Francis Group, 2003.
- **Marpaung, Happy**, 2000, *Pengetahuan Kepariwisataan*, Alfabeta. Bandung.
- **Mangkudilaga, Sufwandi**, 1998, *Kebudayaan dan Kesenian Sebagai Potensi Pariwisata*, Dirjen Departemen Parpostel. Jakarta
- **Pearce, Douglass**, 1994, *Tourist Development*, Longman Singapore Publishers Ltd. Singapore.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
- **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015,** tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031

- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018
- Ronny, S Viko, 2001, Tourism, Trade, Investment: Yogyakarta Dalam Bingkai Otonomi, Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Ross, Glenn F, 1998, Psikologi Pariwisata, Yayasan Obor Indonesia.
- **Spillane, James J**, 1991, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suyitno, 2001, Perencanaan Wisata, Kanisius, Yogyakarta.
- **Sugiarto, Endar**. 1998, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Smith, Valene L dan William R Eadington, 1992, Tourism Alternatives, Potentials and Problems in the Development of Tourism, John Wiley & Sons. New York.
- **Tisdell, Clement A** dan **Kartik C Roy**, 1998, *Tourism and Development : Economic, Social, Political and Environment Issues*, Nova Science Inc. USA.
- **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982**, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004**, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
- **Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007,** Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009**, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009**, tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- **UNDP WTO**, 1988. *Tourism Product Improvement Study*. Madrid: Final Report,.
- **Wahab, Salah**, dkk, 1994, *Pemasaran Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- **Weaver, D.B**, 2001, Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quartery, Edisi April, Ithaca. NY.
- **Wiendu, Nuryanti**, 1998, *Membudayakan Pariwisata dan Mempariwisatakan Budaya*, Dirjen Dep. Parpostel. Jakarta.
- Yoeti, Oka. A, 1985, Pemasaran Pariwisata, Angkasa Bandung.
- -----, 1993, *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*, Angkasa Bandung.

IDENTITAS PENULIS



Muhammad Arifin, Lahir di Enrekang pada tanggal 7 Januari 1963.. Menyelesaikan Pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1988, kemudian melanjutkan Pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2002.

Pada tahun 2010 memperoleh Sertifikat Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada Bidang Ilmu Manajemen Perhotelan dari Universitas Hasanuddin. Selain itu menjadi Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2008, Asesor Lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dari tahun 2014 dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta berbagai aktivitas benchmark pada perguruan tinggi terkemuka di Malaysia, Singapura, Hongkong, Belanda, Australia, Kanada dan Arab Saudi.

Saat ini aktif sebagai Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Sertifikasi pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA), Peneliti dan penulis kajian Pariwisata dan menjabat sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Makassar sejak tahun 2019 sampai sekarang.



Syamsu Rijal, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1968. Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPI Makassar pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Manajemen Pendidikan yang diselesaikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013, menyelesaikan program S3 jurusan Ilmu Administrasi Publikpada program

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Pada tahun 2019 memperoleh gelar profesi Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI). Selain pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti CBT/CBA The Best Quality Framework di Canberra Institute of Tafe-Australia, Competency Based Assessment di Quennsland Tafe-Australia, Quality Tourism pada Centro Superior de Hosteleria the Galicia (CSHG) Santiago Decampostella Spanyol, Sandwich Like Program pada Northern Illinois University-Amerika Serikat, serta berbagai aktivitas benchmark pada perguruan tinggi terkemuka di Hongkong, Belanda, New Zealand, Australia, dan Kanada

Saat ini aktif dalam berbagai asosiasi profesi, Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Phinisi, peneliti dan penulis pariwisata, Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).



Muhammad Arfin Muhammad Salim, lahir di Sinjai Sulawesi Selatan 13 Maret 1970 sebagai anak Ketiga dari Enam bersaudara.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmun Pendidikan (STKIP-YPUP) tahun 1997. Pada Tahun 2001, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana dengan program Studi

Magister Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Makassar (UNM) dan selesai pada tahun 2003.

Pada tahun 2010, Penulis mendapat Beasiswa Pendoktoran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pendidikan di Luar Negeri, Penulis berhasil meraih gelar Doktor Falsafah (Ph.D) dalam Bidang Bahasa dan Pariwisata (*Tourism Discourse*) di Univesiti Teknilogi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia pada Tahun 2015. Penulis telah melahirkan beberapa karya berupa jurnal Ilmiah yang terbit pada Jurnal Internasional (*Scopus*) dan Nasional terakreditasi. Selanjutnya, Pada Tahun 2017 Penulis mendapat Beasiswa (*Short Term Awards*) dari Pemerintah Australia untuk belajar tentang *Sustainable Tourism Development* di Griffith University. Pada Tahun 2019 mendapat kesempatan belajar tentang *Hospitality* di TAFE Queensland Australia.

Saat ini Penulis aktif selain sebagai Dosen di Politeknik Pariwisata Makasar juga menjadi Editor in Chief pada Jurnal PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event. Penulis tercatat sebagai Reviwer pada beberapa Jurnal baik Nasional maupun Internasional. Penulis juga merupakan Asesor Sertifikasi Profesi bidang Hospitality.



Faisal Akbar Zaenal, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 13 Oktober 1985.

Menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Perhotelah pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia Makassar Jurusan Manajemen Pemasaran yang diselesaikan pada tahun 2018. Selain

pendidikan formal, juga pernah mengikuti berbagai pelatihan seperti Hospitality Leadership and Industry 4.0 training programmedi Singapura pada tahun 2019.

Saat ini aktif menjadi Dosen di Politeknik Pariwisata Makassar, peneliti dan penulis di bidang pariwisata, menjadi Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjadi konsultan pada bidang kuliner.